

REKRUTMEN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK
(STUDI KOMPARASI PDI PERJUANGAN DAN PKB KABUPATEN
DEMAK)

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh :

Misfaatin Nisak

1806016064

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (Lima) eksemplar

Perihal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik UIN Walisongo
Semarang

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah mempertimbangkan aspek Akademis dan Administratif dilanjutkan dengan membaca, mengoreksi dan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya menyatakan bahwa Skripsi dari Mahasiswa :

Nama : Misfaatin Nisak

NIM : 1806016064

Jurusan : Ilmu Politik

Judul : Rekrutmen Perempuan Dalam Partai Politik (Studi Komparasi PDI Perjuangan Dan PKB Kabupaten Demak)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Desember 2021



Drs. H. Nur Syamsuddin, M.A

SKRIPSI
REKRUTMEN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK
(STUDI KOMPARASI PDI PERJUANGAN DAN PKB KABUPATEN
DEMAK)

Disusun Oleh :
Misfaatin Nisak
1806016064

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 21 April 2022 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang



Dr. Ahwan Fanani, M.Ag
NIP. 197809302003121001

Sekretaris Sidang



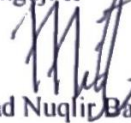
Drs. H. Nur Syamsuddin, M.A
NIP. 196805051995031002

Penguji I



Solkhah Mulrikhal, M.Si
NIP.

Penguji II



Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si
NIP.

Dosen Pembimbing



Drs. H. Nur Syamsudin, M.A
NIP. 196805051995031002

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya yang saya buat sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Walisongo maupun perguruan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 08 April 2022

Misfaatin Nisak

(1806016064)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr Wb.

Alhamdulillahirabbil alamin, penulis panjatkan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “REKRUTMEN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK (STUDI KOMPARASI PDI PERJUANGAN DAN PKB KABUPATEN DEMAK)”. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada pemimpin besar umat Islam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari masa kegelapan menuju masa pencerahan dan semoga menjadi umat yang berakhlakul karimah, berpengetahuan dan berintelektual.

Skripsi ini diajukan sebagai syarat guna mencapai gelar Sarjana Sosial S1 (S. Sos) pada Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT dan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Drs. H. Nur Syamsuddin, M.A dan Muhammad Mahsun, M.A selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo.
4. Drs. H. Nur Syamsuddin, M.A selaku Dosen Pembimbing I yang dengan tulus telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag selaku wali dosen yang telah memberikan pengarahan dan nasihat selama ini.
6. Bapak Ibu Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan dan pengalamannya sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan sangat berguna.
7. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

8. Seluruh Staf dan kader PDI Perjuangan Kabupaten Demak yang telah memberi kesempatan dan menerima penulis dengan baik untuk melakukan penelitian, sehingga penulis memperoleh data-data yang dapat mendukung dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh staf dan kader PKB Kabupaten Demak yang telah memberi kesempatan dan menerima penulis dengan baik untuk melakukan penelitian, sehingga penulis memperoleh data-data yang dapat mendukung dalam penulisan skripsi ini.
10. Terutama untuk Ibu yang selalu memberikan nasehat, dukungan, semangat, serta mendoakan setiap langkahku. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilindungi dunia akhirat dan senantiasa diberikan keberkahan rizqi.
11. Keluargaku, kakak-kakak ku yang selalu memberi arahan, motivasi, bantuan riil maupun non riil selama proses perkuliahan sampai penelitian skripsi. Semoga kalian juga diberikan kesehatan dan kebaikan serta seluruh kerabat yang telah mendukung.
12. Teman-teman marhaen, jazil, lintang, sari, alфина dan anang yang telah bersama sejak maba, tempat berkeluh kesah, saling menolong, mendukung, bekerja sama, terimakasih atas jasa kalian yang tak tergantikan.
13. Asisten mentor mas Wahyudin yang turut serta membantu dalam proses penelitian, memberikan semangat, dan arahan-arahan.
14. Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik 8B, semoga lancar dengan penelitian kalian serta seluruh teman-teman FISIP, kakak tingkat maupun adek tingkat baik sosiologi atau politik tetap semangat dalam menekuni keilmuannya.
15. Teman-teman Komunitas Juang, IPPNU, BPBD Demak, yang senantiasa terus menerus memberikan semangat, masukan, bimbingan baik dalam proses perkuliahan, penelitian maupun pengalaman.
16. Teman-teman KKN MIT DR, Bidikmisi Walisongo 2018, Pesantren Mbah Rumi, Pesantren Ulil Albab, KSMW, Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS-Bmh, KNPI Jateng, USAID, Komunitas Pemuda Wedung, Imade dan pihak lain yang telah memberikan motivasi, pengalaman, pengetahuan serta kenang-kenangan semasa kuliah.
17. Serta, semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur, penulis mengucapkan terima kasih dan memanjatkan doa semoga apa yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan balasan yang lebih baik dan diterima sebagai amal sholeh. Amin

Semarang, 08 April 2022

**Misfaatin Nisak
(1806016064)**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Orangtua tercinta **Ibu Musyafaah** serta almarhum **Bapak Misbah**

Yang telah membesarkanku dengan penuh cinta,
berjuang menjadi orang tua yang sangat baik,
sabar, kuat dan selalu mendukung serta ada disetiap langkahku.

Juga kepada keluarga, khususnya kakak-kakakku
terimakasih selalu memberi arahan serta dukungan.

Terimakasih almamaterku FISIP UIN Walisongo Semarang

MOTTO

**“Apa yang kamu dapatkan adalah bagian dari apa yang telah kamu lakukan,
maka lakukanlah kebaikan selagi tuhan memberi kesempatan”**

ABSTRAK

Studi ini mengkaji mengenai pola rekrutmen perempuan yang dilakukan oleh partai politik dengan mengambil lokus DPC PDI Perjuangan dan PKB Kabupaten Demak. Tujuan penelitian adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai pola rekrutmen yang dijalankan oleh partai politik khususnya terhadap perempuan, serta untuk membandingkan rekrutmen yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dan PKB, yang mana perbedaan basis ideology menjadi salah satu studi perbandingan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian dilakukan secara mendalam dengan mencari makna dari data-data yang didapatkan di lapangan, selanjutnya pada pendekatan studi kasus, penelitian dilakukan secara terperinci terhadap kasus-kasus yang dikaji, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi atau pengamatan yang dilakukan di DPC PDI Perjuangan dan DPC PKB Kabupaten Demak, selanjutnya adalah teknik wawancara dengan mengambil narasumber yang berasal dari masing-masing partai baik anggota maupun pengurus, yang terakhir adalah dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori rekrutmen politik sebagai kerangka berfikir untuk menganalisis permasalahan yang sedang dikaji.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pola rekrutmen perempuan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dan PKB. Pertama, terkait kriteria calon kader, PDI Perjuangan tidak memberikan syarat khusus, sementara PKB mensyaratkan calon anggotanya memiliki kesamaan ideology. Kedua, pola rekrutmen perempuan yang dilakukan PDI Perjuangan memiliki pola lateral (terbuka) untuk calon anggota dan calon pejabat public dan pola vertical (tertutup) untuk calon pengurus partai, adapun PKB cenderung memiliki pola vertical (tertutup) dalam proses perekrutan anggota, pengurus maupun calon pejabat public. Keempat, mekanisme yang dilakukan PDI Perjuangan dalam merekrut kader perempuan cenderung memanfaatkan media digital sementara PKB menggunakan cara-cara personal. Kelima, pada tahapan rekrutmen yang dilakukan untuk merekrut calon pejabat publik, PDI Perjuangan melakukan tahapan yang dimulai dari sertifikasi, verifikasi, seleksi, dan penetapan, adapun PKB tidak melakukan proses seleksi pada tahap pencalonan, perekrutan yang dilakukan melalui tahapan penjangkangan, nominasi, pemilihan umum. Keenam, pada proses seleksi dan kaderisasi perempuan, PDI Perjuangan secara selektif memilih calon pengurus dan pejabat yang akan diusung sementara PKB fokus pada pemenuhan keterwakilan 30% perempuan sehingga mengesampingkan kualitas kader. Pada proses kaderisasi PKB memiliki agenda khusus bagi perempuan melalui sayap partai yakni Perempuan Bangsa.

Kata kunci: *parpol, rekrutmen, Perempuan, PDI Perjuangan, PKB.*

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan.....	14
2. Sumber dan Jenis Data.....	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	16
4. Teknik Analisis data.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II REKRUTMEN POLITIK SEBAGAI KERANGKA TEORITIK	21
A. Definisi Konseptual	21

1.	Perempuan.....	21
2.	Partai Politik.....	21
3.	Rekrutmen.....	22
4.	Studi Komparasi.....	23
B.	Gender dan Politik.....	23
C.	Rekrutmen politik sebagai kerangka teoritik.....	25
BAB III	DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	43
A.	Gambaran Umum Kabupaten Demak.....	43
1.	Sejarah dan Visi Misi.....	43
2.	Kondisi Geografis.....	44
3.	Kondisi Administratif.....	45
4.	Iklim dan Curah hujan.....	46
5.	Kondisi Demografi.....	47
B.	Profil DPC PDI Perjuangan Kabupaten Demak.....	49
1.	Sejarah DPC PDI Perjuangan Kabupaten Demak.....	49
2.	Visi dan Misi partai.....	50
3.	Asas, Jatidiri dan Watak Partai.....	52
4.	Lambang dan Arti PDI Perjuangan.....	52
5.	Profil DPC PDI-P Kabupaten Demak.....	53
C.	Profil PKB Kabupaten Demak.....	54
1.	Sejarah DPC PKB Kabupaten Demak.....	54
2.	Visi dan Misi Partai.....	57
3.	Lambang dan arti PKB.....	57
4.	Asas, Jatidiri dan Watak.....	59
5.	Profil DPC PKB Kabupaten Demak.....	59
BAB IV	ANALISIS REKRUTMEN POLITIK PEREMPUAN PDI PERJUANGAN DAN PKB KABUPATEN DEMAK.....	64
A.	Rekrutmen Politik Perempuan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Demak.....	64
1.	Syarat dan Ketentuan Rekrutmen Perempuan.....	64
2.	Pola Rekrutmen Perempuan PDI Perjuangan Demak.....	68

3.	Proses dan Mekanisme Rekrutmen Perempuan oleh PDI Perjuangan	73
4.	Tahapan Rekrutmen.....	76
5.	Seleksi dan Kaderisasi Perempuan di DPC PDI Perjuangan Demak.....	79
6.	Kendala-kendala Dalam Proses Rekrutmen Perempuan.....	83
B.	Rekrutmen Politik Perempuan DPC PKB Kabupaten Demak	84
1.	Syarat dan Kriteria Rekrutmen Perempuan DPC PKB Demak	85
2.	Pola Rekrutmen Perempuan DPC PKB Demak	87
3.	Proses dan Mekanisme Rekrutmen Perempuan PKB Kabupaten Demak	89
4.	Tahapan Rekrutmen.....	93
5.	Seleksi dan Kaderisasi Perempuan di DPC PKB Demak.....	95
6.	Kendala-kendala Dalam Proses Rekrutmen Perempuan.....	98
BAB V PERBANDINGAN REKRUTMEN POLITIK PDI PERJUANGAN DAN PKB KABUPATEN DEMAK.....		100
A.	Perbedaan Ideologis PDI Perjuangan dan PKB dalam Perekrutan Perempuan 100	
B.	Perbedaan Rekrutmen Perempuan dalam PDI Perjuangan dan PKB.....	102
C.	Perbedaan Mekanisme dan Proses Rekrutmen Perempuan PDI Perjuangan Dengan PKB.....	104
D.	Perbandingan Pola Kaderisasi Terhadap Perempuan.....	109
E.	Perbandingan Jumlah Kader Perempuan PDI Perjuangan dan PKB	113
F.	Perbandingan Jumlah Caleg Perempuan PDI Perjuangan dan PKB	115
G.	Persamaan dan Perbedaan Rekrutmen Politik Perempuan Dalam PDI Perjuangan dan PKB	118
BAB IV PENUTUP.....		121
A.	Kesimpulan	121
B.	Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....		123
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		133

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Skema Rekrutmen Pippa Norris	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. Luas Daerah Kabupaten Demak.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Semarang Tahun 2021.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. Jumlah Penduduk Tahun 2020	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5. Struktur Organisasi	Error! Bookmark not defined.
Tabel 6. Struktur Organisasi	Error! Bookmark not defined.
Tabel 7. Perbedaan Pola Rekrutmen	Error! Bookmark not defined.
Tabel 8. Perbedaan Mekanisme dan Proses Rekrutmen.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 9. Jumlah Kader Perempuan PDI Perjuangan.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 10. Jumlah Kader Perempuan PKB	Error! Bookmark not defined.
Tabel 11. DCT Perempuan Pileg 2014 Kabupaten Demak	Error! Bookmark not defined.
Tabel 12. DCT Perempuan Pileg 2019.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 13. Perbandingan Perolehan Kursi Tahun 2009-2019 ..	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Perekrutan Politik Micheal Rush dan Althoff	32
Gambar 2. Peta Kabupaten Demak.....	44
Gambar 3. Logo PDI Perjuangan	52
Gambar 4. Logo PKB.....	58
Gambar 5. AD/ART PDI Perjuangan.....	65
Gambar 6. Foto Dokumentasi Wawancara.....	67
Gambar 7. Foto Dokumentasi Wawancara.....	69
Gambar 8. Foto Dokumentasi Wawancara.....	71
Gambar 9. Peraturan Partai mengenai Mekanisme Rekrutmen.....	74
Gambar 10. Buku Kaderisasi Perempuan PDIP	83
Gambar 11. AD/ART PKB.....	85
Gambar 12. Foto Dokumentasi Wawancara.....	88
Gambar 13. Foto Dokumentasi Wawancara.....	90
Gambar 14. Foto Dokumentasi Wawancara.....	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peraturan Partai PDI Perjuangan	126
Lampiran 2. Panduan Rekrutmen Perempuan PKB.....	126
Lampiran 3. Rapat Internal Perekrutan Caleg.....	127
Lampiran 4. Rapat PKB	127
Lampiran 5. Pendidikan Politik oleh PKB.....	128
Lampiran 6. Pendidikan Politik oleh PDI Perjuangan	128
Lampiran 7. Proses Kaderisasi PDI Perjuangan.....	129
Lampiran 8. Proses Konsolidasi PB untuk Menjaring Kader Perempuan.....	129
Lampiran 9. Surat Ijin Penelitian.....	130
Lampiran 10. Pedoman Wawancara	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam negara demokrasi, partai politik merupakan salah satu pilar utama dalam memobilisasi warga untuk ikut serta mengontrol dan mengelola negara. Partai politik dibentuk sebagai wadah organisasi yang bisa menyatukan kesamaan pemikiran orang-orang sehingga fikiran dan orientasi mereka dapat dikonsolidasikan secara besar sehingga berpengaruh terhadap pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Menurut Miriam Budiarjo, partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai tujuan, orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama untuk memperoleh kekuasaan politik dengan cara konstitusional (Miriam Budiarjo, 2008).

Pada sistem politik demokrasi, partai politik mempunyai beberapa fungsi, salah satunya adalah rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan suatu proses seleksi, pemilihan atau pengangkatan seseorang maupun kelompok yang bertujuan melaksanakan peranan dalam sistem politik. Pada sistem politik demokrasi, partai politik mempunyai beberapa fungsi, salah satunya adalah rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan suatu proses seleksi, pemilihan atau pengangkatan seseorang maupun kelompok yang bertujuan melaksanakan peranan dalam sistem politik di dalam suatu pemerintahan (Ramlan, 2010). Rekrutmen dalam partai politik dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan sistem politik, membantu kampanye, memberikan legitimasi pemilu, menjalankan dan membiayai organisasi, mempertahankan kekuasaan di pemerintahan, menjadi jangkar partai dalam masyarakat sipil, menempatkan actor dalam jabatan public, dan mengembangkan kebijakan baru (Hidayat, 2014). Rekrutmen politik merupakan momentum penting karena melibatkan partisipasi nyata dari masyarakat, proses ini menjadi kesempatan bagi masyarakat yang ingin bergabung dalam arena politik baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menempatkan diri sebagai anggota partai politik.

Di masa lalu pemerintah berupaya melakukan tindak affirmative guna merepresentasikan perempuan, namun belum berjalan secara maksimal kemudian

pada tahun 2004 mulai muncul kuota 30% kemudian dilanjutkan dengan sistem kuota dan sistem *zipper* pada tahun 2008 untuk meningkatkan keterpilihan perempuan melalui nomor urut. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan bahwa proses rekrutmen politik harus dilakukan dengan cara-cara yang mengedepankan asas demokratis sesuai dengan AD/ART serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya dalam proses rekrutmen, partai politik mengedepankan prinsip demokratis dan terbuka dengan asas keadilan, kesamaan, serta menerima semua golongan masyarakat yang ingin bergabung melalui proses kaderisasi internal partai. Peraturan tersebut diperjelas dalam pasal 2 dan 29 bahwa dalam proses pembentukan dan rekrutmen, partai politik harus menyertakan 30% kuota keterwakilan bagi perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam politik menjadi isu lama dalam perdebatan politik, ranah pribadi menjadi salah satu faktor penghambat bagi perempuan bergerak dalam ruang politik. Perempuan dianggap tidak memiliki kecakapan di dunia luar dan hanya mampu menjalankan aktifitasnya dirumah, terlebih dengann adanya budaya patriarki yang masih kuat di dalam masyarakat, artinya laki-laki dianggap lebih pantas menjadi seorang pemimpin, mempunyai kuasa atas perempuan serta memiliki kebebasan diluar. Selain itu persoalan agama juga menjadi penghambat perempuan memasuki dunia politik. Sulitnya figure seorang perempuan memasuki ranah politik selain dikarenakan beberapa faktor social dan budaya tersebut, hal ini lantaran beberapa lembaga seperti partai politik masih belum bisa berperan secara aktif merepresentasikan keterwakilan perempuan dalam konstelasi politik.

Dimasukkannya rumusan kuota 30% bagi perempuan dinilai dapat memberikan jalan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Hal tersebut sejalan dengan rumusan Pasal 4 CEDAW yang telah diratifikasi oleh pemerintah melalui UU Nomor 7 Tahun 1984 (Kurniawan, 2014). Affirmative action atau kebijakan afirmatif merupakan suatu kebijakan afirmasi yang diberikan pemerintah kepada sekelompok golongan tertentu. Sementara kehadiran perempuan dalam kontestasi pemilu juga turut diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum yang terdapat pada pasal 55 berbunyi “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh

persen) keterwakilan perempuan”. pemilihan umum juga turut diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum yang terdapat pada pasal 55 berbunyi "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan".

Namun dalam implementasinya, masih banyak partai politik yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kuota keterwakilan minimal 30% bagi perempuan. Penelitian ini mengkaji mengenai rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik dalam merekrut kader perempuan melalui studi komparasi dengan melibatkan dua partai politik yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Demak. Kabupaten Demak merupakan Kota yang memiliki sistem religious kuat, yang mana salah satu tokoh walisongo berasal dari Kota Demak yakni Raden Fatah. Oleh karena itu mayoritas masyarakat Demak beragama islam dengan kecenderungan aliran Nahdlotul Ulama sehingga partai PKB menjadi wadah organisasi yang sesuai dengan latar belakang masyarakat Demak dan juga banyak ulama yang ada di Kabupaten Demak, hal ini sesuai dengan kader PKB yang mayoritas adalah seorang ulama. PKB menjadi partai yang banyak diminati bukan hanya di daerah namun juga secara nasional, dalam skala nasional Indonesia merupakan salah satu negara islam terbesar di dunia dengan berbagai macam aliran dan yang paling dominan adalah NU, sehingga PKB memiliki basis massa yang cukup besar dibanding partai lainnya. dalam skala nasional Indonesia merupakan salah satu negara islam terbesar di dunia dengan berbagai macam aliran dan yang paling dominan adalah NU, sehingga PKB memiliki basis massa yang cukup besar dibanding partai lainnya.

PKB menyasar kalangan ulama dan santri sebagai anggota partai mereka, pengaruh seorang ulama sangat besar di negara yang memiliki basis masyarakat islam, PKB mendasarkan ideologinya pada religious moderat yang mana agama menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan seluruh proses politik baik didalam internal partai maupun diluar partai. Partai dengan basis religious memiliki persyaratan lebih khusus misalnya terkait agama yang dianut serta keyakinan yang diyakini untuk mempertimbangkan kesamaan visi misi partai, sehingga untuk berafiliasi dengan partai PKB, calon anggota harus memiliki kesamaan ideology

dengan partai PKB. Berbeda dengan partai islam masa lalu atau di negara Timur Tengah, dalam urusan negara PKB memiliki kecenderungan moderat yakni menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religious, PKB tidak hanya berkungkung persoalan agama namun juga terlibat aktif dalam urusan negara.

Berbeda dengan PKB, PDI Perjuangan merupakan partai berbasis nasionalis yang mendasarkan ideology pada filosofi nasionalis yaitu Pancasila. Jika religious memiliki pandangan serius terhadap agama, partai nasionalis mensyaratkan anggotanya untuk memiliki loyalitas terhadap negara, asas dan peraturan negara sangat dijunjung tinggi. Dalam merekrut calon anggota partai, calon kader setidaknya harus memiliki jiwa patriotism yang tinggi terhadap negara, partai dengan basis nasionalis tidak mempersoalkan perbedaan agama menjadi faktor penghalang seseorang melibatkan diri dalam partai politik, sehingga semua agama diterima di dalam PDI Perjuangan. Saat ini PDI Perjuangan dan PKB menjadi dua partai besar secara nasional di Indonesia, bahkan di Kabupaten Demak dua partai ini juga memiliki massa serta kursi terbanyak diantara partai lain.

Berdasarkan hasil Daftar Calon tetap pada pemilihan legislative Tahun 2019 keterwakilan perempuan di Kabupaten Demak tercatat masih rendah yakni dari jumlah keseluruhan 16 partai yang mengusung kadernya tercatat kurang dari 30% DCT adalah perempuan dari jumlah keseluruhan calon. Hal ini menarik peneliti untuk mengkaji mengenai rendahnya keikutsertaan perempuan dalam kontestasi politik, mengingat partai politik memiliki fungsi sebagai perekrut actor-aktor politik serta untuk mengimplementasikan aturan yang telah diamandemen dalam UU mengenai kewajiban partai politik melibatkan diri dalam proses merekrut kader perempuan menduduki jabatan politik baik dalam fungsi legislasi maupun eksekutif. Selain itu, berdasarkan data BPS Kabupaten Demak pada Tahun 2020 tercatat sebanyak 610 ribu adalah seorang perempuan, sementara 590 ribu adalah laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Kabupaten Demak lebih banyak yang berjenis kelamin perempuan daripada laki-laki sehingga hal ini seharusnya tidak menjadi kesulitan dalam merekrut massa perempuan di Kabupaten Demak (BPS, 2021).

Berdasarkan hasil putusan KPU Kabupaten Demak terhadap pemilihan calon legislative Kabupaten Demak Tahun 2019 lalu, PDI Perjuangan dan PKB memperoleh kursi terbanyak di legislative. Partai PDIP memperoleh 11 kursi dengan menempatkan 2 orang kader perempuan-nya, sementara PKB memperoleh 9 kursi legislative, namun tidak ada satupun kader perempuan yang menduduki jabatan dewan legislative tersebut. Hasil ini mengalami fluktuasi pada kedua partai dibanding periode sebelumnya yakni pada Tahun 2014, PDI Perjuangan yang sebelumnya hanya bisa menempatkan satu kader perempuannya kini mengalami kenaikan, namun PKB mengalami penurunan yakni absennya 2 kader perempuan yang sebelumnya berhasil menduduki kursi legislative. Hal ini menarik bagi peneliti untuk mengkaji mengenai bagaimana pola rekrutmen yang diterapkan oleh kedua partai tersebut, mengingat kedua-nya merupakan dua partai besar di Kabupaten Demak, memiliki basis massa, afiliasi serta organisasi sayap partai yang sangat besar seperti PDIP dengan Komunitas Juang-nya. Berbeda dengan PDIP, PKB justru memiliki organisasi sayap partai yang didominasi oleh perempuan yaitu Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB). Selain itu juga memiliki afiliasi terhadap organisasi perempuan lain yaitu Fatayat Muslimat Nahdlotul Ulama.

Mempertimbangkan mengenai persoalan tersebut peneliti menggunakan analisis komparasi untuk membandingkan pola-pola rekrutmen yang dilakukan oleh kedua partai, dimana proses ini menjadi dasar utama partai menempatkan actor terbaiknya menduduki jabatan legislasi khususnya perempuan ditinjau dari aspek proses pemilihan, pendataan, pemilihan, pengkaderan, serta kesiapan partai menyiapkan kader perempuan yang siap bersaing dengan kader laki-laki. Perbandingan melibatkan sebuah abstraksi situasi atau proses konkrit yang tidak pernah dibandingkan semata, setiap fenomena, manifestasi dan perilaku diharapkan merupakan peristiwa yang unik pendekatan yang nantinya dilakukan dalam proses memperbandingkan juga akan menentukan deskripsi pendekatan, apakah akan terbatas pada pendekatan lembaga pemerintahan yang dibentuk secara formal atau lebih pada sebuah kontekstual dalam pembongkaran kekuatan-kekuatan politik yang ada.

Adanya perbedaan ideology serta pandangan partai dalam menempatkan kader penelitian ini akan membandingkan aspek-aspek ditinjau dari pola rekrutmen partai, apakah pola terbuka atau tertutup, serta bagaimana kesiapan partai politik memilih, menentukan dan menyiapkan kadernya untuk memasuki arena politik melalui parpol. Melihat fenomena pemilu 2019, PDI-P memiliki komitmen serta pandangan untuk merepresentasikan perempuan dalam partai politik, hal ini terlihat dari adanya berbagai strategi masif yang dilakukan PDI-P guna merekrut kader perempuan, salah satunya melalui wadah Komunitas Juang yang baru berdiri sekitar Tahun 2018, selain itu dalam proses pemilu 2019, PDI-P telah menyiapkan kader perempuannya jauh-jauh hari sebelum perhelatan ajang pemilu, sehingga terlihat banyak kader perempuan bersinggungan dengan masyarakat, baik melalui tim sukses, media social dan lainnya untuk menarik massa. Sementara PKB masih bersinggungan dengan isu dogmatis yang melekat di masyarakat mengenai tabuhnya perempuan dalam politik, sehingga terlihat bahwa dalam pemilu 2019, calon legislative perempuan cenderung kurang gencar mengkampanyekan dirinya sebagai figure calon legislative perempuan.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan pandangan peneliti terhadap kasus ini adalah adanya kekuatan budaya patriarki masih kuat berkembang di masyarakat sehingga mengakibatkan ketidakpercayaan diri perempuan memasuki ranah politik, selain itu persoalan agama juga melatarbelakangi minimnya keterlibatan perempuan dalam arena politik, mengingat Kabupaten Demak merupakan kota yang kental dengan budaya religiusnya, kewajiban perempuan untuk patuh terhadap suami menjadi alasan terbatasnya gerak perempuan diluar. Selain itu temuan lain pada proses rekrutmen yang dilakukan oleh PDIP dan PKB memiliki perbedaan dimana PKB mengutamakan calon yang memiliki nama besar di daerahnya sedangkan PDIP menominasikan calon pilihannya yang memiliki cukup sumber dana. Berdasarkan masalah tersebut peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai rekrutmen yang dilakukan serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola rekrutmen perempuan dalam PDI Perjuangan dan PKB di Kabupaten Demak beserta kendala-kendala nya ?
2. Bagaimana perbandingan rekrutmen politik perempuan PDI Perjuangan dan PKB di Kabupaten Demak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pola rekrutmen politik perempuan di dalam PDI Perjuangan dan PKB di Kabupaten Demak serta mengetahui kendala yang dihadapi partai politik dalam melakukan proses rekrutmen politik bagi perempuan.
2. Untuk mengetahui perbandingan pola rekrutmen terhadap perempuan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dan PKB Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam dunia pendidikan, khususnya yang mempelajari studi politik mengenai rekrutmen perempuan dalam partai politik serta dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan prasyarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

b. Bagi Partai Politik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi partai politik untuk mengkaji mengenai pola rekrutmen yang telah dilakukan serta

diharapkan meningkatkan kapasitas dan fungsinya dalam merekrut kader perempuan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai proses rekrutmen perempuan dalam partai politik sehingga diharapkan dapat menambah partisipasi masyarakat khususnya perempuan ikut serta dalam proses politik.

E. Tinjauan Pustaka

Studi mengenai rekrutmen perempuan dalam partai politik bukan lagi merupakan studi baru, banyak peneliti dan akademisi yang mengkaji mengenai rekrutmen perempuan dalam partai politik. Untuk menguatkan serta membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu lainnya, peneliti meninjau beberapa kajian terdahulu sebagai berikut :

Pertama, penelitian oleh Indah Dwi Wulandari di Jakarta pada tahun 2014 dengan judul “*PEREMPUAN DAN PARTAI POLITIK (Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan dalam Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Tangerang Selatan Tahun 2014)*” penelitian deskriptif ini menjelaskan mekanisme yang dilakukn partai Golkar dalam merekrut kader perempuan serta menggambarkan alasan absennya perempuan dalam legislative Kota Tangerang Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rekrutmen politik terhadap perempuan yang telah dilakukan Partai Golkar Kota Tangerang Selatan bersifat semi-terbuka, mengutamakan basis internal partai, dan masih kental dengan hubungan kekerabatan. Namun Partai Golkar tidak menutup akses bagi orang luar untuk bergabung dengan partai sesuai dengan kemampuannya. Sementara itu, Penyebab absennya calon legislatif perempuan dari Partai Golkar disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah budaya patriarki yang masih kuat di dalam internal partai serta marketing politik yang dilakukan kader perempuan kurang masif (Wulandari, 2019).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muharni (2018) dalam penelitiannya di Riau dengan judul “*KADERISASI PEREMPUAN PARTAI POLITIK (Studi Pada Partai Golkar Dan PKB Provinsi Riau Tahun 2009-2014)*” penelitian

yang mengurai mengenai upaya partai politik dalam meningkatkan representasi perempuan dalam legislative ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan proses kaderisasi yang signifikan antara Partai Golkar dan PKB, sistem rekrutmen yang diterapkan oleh kedua partai menggunakan sistem terbuka serta mengacu pada ketentuan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bahkan peraturan ini dipertegas di dalam AD/ART kedua partai. Sementara itu Partai Golkar lebih mengutamakan kader perempuan yang berasal dari internal partai baik pengurus maupun sayap partai yakni KPPG, penilaian kader juga dilakukan dengan sistem skoring, sementara di partai PKB perekrutan calon diluar kader yang memiliki kemampuan finansial dan basis massa masih terjadi, rendahnya minat kader untuk mencalonkan diri membuat partai harus merekrut kader perempuan dari luar partai. Selain itu terkait dengan proses pembinaan serta pengembangan, dalam kurun waktu antara 2009-2014 di kedua partai menunjukkan bahwa Partai Golkar lebih intens dalam mengoptimalkan sumber daya manusia nya melalui pembinaan sebanyak empat kali berbeda dengan PKB yang hanya melakukan kegiatan pembinaan selama dua kali. Dalam pelaksanaan kaderisasi terdapat beberapa kendala yang dihadapi terutama dari segi pendanaan dan juga instrumen pengkaderan. Kaderisasi yang dilaksanakan oleh PKB terbilang pasif karena tidak adanya gedung dan minimnya sumber keuangan partai untuk melakukan kegiatan kaderisasi menjadi faktor utama, selain itu sistem data base sumber daya kader yang tidak diperbaharui secara berkala membuat partai kesulitan menentukan kader-kader potensialnya (Muharni, 2018).

Ketiga, penelitian oleh Diah Anggraini (2017) yang berjudul “*Rekrutmen Kandidat Perempuan Oleh Partai Politik (Studi Kasus: Pilkada Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017)*” penelitian ini fokus mengkaji mengenai rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai PKB dan PAN yang berhasil mengusung kader perempuan dan memenangkan pilkada 3 kali berturut-turut. Hasil dari penelitian ini adalah keberhasilan partai politik dalam melakukan fungsinya yaitu rekrutmen politik yang memainkan andil yang besar atas kemenangan pasangan Masnah Busro-Bambang Bayu Suseno. Dalam melakukan proses rekrutmen, partai politik melakukan skema secara bertahap mulai dari administrasi, penyaringan hingga seleksi untuk memilih kader yang potensial. Pada proses perekrutan dan pemilihan, PAN dan PKB tidak

menjadikan faktor gender sebagai penghalang untuk mencalonkan diri bagi semua kader. memainkan andil yang besar atas kemenangan pasangan Masnah Busro-Bambang Bayu Suseno. Dalam melakukan proses rekrutmen, partai politik melakukan skema secara bertahap mulai dari administrasi, penyaringan hingga seleksi untuk memilih kader yang memiliki potensial. Pada proses perekrutan dan pemilihan, PAN dan PKB tidak menjadikan faktor gender sebagai penghalang untuk mencalonkan diri bagi semua kader. Kedua partai saling berkoalisi untuk fokus menguatkan strategi kampanye serta kemampuan pasangan bupati sehingga memberikan kemenangana dengan mengalahkan pasangan calon laki-laki lainnya (D. Anggraini, 2019).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Cholida Eka Anggraini (2014) dengan judul *“Analisis Komparatif Rekrutmen Perempuan Dalam Partai Politik Studi Kasus Pdi dan Pks Kota Surakarta”* membahas mengenai pola komunikasi yang dilakukan partai politik dalam melakukan perekrutan terhadap kader perempuan melalui studi komprasi antara Partai PDIP dan PKS Kota Surakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua strategi komunikasi yang dilakukan oleh kedua partai politik yaitu internal dan eksternal, strategi internal partai melakukan rapat inti sebagai putusan keatas dan menyalurkan informasi tersebut sampai ke struktural partai terbawah. Sementara strategi komunikasi secara eksternal yang dilakukan PDIP ialah melalui program bantuan untuk masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan, sedangkan PKS juga menerapkan program-programa kemasyarakatan seperti senam, pelatihan, bimbingan belajar, pembinaan, dan lain sebagainya. Pada tahap rekrutmen caleg, PDIP memberikan penilaian dan melakukan survei kepada semua calon yang diajukan, caleg akan dipilih melalui pertimbangan anggota internal partai. Sementara PKS mendasarkan mekanisme pemilihan umum internal kader disetiap daerah pemilihan untuk menentukan calon legislatif yang akan diusung. Hal ini diyakini bahwa setiap kader pada daerah pemilihan telah mengetahui dengan baik kinerja kader lainnya yang berada dalam satu wilayah mekanisme pemilihan umum internal kader disetiap daerah pemilihan untuk menentukan calon legislatif yang akan diusung. Hal ini diyakini bahwa setiap

kader pada daerah pemilihan telah mengetahui dengan baik kinerja kader lainnya yang berada dalam satu wilayah (C. E. Anggraini et al., 2014).

Kelima, penelitian selanjutnya oleh Nurul Fadliyah (2016) dalam penelitiannya di Makassar yang berjudul “*Affirmative Action Partai Dalam Pencalonan Politisi Perempuan Anggota DPRD Kota Makassar (Studi Komparasi Partai PPP Dan PDIP Kota Makassar)*” studi membahas mengenai kebijakan afirmatif 30% kuota bagi perempuan berpartisipasi dalam partai politik. Tercatat hanya ada satu perempuan yang berhasil mencapai posisi di DPRD Kota Makassar pada periode Tahun 2014, peneliti meneliti substansi affirmative action di dalam partai politik. Hasil dari penelitian komparasi ini adalah kedua partai politik sudah mengupayakan tercapainya kuota bagi perempuan dengan melakukan perekrutan, pembinaan dan kegiatan partisipatif lainnya, hal ini dibuktikan dengan jumlah kader perempuan yang maju dalam legislative sebanyak 17 orang dari Partai Persatuan Pembangunan dan 14 orang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan hanya satu orang yang lolos menduduki jabatan di DPRD Kota Makassar. Dalam implementasinya partai politik menghadapi beberapa kendala yang berakibat pada proses pemilihan politisi perempuan diantaranya adalah keterbatasan waktu dan budaya, perempuan memiliki waktu yang relative sulit karena harus membagi waktu dengan kepentingan keluarga, politik ataupun lembaga selain itu budaya yang melekat di masyarakat mengenai tabunya kepemimpinan seorang perempuan menjadi salah satu dogma yang terbangun diantara masyarakat sehingga menyulitkan perempuan untuk mendapatkan kepercayaan dari public, kendala lain yang dihadapi perempuan adalah persoalan finansial, dalam hal ini banyak dari politisi perempuan tidak mau mengeluarkan banyak uang untuk jabatan (Fadliyah, 2016).

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Harbert Kay Shan Zebua (2017) di Bandung dengan judul “*Rekrutmen dan Kaderisasi Perempuan Dalam Partai Politik (Studi Kasus DPC/DPD Partai Politik Kota Bandung)*” penelitian ini memaparkan mengenai sistem kaderisasi yang dilakukan oleh lima partai politik di Bandung, hal ini lantaran rendahnya politisi perempuan yang menduduki jabatan di legislative yaitu hanya sebanyak 3 orang dari 50 anggota DPRD terpilih pada periode 2014-2019 yang terdiri dari fraksi PKS, PDIP dan Golkar sementara partai lain belum

mampu meraih kursi di DPRD, padahal pada periode sebelumnya sebanyak 9 kader perempuan berhasil menduduki jabatan legislative. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kelima partai yang menjadi fokus penelitian yaitu PDIP, PKS, Gerindra, Golkar dan Demokrat telah menjalankan fungsinya dalam proses rekrutmen politik sesuai dengan UU yang berlaku. Kader yang direkrut umumnya telah berusia 17 tahun serta berafiliasi dengan partai tersebut, dalam proses merekrut kader perempuan kelima partai politik melakukan berbagai cara baik formal maupun non-formal diantaranya adalah secara personal seperti hubungan dengan kerabat, melakukan kegiatan-kegiatan langsung ke masyarakat, seminar, pengajian dan kegiatan lainnya. Pada akhirnya peneliti menyimpulkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan dalam partai politik dikarenakan faktor eksternal dan non-politik yaitu social dan budaya, dari segi social ranah domestic masih melekat pada perempuan serta budaya patriarki memberikan mindset terhadap keterbatasan perempuan dalam dunia politik (Zebua, 2017).

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Tania Aryadna Prasetya yang berjudul *“Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Partai Politik Pada Pemilu 2019 (Studi Kasus partai Golkar Surabaya)”* penelitian yang mencari tahu bagaimana partai politik melakukan rekrutmen terhadap perempuan serta hal-hal yang dipertimbangkan dalam memilih calon tersebut memaparkan bahwa partai Golkar Surabaya dalam melakukan proses rekrutmen melalui tiga tahapan yakni tahap sertifikasi, nominasi dan pemilihan. Pola rekrutmen yang dilakukan adalah rekrutmen terbuka, yang mana dalam proses ini dilakukan secara terbuka, seseorang yang memiliki afiliasi dalam partai Golkar diperkenankan untuk mendaftar menjadi anggota partai, setelah melalui proses pendaftaran, partai akan memilih serta memilih kriteria calon yang sesuai dengan kemampuannya. Selain itu partai Golkar juga melibatkan organisasi-organisasi sayap partai dalam merekrut kader perempuannya (Prasetya, 2019).

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Syamsir dan Suryanef di Kota Padang dengan judul *“Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik di Kota Padang”* memaparkan bahwa proses rekrutmen terhadap perempuan yang dilakukan oleh

partai politik di Kota Padang bervariasi tergantung dengan ketentuan dalam internal partai, beberapa partai mengupayakan secara penuh keterwakilan perempuan 30% melalui berbagai skema serta program, ada juga partai politik yang masih terindikasi tidak merekrut kader perempuan dikarenakan dogma seperti potensi perempuan dalam kontestasi politik sangat minim, sehingga dalam beberapa partai politik masih mengunggulkan untuk mengusung kader laki-laki, sementara perekrutan perempuan hanya sebagai pemenuhan administrasi yang tertera dalam Undang-Undang mengenai ketentuan-ketentuan pembentukan partai politik. Selain itu, penyebab minimnya keterwakilan perempuan dalam partai politik di Kota Padang juga disebabkan karena persoalan internal partai, dimana arus kepemimpinan partai sering kali belum memiliki kebijakan yang jelas mengenai keharusan keterwakilan perempuan seperti apa yang tertuang dalam Undang-Undang mengenai Partai Politik serta keterbatasan waktu dalam menentukan kader perempuan juga menjadi salah satu kendala yang dialami partai (Syamsir & Suryanef, 2005).

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Madin Silalahi, dkk yang berjudul *“Pola Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Partai Politik Perindo Pada Pemilihan Umum 2019 Di Sumatera Utara”* menggunakan analisis kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses rekrutmen perempuan yang dilakukan oleh Partai Perindo untuk diusung maju dalam legislative. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen dilakukan secara terbuka yakni melalui penyebaran spanduk, baliho serta situs website resmi Partai Perindo. Dilanjutkan dengan proses seleksi melalui tes tulis dan wawancara yang akan dilanjutkan dengan penyusunan daftar calon sementara. Setelah melalui proses tersebut bakal calon akan didaftarkan ke KPU dan menunggu pengumuman resmi daftar calon tetap. Proses ini tidak disertai unsur diskriminasi bagi pendaftar perempuan, namun Partai Perindo memiliki kendala karena sulit-nya menemukan kader perempuan yang bersedia untuk mencalonkan diri (Silalahi et al., 2019).

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Ilham Anshari dan Dina Fadhillah di Jakarta dengan judul *“Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Kasus: Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kota Bekasi Dalam Menetapkan Calon Anggota Legislatif Dpr Ri Tahun 2014-2019)”* penelitian yang bertujuan untuk

mengetahui pola rekrutmen serta model *secret garden* atau ranah pribadi dalam hal ini adalah proses rekrutmen yang dilakukan partai politik hanya melibatkan internal partai, dilakukan secara rahasia serta melalui proses pelobian, selain itu penelitian ini juga menyoroti mengenai sejauh mana keputusan partai politik merekrut kader perempuan dalam pileg 2014. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partai PAN masih bergantung pada keputusan pusat, misalnya saja dalam menentukan calon, DPP menjadi dewan pertimbangan sementara DPW, DPD, DPC dan ranting memiliki peranan yang besar. Cara partai PAN memilih kandidat didasarkan pada calon yang sudah dikenal masyarakat dan putra daerah. Daerah dipilih untuk menjadi pusat dalam pemilihan kandidat, karena pimpinan pusat merasa perlu untuk melibatkan pimpinan partai di daerah sebagai tingkatan organisasi yang paling dekat dengan masyarakat dan paling mengetahui kebutuhan dan kondisi masyarakat di daerah (Anshori & Fadliyah, 2019).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistic untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam konteks tertentu dengan prosedur analisis yang tidak menggunakan statistika ataupun kuantifikasi lainnya serta diteliti secara rinci, holistic dan rumit. Dengan menggunakan metode kualitatif, menurut Lofland dalam buku Teori dan Metode dalam Ilmu Politik (2011) dalam menggunakan metode kualitatif peneliti akan menulis catatan lapangan secara mendalam dan percakapan menjadi hal yang tidak terpisahkan dari catatan lapangan, percakapan tersebut merupakan bahan mentah yang akan dianalisis dan diinterpretasikan dalam laporan penelitian.

Bogdan dan Taylor dalam buku Moleong (2017) mendefinisikan metode kualitatif sebagai model penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Sejalan dengan pemikiran tersebut Jane Richie dalam buku Moleong (2017) mendefinisikan penelitian

kualitatif sebagai upaya untuk menyajikan dunia social, dan perspektif-nya di dalam dunia yang dikemukakan terhadap peranan penting dari apa yang seharusnya diteliti yaitu konsep, perilaku, persepsi dan persoalan tentang manusia. Metode kualitatif sebagai model penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.

Field Research atau penelitian lapangan digunakan dalam penelitian ini. *Field Research* merupakan Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan (Moleong, Lexy J, 2017). Adapun model penelitian ini menggunakan model multi case yakni penggunaan dua studi kasus atau lebih memungkinkan penarikan generalisasi untuk lingkup yang lebih luas. Hal ini juga memungkinkan Anda mengidentifikasi perbedaan corak khusus, dengan menyelidiki persamaan dan perbedaan antar kasus. PDI Perjuangan dan PKB merupakan dua case yang diperbandingkan.

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus, yakni penelitian dilakukan dengan melakukan pemeriksaan konteks secara mendalam. Menurut Creswell (dalam buku Wahyuningsih, 2013) pendekatan studi kasus sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu. Selanjutnya Creswell mengungkapkan bahwa apabila kita akan memilih studi untuk suatu kasus, dapat dipilih dari beberapa program studi atau sebuah program studi dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang meliputi: observasi, wawancara, materi audio-visual, dokumentasi dan laporan. Konteks kasus dapat “mensituasikan” kasus di dalam settingnya yang terdiri dari setting fisik maupun setting sosial, sejarah atau setting ekonomi.

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dokumen. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo serta dokumen resmi

lainnya dan akan disertakan tabel sebagai bahan perbandingan (S. Anggito, 2018).

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder (Wahyu, 2010) :

- a. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh atau didapatkan secara langsung oleh peneliti tanpa perantara pada saat proses penggalan data. Dalam penelitian ini sumber data langsung berupa: data hasil observasi dan wawancara.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, artinya data ini sudah diolah oleh sumber lain dan kemudian digunakan peneliti sebagai tambahan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber data sekunder, diantaranya adalah buku, jurnal, publikasi pemerintah, AD/ART Partai, serta sumber lain-nya sesuai dengan topik yang sedang dikaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sementara teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi partisipan untuk mengamati, memahami serta merasakan secara langsung perilaku politik pada konteks tertentu di institusi dan kelompok yang menjadi objek penelitian. Nasution dalam buku Sugiyono (2015) menyatakan bahwa observasi adalah proses melihat fakta mengenai dunia kenyataan. Sejalan dengan itu Marshall dalam buku Sugiyono (2015) menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Sementara menurut Patton (dalam buku Sugiyono, 2015), observasi bermanfaat sebagai berikut :

1. Mampu memahami konteks yang sedang dikaji dalam situasi social, jadi akan memperoleh pandangan secara holistic atau menyeluruh.

2. Memperoleh pengalaman secara langsung yang memungkinkan peneliti mendapatkan sebuah penemuan baru atau *discovery* melalui objek yang diteliti.
3. Dengan observasi, peneliti dapat melihat peristiwa yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu. melalui observasi, peneliti dapat melihat peristiwa yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu.
4. Peneliti dapat menemukan hal-hal yang kemungkinan tidak akan diungkapkan oleh responden karena bersifat sensitive dan dalam melakukan observasi peneliti juga mendapatkan kesan karena merasakan situasi social secara langsung (Sugiyono, 2015).

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi terhadap partai PDIP dan PKB di Kabupaten Demak diantaranya adalah melihat jumlah perempuan di dalam partai, mekanisme dan proses rekrutmen yang dilakukan, serta melihat hubungan partai dengan organisasi lain yang memiliki keterkaitan dalam perekrutan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara peneliti dan responden, mencari informasi dengan cara bertanya secara langsung dan jawaban responden akan menjadi data mentah. Esterberg (dalam buku A. Anggito & Setiawan, 2018) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan antara dua orang atau lebih untuk berbagi informasi, ide serta gagasannya melalui tanya jawab atau perbincangan sehingga dapat dikonstruksikan maknanya dalam suatu topik yang sedang dikaji. Sementara Susan Stainback dalam buku yang sama menyatakan bahwa melalui wawancara, peneliti akan mendapatkan data yang mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak dapat ditemui melalui observasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua model yaitu wawancara secara terstruktur dan

tidak terstruktur serta menggunakan alat-alat kelengkapan diantaranya adalah buku catatan, tape recorder dan kamera (Sugiyono, 2015).

Dalam penelitian ini terdapat 8 responden yang akan diwawancarai yang terdiri dari pengurus DPC PKB, pengurus DPC PDI Perjuangan, anggota masing-masing parpol, organisasi sayap partai serta masyarakat yang memiliki afiliasi terhadap partai PKB dan PDI Perjuangan Kabupaten Demak.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, diantaranya berbentuk tulisan., gambar, naskah resmi, atau karya-karya monumental dari seseorang. Bogdan (dalam buku Harison, 2009) menyatakan bahwa hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel jika didukung oleh sejarah-sejarah serta foto atau karya tulis dan seni yang telah ada. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, diantaranya berbentuk tulisan., gambar, naskah resmi, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen atau naskah-naskah dari partai politik, KPU dan dokumen resmi pemerintah RI yang memiliki kesesuaian dengan kajian yang sedang diteliti.

4. Teknik Analisis data

Bogdam (dalam buku Harison, 2009) menyatakan bahwa teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan serta sumber bahan lain, sehingga mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Sejalan dengan pendapat tersebut Patton (dalam buku Sugiyono, 2015) mendefinisikan analisis data sebagai proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles and Huberman yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Hasil dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan kemudian dikumpulkan, bersamaan dengan data-data yang bersifat sekunder atau berasal dari dokumen maupun naskah yang berkaitan.

b. Reduksi Data

Setelah data terkumpul dilakukan reduksi data, yaitu proses merangkum, memilih dan memilah data yang pokok. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran secara jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dalam hal ini data yang sudah terkumpul akan dikategorikan memilih temuan yang sesuai dan membuang yang tidak diperlukan.

c. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya yang dilakukan dalam menganalisis data adalah menyajikan data yang telah terkumpul melalui uraian singkat, bagan dan teks. Dalam hal ini data yang sudah terkumpul dianalisis secara mendalam.

d. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan adalah deskripsi atau gambaran tentang suatu obyek yang sebelumnya masih samar menjadi jelas dan dalam menyimpulkan penelitian ini didukung dengan data yang valid sehingga menjadi kesimpulan yang kredibel (Moleong. Lexy J, 2017).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini mengacu pada buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun 2019/2020 guna memperoleh bentuk penulisan yang sistematis. Maka dari itu, rancangan dalam penulisan penelitian ini akan dikelompokkan kedalam enam bab, masing-masing bab terdiri beberapa sub-bab, dengan rincian penulisan sebagai berikut :

BAB I berisi tentang latar belakang penelitian mengenai rekrutmen perempuan dalam partai politik melalui studi komparasi partai PDIP dan PKB di Kabupaten Demak. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Demak, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan mengenai pola rekrutmen perempuan serta kendala yang dihadapi dan perbandingan rekrutmen di kedua partai. Dilanjutkan dengan penulisan tujuan dan manfaat penelitian yang disertai dengan kajian terdahulu mengenai rekrutmen perempuan dalam partai politik dan di sertakan metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini.

BAB II berisi pemaparan mengenai kerangka teoritis yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji topik yang sedang diteliti. Teori yang digunakan peneliti adalah rekrutmen politik yang meliputi proses mekanismenya serta implementasi yang dilakukan partai politik dan diperkuat dengan legislasi affirmative action sebagai landasan keharusan perempuan ikut andil dalam politik.

BAB III adalah gambaran umum mengenai obyek umum penelitian, dalam bab ini akan dipaparkan mengenai geografis Kabupaten Demak, sejarah maupun visi misi partai PDIP dan PKB Kabupaten Demak serta gambaran mengenai rekrutmen politik perempuan di Kabupaten Demak, khususnya dalam dua partai tersebut.

BAB IV berisi analisis Rekrutmen politik perempuan di PDIP dan PKB Kabupaten Demak. Akan dijelaskan mengenai proses rekrutmen yang dilakukan mulai dari tahap pemilihan, penyaringan, penunjukkan, dan pembinaan serta kendala-kendala yang dihadapi

BAB V akan membahas mengenai perbandingan rekrutmen terhadap perempuan yang dilakukan oleh kedua partai dan disertakan jumlah perempuan masing-masing baik anggota, pengurus maupun pejabat public. Perbandingan meliputi pola, sistem, proses serta jumlah perempuan yang disajikan dalam bentuk tabel.

BAB VI berisi penutup serta kesimpulan dari penelitian serta saran yang diberikan oleh peneliti.

Daftar Pustaka

BAB II

REKRUTMEN POLITIK SEBAGAI KERANGKA TEORITIK

A. Definisi Konseptual

1. Perempuan

Berdasarkan teori nature perempuan memiliki fisik yang berbeda dari laki-laki, misalnya perbedaan jenis kelamin, dada, perempuan melahirkan anak dan lainnya. sementara secara psikologis laki-laki memiliki sifat rasional, aktif, agresif dan perempuan emosional, pasif dan submisif, oleh karena itu di dalam masyarakat orang percaya bahwa perempuan seharusnya hidup di lingkungan rumah tangga secara alamiah sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonominya perempuan bergantung pada laki-laki, hal tersebut menciptakan citra patriarki yang berkembang dalam masyarakat. Seiring berkembangnya waktu, berangkat dari keterbatasan-keterbatasan tersebut muncul beberapa kelompok sebagai gerakan Feminis di Eropa yang memperjuangkan tuntutan mereka untuk memiliki hak yang sama seperti laki-laki, diantaranya adalah hak untuk bekerja dan terlibat dalam sistem politik (Budiman, 1985).

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan perempuan ialah mereka yang ikut berpartisipasi dalam agenda politik melalui saluran partai politik atau mereka yang tertarik bergabung dengan partai politik. Perempuan yang diteliti merupakan mereka yang berasal dari internal partai politik, baik anggota, pengurus, maupun perempuan yang berasal dari sayap partai serta mereka yang mempunyai keinginan bergabung dalam partai tersebut atau perempuan yang terlibat dengan partai diluar structural partai.

2. Partai Politik

Partai politik muncul berawal dari anggapan bahwa dengan adanya wadah organisasi, seseorang maupun kelompok dapat berkumpul menyatukan fikiran-fikiran yang serupa dan hal tersebut dapat di tuangkan dalam organisasi-nya (partai politik) sehingga memiliki pengaruh besar terhadap keputusan politik. Secara umum partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang

anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dan mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dengan cara konstitusional. Sejalan dengan pengertian tersebut, Carl J Friedrich (dalam Miriam Budiarjo, 2008) mengemukakan bahwa partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat riil dan materiil.

Sementara menurut Sigmund Neuman (dalam Miriam Budiarjo, 2008), partai politik merupakan organisasi besar yang menjadi perantara yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideology social dengan lembaga pemerintahan yang resmi. Dalam hal ini pengisian jabatan dapat diperoleh melalui pemilu, sesuai dengan pernyataan Giovanni Sartori bahwa partai politik menjadi tempat sekelompok elit politik yang tertarik dengan pemerintahan sehingga menempatkan calon-calonnya melalui proses pemilihan umum untuk menduduki jabatan-jabatan public. Partai politik menurut Miriam Budiarjo (2008) mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

a. Komunikasi politik

Sebagai sarana komunikasi politik, parpol bertugas mengagregasi dan mengartikulasi pendapat atau aspirasi dari rakyat kemudian disampaikan kepada pemangku kebijakan.

b. Sosialisasi politik

Sosialisasi politik merupakan proses penyampaian informasi mengenai isu politik kepada khalayak.

c. Rekrutmen politik

Merupakan proses pemilihan anggota di dalam parpol.

d. Pengatur konflik

Secara ringkas parpol dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahannya.

3. Rekrutmen

Rekrutmen merupakan suatu proses mencari calon atau kandidat untuk memenuhi SDM dalam suatu organisasi atau perusahaan. Pada proses rekrutmen dilakukan tahap seleksi sebagai langkah menentukan kandidat yang tepat. Rekrutmen politik adalah proses seleksi dan pemilihan seseorang atau sekelompok actor politik untuk menjalankan peranan politik di dalam suatu partai politik (Setiadi M Elly, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus terhadap pola-pola rekrutmen yang dilakukan oleh dua partai politik di Kabupaten Demak yaitu PDI Perjuangan dan PKB. Rekrutmen yang dimaksud adalah proses penunjukkan, pemilihan, penyaringan partai politik dalam merekrut anggota partai terutama perempuan.

4. Studi Komparasi

Penelitian ini menggunakan analisis komparatif, menurut Glaser dan Strauss (dalam buku Mertha, 2020) analisis komparatif adalah metode umum, metode yang dikembangkan oleh Weber, Durkheim dan Mannheim untuk mengetahui apakah antara dua variabel ada perbedaan dalam suatu aspek yang diteliti, penelitian dilakukan secara alami, dengan mengumpulkan data dari instrument terkait. Kemudian hasilnya dianalisis untuk mencari perbedaan variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini mengkaji dua kelompok partai politik yaitu partai PDI Perjuangan dan PKB Kabupaten Demak.

B. Gender dan Politik

Gender dan seks merupakan dua hal yang berbeda, gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi social budaya, gender menjadi istilah simpul untuk menyebut feminisme dan maskulin yang dibentuk secara social yang berbeda-beda dari satu kurun waktu ke kurun waktu lainnya dan berbeda menurut tempatnya. Perilaku gender tercipta melalui proses pembelajaran, bukan sesuatu yang berasal dari dalam diri sendiri secara alamiah atau takdir yang tidak bisa dipengaruhi oleh manusia. Sementara seks menyoroti aspek biologis seseorang diantaranya adalah perbedaan komposisi kimia dan hormone dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan lain sebagainya. Seks merupakan pembedaan jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, telah ditentukan oleh Tuhan sehingga menjadi suatu kodrat atau takdir yang secara hierarki tidak dapat diubah.

Wacana gender mulai ramai dibicarakan pada awal tahun 1977 ketika sekelompok feminis di London tidak lagi memakai isu-isu lama seperti *patriarchal* atau *sexist*, tetapi menggantinya dengan wacana *gender*., terdapat dua kelompok dalam konsep mengenai kesetaraan gender. Kelompok pertama menganggap konsep gender adalah konstruksi social sehingga perbedaan jenis kelamin tidak perlu menjadikan perbedaan peran dan perilaku gender dalam tatanan social. Sedangkan kelompok kedua menganggap perbedaan jenis kelamin akan selalu berdampak terhadap konstruksi konsep gender dalam kehidupan social sehingga akan selalu ada jenis-jenis pekerjaan yang memiliki *stereotip* gender. Diskursus mengenai hal tersebut akan selalu ada meskipun laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama termasuk politik, namun hal tersebut seringkali tidak seimbang dengan kesempatan yang ada sehingga mengakibatkan ketimpangan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Diantara faktor rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik adalah sebagai berikut :

1. Nilai social budaya yang lebih mengutamakan laki-laki.
2. Pembagian kerja berdasarkan gender dalam masyarakat agraris-tradisional.
3. Citra perempuan sebagai kaum yang lemah lembut.
4. Ajaran agama yang ditafsirkan secara sempit dan parsial.
5. Kurangnya *political will* pemerintah
6. Kekurangan kualitas individu perempuan dan kaderisasi politik (Sastriani, 2009).

Partai politik merupakan wadah untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan berbangsa. Partai politik juga diberikan kepercayaan melalui *affirmative action* yaitu menguatnya pemberdayaan politik perempuan dengan diberlakukannya kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30 %, namun partisipasi perempuan dalam politik tidak akan berjalan apabila budaya patriarki di dalam partai politik masih mengakar, kuota yang diberikan merupakan wujud belas kasih bukan kemauan politik. Di dalam Al-Qur'an menggambarkan beberapa ayat tentang perempuan yang menyangkut berbagai konteks diantaranya adalah surat an-Nisa' ayat 32 yang menunjukkan hak-hak perempuan sebagai berikut :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : “ Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Berdasarkan ayat di atas hak politik menurut ahli hukum adalah hak yang dimiliki dan digunakan oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota dalam organisasi politik seperti hak memilih (dan dipilih,) mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara. Selain itu, hak politik bisa diartikan sebagai hak-hak dimana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelola negara. Ada yang berpendapat bahwa Islam tidak menetapkan persamaan antara perempuan dan laki-laki, khususnya dalam memperoleh hak-hak politik (Shihab, 2002).

C. Rekrutmen politik sebagai kerangka teoritik

Ilmuwan politik Robert Hucksom (dalam buku Miriam Budiarjo, 2008) memaknai partai politik secara pragmatis yaitu sebuah kelompok otonom yang terdiri dari warga negara, mempunyai tujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing di pemilihan umum dengan harapan untuk mendapatkan kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan public dan organisasi pemerintahan. Di dalam negara demokrasi, partai politik menjadi alat yang menjembatani kepentingan antara rakyat dan pemerintah-nya. Untuk memainkan peran dalam proses konsolidasi tersebut, partai politik harus mengisi dan menempatkan actor-aktor yang cukup serta cakap di dalam institusi partainya, proses ini dapat dilakukan melalui mekanisme perekrutan anggota partai dengan cara menyeleksi, memilih anggotanya serta anggota masyarakat lainnya untuk menduduki dan melaksanakan peranan politik tertentu baik di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan.

Hal tersebut berkaitan erat dengan salah satu fungsi partai politik yaitu rekrutmen politik. Partai politik jelas merupakan sarana yang paling penting dalam kebanyakan sistem politik untuk merekrut sebagian besar pemegang jabatan politik. Zarkasih Nur dalam buku *Sosiologi Politik* (2011), mengatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik, dimana parpol memiliki kewajiban untuk melakukan seleksi dan rekrutmen dalam rangka mengisi posisi dan jabatan politik tertentu. Dengan adanya rekrutmen maka dimungkinkan terjadinya rotasi dan mobilitas politik, jika sistem politik tanpa rotasi dan mobilitas, maka akan muncul diktatorisme dan stagnasi politik dalam sistem pemerintahan.

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara, karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik melalui lembaga politik yang ada. Dalam hal ini, tercapainya tidaknya suatu sistem politik sangat tergantung pada kualitas rekrutmen politik yang dapat dilihat dari prosesnya, apakah menghasilkan orang-orang yang berkualitas, mendudukannya dalam jabatan yang sesuai ataupun tidak sangatlah bergantung pada pola-pola ataupun mekanisme rekrutmen yang digunakan. Terdapat tiga pertimbangan dalam proses rekrutmen politik. Pertama, rekrutmen politik merupakan indikator yang sensitif dalam melihat nilai-nilai dan distribusi pengaruh politik dalam sebuah masyarakat politik. Kedua, pola-pola rekrutmen politik merefleksikan sekaligus mempengaruhi masyarakat. Ketiga, pola tersebut juga merupakan indikator untuk melihat pembangunan dan perubahan dalam sebuah masyarakat politik.

Selanjutnya Pasal 22 E ayat 3 UUD 1945 mempertegas fungsi partai politik sebagai rekrutmen politik bahwa “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”. Sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik berkaitan erat dengan persoalan seleksi kepemimpinan, baik untuk kepentingan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang memiliki cangkupan lebih luas. Untuk kepentingan internal, partai politik butuh kader-kader yang berkualitas, karena dengan kualitas kader yang dimiliki akan mampu membawa partai ke arah yang lebih baik serta memiliki peluang untuk mencalonkan kadernya ke dalam persaingan nasional. Menurut Ranney (dalam Katz & Crotty, 2014) seleksi merupakan proses

memutuskan nama orang-orang yang secara hokum layak memegang jabatan electoral sebagai calon atau daftar yang direkomendasikan dan didukung oleh partai yang mengusung. Selain itu, partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak anggotanya dengan mendirikan oraganisasi-organisasi massa yang melibatkan banyak golongan masyarakat misalnya petani, buruh, pemuda dan lain sebagainya.

Dalam melakukan proses rekrutmen, partai politik juga harus memperhatikan keterlibatan perempuan dalam agenda politik, hal ini sesuai dengan aturan perundang-undangan baik dalam pembentukan partai politik maupun pemilihan jabatan public melalui pemilihan umum yang mana partai politik harus menyertakan sebanyak 30% kuota bagi perempuan untuk ikut serta berpolitik. Hal ini merupakan bagian dari artikulasi kepentingan perempuan dalam politik. Menempatkan wakil perempuan dari suatu kelompok ke dalam posisi startegis pemerintahan akan membantu memudahkan masyarakat menyalurkan kepentingannya terutama persoalan perempuan karena muncul figure perempuan yang mewakili sehingga kepentingan mereka dapat diorientasikan dalam kebijakan politik.

Menurut Ramlan Surbakti (2010), rekrutmen politik merupakan proses seleksi, pemilihan atau pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan dan juga untuk mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam politik sebagai anggota partai. Sejalan dengan pernyataan tersebut Elly M Setiadi (2013) dalam bukunya sosiologi politik menyatakan bahwa rekrutmen politik ialah proses seleksi, pemilihan seseorang atau sekelompok actor politik untuk menduduki dan menjalankan kekuasaan politik tertentu baik dalam pemerintahan maupun diluar pemerintahan. Orang yang menjalankan kekuasaan politik tersebut dapat menduduki jabatan politik yang meliputi presiden, perdana menteri, anggota legislatif seperti di Indonesia anggota MPR, DPR, DPD, kepala pemerintahan daerah seperti gubernur, bupati atau walikota, anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota atau menduduki jabatan dalam birokrasi nasional maupun lokal.

Dalam buku *Sosiologi Politik* Kamarudin Sahid (2011), Sigmund Newman menyatakan bahwa rekrutmen politik adalah proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dengan didirikannya organisasi-organisasi massa yang melibatkan banyak golongan seperti buruh, petani, pemuda dan yang lainnya memberikan kesempatan secara luas dalam berpartisipasi. Hal ini dapat menjamin kontinuitas dan kelestarian partai. Konsep rekrutmen tidak hanya terbatas pada anggota partai yang nantinya akan menduduki jabatan politik, namun juga melibatkan perekrutan terhadap seseorang yang akan menduduki jabatan pada lembaga-lembaga lain diantaranya adalah jabatan administratif.

Ilmuwan Rush dan Althoff (2008) mendefinisikan rekrutmen politik sebagai proses yang individu-individunya menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan. Rekrutmen politik merupakan proses dua arah dan memiliki dua sifat yakni formal dan tidak formal. Bersifat dua arah karena individunya memungkinkan mendapatkan kesempatan atau didekati orang lain yang kemudian menjabat jabatan-jabatan tertentu. Dengan cara yang sama perekrutan tersebut bisa menjadi formal jika para individu direkrut secara terbuka melalui cara prosedural atau institusional berupa seleksi atau pemilihan, kemudian proses tersebut menjadi informal jika individunya direkrut secara private atau “dibawah tangan” tanpa melalui cara prosedural.

Berkaitan dengan rekrutmen politik, Huntington (dalam buku Halim, 2018) menyatakan bahwa stabilitas sistem politik sangat bergantung pada kekokohan partai politik yang ada, hal ini tentunya sangat ditentukan oleh kualitas actor yang akan menjabat. Dengan demikian partai politik memiliki fungsi strategis dalam merekrut kader yang berkualitas secara selektif. Fungsi rekrutmen juga merupakan kelanjutan dari proses mencari dan mempertahankan kekuasaan bagi kelangsungan sistem politik. Selanjutnya Damsar (2010), menggambarkan bahwa semua partai politik melakukan proses rekrutmen politik khususnya dalam negara yang sistem politiknya telah mapan seperti negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara melalui proses dan mekanisme terpola. Sehingga seseorang yang telah bergulat lama di dalam partai politik, akan terlihat jenjang karirnya dalam politik. Adapun di Indonesia, proses

rekrutmen politik dilakukan oleh kebanyakan partai hanya pada saat menjelang pemilihan umum, setelah seseorang direkrut pada jabatan tertentu, tidak ada jaminan loyalitas terhadap partai yang merekrut, sehingga fenomena ini bisa menjadi “kutu loncat politik” dimana seseorang dapat mudah berpindah dari satu partai ke partai lainnya yang mencerminkan politik penuh transaksional, intrik dan tanpa roh.

Selanjutnya konsep rekrutmen Norris dan Lovenduski dikutip dalam jurnal yang ditulis oleh Anggoro, dkk (2020) menyatakan bahwa proses rekrutmen terbagi atas dua pola. Pertama, Vertikal (*merit system*) yakni rekrutmen dilakukan secara hierarki struktural dalam organisasi partai, partai berhak menentukan siapa kandidat yang tepat untuk mengisi jabatan politik yang biasanya didasarkan pada jenjang karir organisasi kandidat. Masa keterlibatan seseorang dalam partai politik akan menjadi pertimbangan dalam proses pemilihan. Pola ini juga didasarkan pada kemampuan, keahlian, serta prestasi yang dimiliki oleh calon pejabat. Kedua, Lateral yakni rekrutmen yang dilakukan terbuka secara umum baik internal maupun eksternal partai. Proses rekrutmen dilakukan secara desentralisasi mulai dari pemilihan kandidat potensial di kepengurusan partai tingkat lokal yang terendah, hingga tingkat yang tertinggi.

Sementara Rush dan Althoff (2008) membagi pola rekrutmen politik dalam dua bagian yaitu tertutup dan terbuka. Pola rekrutmen secara tertutup dilakukan oleh elit partai penguasa dalam memilih siapa saja calon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya untuk memimpin, sistem patronase biasanya menjadi pola rekrutmen yang tertutup karena sifatnya yang hanya diketahui segelintir elit penguasa. Sementara pola rekrutmen terbuka memberikan kesempatan masyarakat untuk memilih siapa saja yang bakal menjadi calon pemimpin serta pengumuman hasil pemenang dari kompetisi tersebut dilaksanakan secara terbuka, pola ini biasanya dilakukan melalui ujian-ujian baik tertulis maupun wawancara. Menurut Said Gatara dan Dzulkiah Said (2007), proses rekrutmen politik memiliki tiga sifat sebagai berikut :

1. Top-down

Artinya rekrutmen politik dilakukan berasal dari atas atau dari orang-orang yang menjabat. Sifat ini misalnya adalah penunjukan pribadi dan seleksi pengangkatan.

2. Bottom-up

Proses rekrutmen politik yang berasal dari masyarakat bawah seperti proses mendaftarkan diri dari individu-individu untuk menduduki suatu jabatan. Contohnya seseorang yang secara sengaja melamar kepada parpol untuk maju sebagai kandidat anggota legislatif ataupun calon kepala daerah.

3. Campuran

Proses seleksi tahap pertama dilaksanakan di tingkat atas, kemudian proses selanjutnya diserahkan ke masyarakat bawah. Begitu pula sebaliknya, proses seleksi pertama diselenggarakan ditingkat bawah, kemudian diserahkan kepada keputusan tingkatan paling atas. Praktik seperti ini biasanya terdapat pada proses pemilihan umum legislatif maupun eksekutif.

Setelah partai politik merekrut calon anggota melalui berbagai skema seleksi, proses kaderisasi juga menjadi tahapan penting dalam menentukan calon pejabat yang berkualitas. Kaderisasi dapat dimaknai sebagai proses regenerasi kader partai yang disiapkan untuk menjadi anggota, agensi, pengurus, politisi dengan jenjang yang berbeda-beda. Kaderisasi berhubungan dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh partai politik dalam proses mengelola partai politik. Kaderisasi berhubungan dengan upaya setiap partai untuk mencetak seseorang untuk menjadi kader partai. Fungsi kaderisasi dalam partai politik adalah mempersiapkan calon-calon untuk siap menerima mengelola partainya ke depan. Kaderisasi juga merupakan proses untuk melatih dan mempersiapkan anggota partai dengan berbagai keterampilan, disiplin ilmu dan pengalaman untuk mencapai tujuan partai.

Usaha untuk melakukan perekrutan politik dapat dilakukan melalui berbagai cara. Secara umum rekrutmen dalam partai politik dibagi menjadi tiga kelas yaitu : merekrut anggota, pengurus dan calon pejabat public. Selain memenuhi syarat-syarat dalam peraturan Undang-Undang, masing-masing ditentukan melalui proses penjangkaran, proses penyaringan dan proses penetapan dengan menetapkan kualifikasi yang berbeda-beda. Misalnya dalam merekrut anggota biasanya dilakukan

oleh pengurus harian partai melalui mekanisme yang diatur dalam AD-ART Partai, serta UU yang berlaku diantaranya memiliki kesamaan ideology, cukup umur, tidak memiliki riwayat pidana. Sedangkan pada proses perekrutan pengurus partai, kualifikasi yang ditentukan tentu lebih tinggi daripada anggota, seperti keaktifan dalam partai, memiliki sertifikasi kaderisasi, memiliki kompetensi, dan lain sebagainya. Sementara untuk menempatkan wakil-wakilnya sebagai anggota legislatif yang akan duduk di DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, partai perlu melakukan cara yang transparan dan akuntabel disertai dengan kelengkapan administrasi yang ketat. Secara umum kriteria yang dicalonkan ialah kandidat yang memiliki dukungan massa, finansial serta, kecakapan dalam berpolitik (Haris dkk, 2016).

Dalam implementasinya, rekrutmen politik dapat dibagi menjadi beberapa model menurut para ahli, diantaranya yaitu :

1. Model Barber

Model yang dikembangkan oleh Barber yang dikutip dalam jurnal oleh Soetomo (2004) menyatakan bahwa terdapat 3 dimensi (variabel utama) rekrutmen perempuan di bidang politik yaitu : motivasi, sumber daya dan kesempatan. Dampak mereka adalah kumulatif dan mereka tidak dapat dioperasionalkan secara sendiri-sendiri satu sama lain. Kandidat yang potensial perlu dimotivasi untuk mencari jabatan, tapi berbagai motivasi dapat mengarah pada suatu pencalonan, sumber dayanya dapat terdiri dari aset-aset tersebut seperti fleksibilitas pekerjaan dan kemampuan untuk membuat pengorbanan finansial yang diperlukan. Kemudian kesempatan membandingkan kompatibilitas dengan kriteria pemilihan dari perwakilan perekrutan dan tingkat ketidakpastian mengenai hasil dari pemilihan.

Menurut Browning yang dikutip dalam jurnal (Soetomo, 2004) model Barber ditentukan oleh sindrom motivasional dan pengharapan. Pengharapan diperoleh dalam proses sosialisasi dan mereka menyalurkan motivasinya pada arena politik, tapi tipe dari para pejabat mencari dan perilaku politikus ditentukan oleh motivasi dominannya. Ketika kekuatan motif tinggi dan pencapaian motif rendah, perilaku berorientasi pada

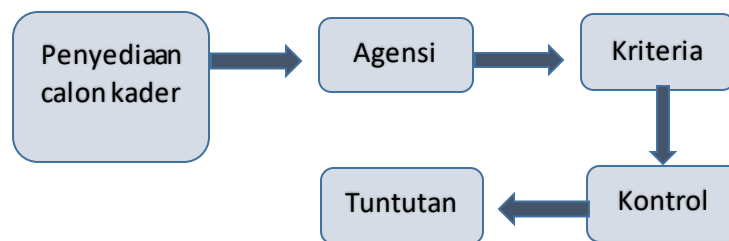
organisasi. Ketika kekuatan dari motivasi berbalik, perilaku disangkutkan dengan kebijakan, dan ketika motif pencapaian dan kekuatan tinggi, perilaku dipengaruhi kebijakan. Afiliasi motif yang tinggi mengarah pada perilaku pasif dan ketika hanya status motif yang tinggi, perilaku berorientasi pada status. Model ini mencakup perputaran dalam jabatan, tingkat akses dari pejabat ke pejabat, tingkat control dari pimpinan partai dan kemungkinan dari kemenangan pemilihan.

2. Model Snowiss

Model ini memusatkan aspek-aspek yang relevan terhadap kebutuhan organisasi. Terdapat empat variabel dalam model ini, yaitu : (1) Dasar social, bagi partai ini merupakan hal utama dibanting electoral umum, (2) Sumber daya organisasi yang dapat digunakan sebagai sebagai insentif untuk memobilisasi pekerja partai dan menarik para elit politik, (3) Struktur, hierarki, kepemimpinan tersentral tidak dapat dipengaruhi dunia luar, (4) Etos organisasi, struktur hierarki dari organisasi partai mempromosikan suatu etos persetujuan politik (Vigana, 2019).

3. Model Michael Rush dan Althof

Sementara menurut Michael Rush dan Althof (2008), model perekrutan politik terbagi menjadi lima proses yaitu penyediaan dan permintaan, agensi, kriteria, control dan tuntutan.



Gambar 1. Model Perekrutan Politik Micheal Rush dan Althoff

Daya penyediaan dan permintaan dipengaruhi oleh berbagai agen seperti agensi perekrutan politik, menggunakan kriteria dan oleh kadar sejauh mana proses itu dapat dikontrol. Agensi dalam hal ini dibagi menjadi dua

yakni yang bekerja secara formal (komisi-komisi perekrutan administrative) dan informal (keluarga-keluarga “politik” ataupun seseorang yang memiliki kepentingan), partai politik merupakan sarana yang paling penting dalam kebanyakan sistem politik untuk merekrut sebagian besar pejabat public. Pentingnya partai-partai sebagai agensi politik dinilai sangat penting untuk menyaring masuknya calon pejabat public sehingga harus dilakukan sesuai dengan kriteria yang diinginkan masing-masing partai.

Badan agensi tersebut akan menetapkan kriteria dalam merekrut kader yang meliputi ciri-ciri dan ketrampilan yang dianggap layak dan harus dikuasai oleh calon pejabat. Kualifikasi-kualifikasi formal yang dituntut dari calon pemegang jabatan tadi diantaranya adalah ketentuan dari agensi ataupun diatur secara sah dalam aturan negara, sehingga kualifikasi tersebut akan memunculkan actor politik dari berbagai latar belakang. Sejauh mana proses rekrutmen tersebut dapat dikontrol juga penting dalam mempengaruhi penyediaan dan permintaan. Sebagai contoh dalam suatu studi perekrutan politik di Chicago, terdapat perbedaan seleksi oleh partai-partai utama dalam distrik kota sebelah dalam (daerah democrat), distrik pinggiran (daerah Republikan) dan distrik luar kota (daerah marginal). Distrik democrat berada dibawah pengawasan yang seksama oleh organisasi partai dan orang-orang yang terkenal di dalamnya dan merekalah yang mungkin terseleksi, sementara di distrik republikan terdapat sedikit pengawasan partai dan kelompok pemilihan pendahuluan memainkan peranan yang lebih penting, sedangkan distrik marginal terdapat lebih banyak variasi type yang harus diseleksi.

Secara umum sistem perekrutan politik terbagi menjadi dua cara atau metode yang dianggap penting yakni seleksi pemilihan melalui ujian dan latihan. Selain kedua cara ini, cara rekrutmen politik tentu memiliki banyak keragaman dan banyak diantaranya memiliki implikasi penting terhadap rekrutmen politik. Diantara cara-cara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seleksi pemilihan melalui ujian dan pemilihan

Ujian dan latihan merupakan bentuk rekrutmen yang paling umum, biasanya dilakukan untuk mengisi jabatan birokrasi dan administrasi.

2. Penyortiran atau penarikan undian

Suatu metode lama yang di gunakan untuk memperkokoh kedudukan pemimpin politik di Yunani Kuno.

3. Sistem pilih kasih

Metode ini dibuat untuk mencegah dominasi jabatan dari posisi berkuasa oleh orang atau kelompok tertentu melalui giliran atau rotasi. Sistem pilih kasih di Amerika merupakan sistem perekrutan bergilir, sedangkan sejumlah negara lain mempunyai ketentuan secara konstitusional untuk menjamin rotasi personil eksekutif. Contohnya adalah konstitusi Amerika yang mensyaratkan bahwa pejabat pemerintahan tidak diperbolehkan menjabat lebih dari dua masa jabatan. Bentuk ini dilakukan pada sistem yang menerapkan format kepemimpinan kolektif atau dalam bentuk prosidium atau pada masyarakat yang memiliki pengelompokan politik sangat kental, sehingga untuk menghindari konflik atau menjaga stabilitas politik baik partai politik atau pemerintahan, maka perlu dibuat sistem rotasi atau giliran.

4. Perebutan kekuasaan

Metode lain adalah cara perebutan kekuasaan yang umumnya dilakukan melalui kekerasan. Penggulingan kekuasaan melalui kekerasan pada rezim politik, apakah hal itu berlangsung dengan *coup d'etat*, revolusi, intervensi, militer dari luar, pembunuhan atau kerusuhan rakyat, acapkali dijadikan sarana untuk mengefektifkan perubahan radikal pada personil ditingkat lebih tinggi dalam partisipasi politiknya, akibatnya adalah terjadinya pergantian pemegang jabatan politik, namun perubahan personil birokrasi biasanya lebih lama, terutama bila berlangsung dalam masyarakat yang kompleks dan maju.

5. Sistem patronase

Sistem yang sudah ada sejak abad ke-18 ini merupakan suatu perkembangan dari praktek yang telah lama berjalan, memiliki tujuan bermacam-macam. Patronase merupakan bagian dari suatu sistem penyuaipan dan sistem korupsi yang rumit, yang merasuki banyak bidang kehidupan masyarakat di Inggris. Sistem ini merupakan metode yang cukup mapan untuk mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan politik melalui berbagai taraf pengontrolan terhadap hasil pemilu dan merupakan dukungan dalam parlemen. Hal ini merupakan sistem yang dapat membeli jabatan-jabatan strategis oleh para aktor politik yang mencari jabatan dan juga sistem dimana orang-orang dapat dibujuk untuk bertindak secara khusus dengan imbalan hadiah-hadiah tertentu.

6. Seleksi dengan memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah

Berbeda dengan patronase, memunculkan pemimpin alamiah lebih merupakan pembenaran kasar terhadap kaum aristokrasi. Jadi, walaupun pemimpin partai konservatif di Inggris tidak lagi muncul sejak adanya pemilihan suara oleh anggota parlemen konservatif, sistem politiknya tetap memaksakan sejumlah pembatasan kontekstual dengan cara mengurangi jumlah pemimpin konservatif potensial. Dengan kata lain seorang pejabat konservatif harus menunjukkan berbagai kemampuannya yang memungkinkan dirinya untuk memenuhi tuntutan yang diajukan oleh pemerintahan parlementer dan kampanye secara efektif. Diantaranya adalah kemampuan untuk menandingi berbagai perdebatan dalam isu politik dan keunggulan memikul tanggung jawab sebagai pejabat public.

7. Seleksi melalui koopsi

Suatu metode yang lebih terbatas dimana pemimpin-pemimpin yang ada dapat membantu pelaksanaan perekrutan tipe-tipe pemimpin tertentu adalah *koopsi* yang meliputi pemilihan seseorang ke dalam suatu badan oleh anggota-anggota yang ada (Rush & Althoff, 2008).

Menurut Pippa Norris (dalam Haris dkk, 2016) terdapat tiga tahapan dalam melakukan proses rekrutmen politik, yaitu :

1. Tahap sertifikasi

Tahap ini merupakan awal dari sebuah rekrutmen, pada tahap ini partai politik akan melakukan penyeleksian terhadap kandidat mencakup kriteria yang sesuai dengan partai, aturan internal partai, aturan pemilihan, dan norma-norma sosial.

2. Tahap nominasi

Pada tahap ini partai politik akan memilih dan menentukan terhadap kandidat yang telah diusung oleh beberapa actor untuk dijadikan pejabat public sesuai dengan kemampuan yang dimiliki kandidat, seperti elektabilitasnya di dalam masyarakat, tingkat kepercayaan public, kemampuan dalam birokrasi dan lain sebagainya.

3. Tahap pemilihan umum

Tahap selanjutnya berkaitan dengan proses pemilihan, yang umumnya berkaitan dengan bagaimana cara memilih, siapa yang dilibatkan untuk memilih, dan bagaimana cara menentukan siapa yang akan menang. Di dalam negara demokrasi proses ini melalui skema pemilihan umum yang diselenggarakan secara terbuka setiap 5 Tahun sekali.

Tabel 1. Skema Rekrutmen Pippa Norris

Tahap Sertifikasi	Tahap Nominasi	Tahap Pemilu
<ul style="list-style-type: none">• Persyaratan umum yang seringkali diatur di dalam UU Pemilu ataupun peraturan internal partai adalah tentang usia, kewarganegaraan, residensi (domisili), dana deposit, dan pelarangan pencalonan dengan kondisi tertentu (dibahas kemudian)• Persyaratan khusus yang muncul dalam beberapa aturan UU dan partai diantaranya adalah Tempat kelahiran, status kewarganegaraan akibat	<ul style="list-style-type: none">• Partai politik dalam proses nominasi ini memiliki beberapa peran:<ul style="list-style-type: none">a) Mencalonkan kandidat di dalam proses pemilu.b) Memberikan jaringan sosial (konstituen dan elemen pendukung lainnya).c) Training dan pelatihan peningkatan kapasitas.d) Pengalaman	<ul style="list-style-type: none">• Sistem pemilu sebagai aturan permainan dalam tahap akhir rekrutmen pejabat publik dan ataupun anggota parlemen diantaranya adalah membahas sistem yang digunakan yakni proporsional, mayoritas

<p>naturalisasi, minimal periode waktu menjadi anggota partai untuk memastikan loyalitas dan kemampuan mengerti visi-misi-kebijakan partai, kuota bagi kelompok tertentu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat persyaratan yang mengatur pelarangan pencalonan dengan kondisi tertentu, termasuk: 1. PNS, hakim yudisial, dan pejabat dalam lembaga publik 2. Orang yang terlibat dalam pelanggaran hukum dan tindakan kriminal serius 3. Orang yang mengalami kebangkrutan finansial • Terdapat kriteria khusus yang seringkali muncul menjadi norma informal yang tak tertulis di dalam masyarakat namun berpengaruh: <ol style="list-style-type: none"> a) Kandidat memiliki pengalaman mengikuti training tentang fungsi-kerja parlemen, training tentang legal drafting, dan training terkait lainnya. b) Kandidat memiliki pengalaman bekerja pada lembaga parlemen di level wilayah yang lebih rendah. c) Kandidat memiliki pengalaman bekerja di lembaga mengenai kebijakan publik, media, atau lembaga pemerintahan lokal. 	<p>organisasi berpartai yang meningkatkan kapasitas dalam pembuatan kebijakan dan lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiga hal penting dalam proses nominasi adalah: <ol style="list-style-type: none"> a) Derajat sentralisasi partai, yakni apakah pencalonan kandidat ditentukan secara bertahap mulai dari elit partai di tingkat pusat (top-down) ke tingkat di bawahnya atau dari elit di level daerah ke level di atasnya (bottom-up). b) Kedalaman partisipasi, yakni apakah proses penetapan calon dilakukan oleh sedikit elit atau banyak elit partai. c) Jumlah orang yang akan dicalonkan, yakni apakah hanya ada satu calon tunggal, beberapa atau banyak calon untuk dipilih sebagai kandidat pemilu. 	<p>ataupun campuran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan lain dalam pemilu yang terkait dengan rekrutmen: <ol style="list-style-type: none"> a) Kebijakan <i>reserved seat</i>. b) Kebijakan kuota.
--	--	--

Berkaitan dengan rekrutmen, parpol tidak hanya merekrut anggota untuk bergabung dalam partai namun juga perekrutan untuk mengisi jabatan dalam internal partai dan juga mengisi jabatan public diantaranya adalah sebagai pengurus, calon kepala daerah, calon legislative dan lain sebagainya. Berbagai elemen harus dipertimbangkan di dalam proses rekrutmen partai, mulai dari kriteria calon mekanisme nominasi dan seleksi, serta siapa yang akan menjalankan mekanisme tersebut. Karena itu, setiap partai politik tentu memiliki cara yang berbeda untuk menjalankan sistem rekrutmennya masing-masing. Perekrutan dalam

partai politik secara umum dapat digolongkan menjadi 3 kategori yakni merekrut sebagai anggota parpol, pengurus parpol dan actor yang akan di delegasikan untuk menduduki jabatan public sebagai berikut (Haris dkk, 2016) :

1. Proses rekrutmen anggota partai

Rekrutmen terhadap anggota partai dilakukan melalui beberapa cara diantaranya adalah rekrutmen secara terbuka, yang mana partai memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk bergabung dalam partai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh masing-masing partai. Partai melakukan serangkaian kegiatan guna menarik seseorang untuk terlibat dalam politik misalnya pengadaan seminar, pemanfaatan media daring, pertemuan langsung, dan kegiatan lain yang bersinggungan dengan masyarakat sehingga masyarakat mengetahui bahwa partai politik sedang mencari anggota baru.

Penentuan kualifikasi dalam merekrut anggota baru, parpol memiliki corak yang berbeda-beda di tiap-tiap partai, secara umum partai menetapkan syarat untuk menjadi anggota partai sesuai dengan AD/ART serta ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Proses perekrutan anggota partai juga identic dengan pemilihan individu yang memiliki visi, misi serta ideology yang sama dengan afiliasi partai diantaranya adalah partai berbasis islam, maka kriteria yang dicari adalah mereka yang beragama islam sedangkan partai berbasis nasional cenderung tidak mempersoalkan agama yang dianut calon anggota baru.

2. Proses rekrutmen pengurus partai

Rekrutmen pengurus dan staf partai memiliki kriteria dan proses seleksi yang lebih ketat dibandingkan dengan rekrutmen anggota. Kriteria dan proses seleksi pengurus partai dijalankan melalui sebuah konferensi atau rapat besar partai yang melibatkan pengurus lama atau anggota partai. Tidak berbeda jauh dengan perekrutan anggota partai, merekrut pengurus partai juga mengikuti aturan serta panduan skematis yang telah ditetapkan partai. Partai Buruh di Inggris misalnya, yang merekrut calon pengurus partai secara demokratis dengan mengadakan konferensi yang melibatkan seluruh anggota partai serta sayap partai.

Memiliki masa keanggotaan minimal 12 bulan setidaknya menjadi syarat utama untuk diajukan menjadi pengurus partai. Partai Buruh menggunakan

mekanisme voting dalam proses memilih pengurus, tidak ada satu delegasi yang mendapatkan nilai satu suara utuh. Artinya, “one man, one vote” tidak diberlakukan. Nilai voting dibagi menjadi dua kelompok suara: (1) delegasi yang mendapatkan 1/3 suara yakni meliputi pengurus lama, anggota partai, dan anggota organisasi sayap partai, dan (2) delegasi yang mendapatkan 1/10 suara yakni pendukung kandidat tetapi bukan anggota partai. Mekanisme ini dilakukan dengan prinsip keadilan, terbuka, dan transparan dengan mempertimbangkan representasi pemuda dan perempuan.

Perekrutan pengurus di dalam partai terbagi menjadi beberapa kategori yaitu dewan pengurus pusat yang disebut DPP, organisasi ini berada ditingkat tertinggi dalam partai yaitu dewan pengurus partai dalam satu negara, Dewan Pengurus Wilayah yang kemudian disebut DPW, membawahi tatanan pengurus provinsi di suatu wilayah, Dewan Pimpinan Cabang atau pengurus lini Daerah atau Kabupaten, pimpinan anak cabang (PAC) pengurus yang berdaa ditingkat local yakni kecamatan di daerah tertentu serta yang paling kecil adalah pengurus pengurus ranting yang mengatur di Desa.

3. Proses rekrutmen calon pejabat public

Berbeda pada perekrutan bagi anggota dan pengurus, dalam merekrut calon pejabat public, beberapa partai di Indonesia memiliki dua skema nominasi yang digunakan yakni kandidat yang berasal dari internal partai dan kandidat yang berasal dari luar partai. Kandidat luar partai diantaranya seperti tokoh masyarakat, pengusaha, artis maupun kalangan lain yang dipilih berdasarkan kecukupan pembiayaan dan massa yang dimiliki serta seberapa besar pengaruhnya di dalam masyarakat untuk mendapatkan elektabilitas yang tinggi. Jika pada proses rekrutmen anggota dan pengurus diatur dalam AD/ART partai masing-masing, pada proses rekrutmen calon pejabat public, mekanismenya harus sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mencakup persyaratan administrative sebagai berikut :

1. Telah berumur 21 tahun atau lebih terhitung sejak penetapan Daftar Calon Tetap.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Dapat berbicara, membaca, menulis dalam bahasa Indonesia.
5. Berpendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, atau sekolah lain sederajat.
6. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
7. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.
9. Sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif.
10. Terdaftar sebagai pemilih.
11. Bersedia bekerja penuh waktu.
12. Mengundurkan diri sebagai Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota, Kepala Desa, Perangkat Desa, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisiaris, dewan pengawas dan atau karyawan pada BUMN, BUMD, BUMDesa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
13. Mengundurkan diri sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilu, atau panitia pengawas.
14. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Dicalonkan hanya satu di satu lembaga perwakilan.
16. Dicalonkan hanya oleh satu partai politik.
17. Dicalonkan hanya di satu dapil.

18. Mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

. Charles F Andrain (dalam Gatara & Said, 2007) menyampaikan mengenai beberapa kriteria sumber daya yang perlu dimiliki seorang aktor politik untuk tampil dalam gelanggang kekuasaan politik. Sumber daya tersebut ialah :

1. Sumber daya fisik yang meliputi alat-alat kekuasaan pemaksa seperti senjata.
2. Sumber daya ekonomi yang terdiri dari kekayaan, pendapatan, kontrol atas barang dan jasa.
3. Sumber daya normatif, yang meliputi moralitas, kebenaran, kehormatan, tradisi, religius, legitimasi dan wewenang.
4. Personal yang meliputi kharisma pribadi (ketokohan), daya tarik, persahabatan, kasih sayang dan popularitas.
5. Sumber daya keahlian yakni sumber daya politik berupa penguasaan informasi, pengetahuan, keterampilan, intelegensi, serta keahlian teknis.

Adapun secara umum terdapat 10 prinsip yang dapat dijadikan pedoman partai politik dalam melakukan proses rekrutmen politik terhadap calon anggota, yaitu :

- a. Memiliki loyalitas atau kesetiaan terhadap partai.
- b. Bersih.
- c. Transparan atau secara terbuka.
- d. Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan).
- e. Meritokrasi, artinya partai politik harus mengesampingkan pola rekrutmen berdasarkan hubungan personal.
- f. Demokratis.
- g. Desentralisasi, dilakukan secara proporsional.
- h. Kecukupan pembiayaan, artinya partai politik harus memperhatikan iuran kemampuan iuran anggota.
- i. Humanis, partai politik memberikan akses bagi semua calon anggota tanpa memandang status.
- j. Non-partisan, yaitu tidak melakukan diskriminasi (Haris dkk, 2016).

Menurut Bambang Yudhoyono dalam buku sosiologi politik (2011), terdapat enam langkah yang dapat ditempuh oleh partai politik dalam upaya menyiapkan kader-kader politik yang berkualitas yang akan diperankan di masa mendatang, khususnya dalam mengisi jabatan politik yaitu :

a. Tahap pertama

Rekrutmen kader, yaitu suatu tahap awal kaderisasi berupa penentuan calon melalui seleksi yang dilakukan terhadap seluruh anggota berdasarkan kriteria umum yang ditentukan.

b. Tahap kedua

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kader tingkat dasar yang terdapat upaya pembekalan dasar-dasar pemikiran ideologi, metode berfikir menurut aliran atau doktrin tertentu, pendekatan mengenai sistem, studi kasus dan lain sebagainya dalam rangka penyamaan pola fikir, cara pandang serta peningkatan pengetahuan dasar.

c. Tahap ketiga

Penugasan, yaitu suatu cara untuk melatih, menguji, dan mematangkan dengan pengalaman-pengalaman langsung.

d. Tahap keempat

Menyelenggarakan kursus kader tingkat lanjutan yaitu suatu proses peningkatan kualitas kader setelah yang bersangkutan menjalani proses penugasan.

e. Tahap kelima

Kepeloporan, yaitu suatu upaya menempatkan para kader pada posisi dan peranan sebagai peloporyang berfungsi melindungi dan mengamankan operasi manajemen partai dan dapat mencegah suasana lingkungan dari bahaya perpecahan.

f. Tahap keenam

Pelibatan dalam diskusi dan seminar, dalam arti bahwa para kader harus selalu diuji kemampuan intelegensiannya dan cara mereka merumuskan serta menyampaikan pendapatnya tentang suatu permasalahan tertentu secara logis, sistematis, rasional dan objektif.

BAB III

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Demak

1. Sejarah dan Visi Misi

Berdirinya kerajaan Demak Bintoro ditandai dengan terjadinya kemunduran kerajaan majapahit pada Tahun 1478, yang mengakibatkan pemisahan wilayah seperti Tuban, Gresik, Demak, Kudus sehingga menyatakan diri untuk lepas dari kekuasaan majapahit. Setelah keruntuhan majapahit tersebut, Demak Bintoro sebuah kota dagang di pantai Utara Jawa berhasil menyusun kekuasaan yang solid, dengan rajanya yang pertama yaitu Raden Patah. Raden Patah sendiri merupakan seorang putra raja majapahit yang terakhir bernama Brawijaya dan ibunya seorang putri Cina dari kraton raja Majapahit. Berdirinya Demak Bintoro juga disertai dukungan para walisongo di seluruh tanah Jawa, dan dapat dikatakan bahwa Demak Bintoro menjadi satu kekuatan yang menghegemoni sejarah Jawa khususnya dalam penyebaran agama Islam (Purwadi & Maharsi, 2005).

Raden Patah dibesarkan di Palembang, disana ia menerima banyak pelajaran kebudayaan social dan politik, kemudian pada saat berumur belasan tahun, tepatnya pada Tahun 1419 M bersama adiknya, Raden Patah berlayar menuju tanah Jawa untuk belajar di Ampel Denta bersama saudagar muslim dan para walisongo. Setelah lulus, Raden Patah melakukan perjalanan ke Bintara yang telah direncanakan walisongo sebagai pusat pertama penyebaran Islam, dan didirikannya pesantren sebagai langkah menyebarkan dogma Islam pertama kali di Demak, penyebaran yang ia lakukan melalui berbagai cara seperti wayang, kesenian, kebudayaan dan lain sebagainya. Hal ini juga ditandai dengan didirikannya Masjid Agung Demak sebagai tempat yang disucikan pada masanya sampai sekarang. Kemudian setelah usaha-usaha yang dilakukan Raden Patah dalam menyebarkan agama Islam tersebut perlahan daerah Demak berkembang menjadi kota yang ramai.

Setelah kekuasaan Raden Patah, kesultanan Demak Bintoro dilanjutkan oleh anaknya bernama Pati Unus, sama seperti sebelumnya penyebaran Islam terus berlanjut dan kemudian dilanjutkan kembali oleh Sultan Trenggono, yang pada masa ini kesultanan Demak Bintoro mencapai puncak kejayaannya melalui ekspansi ke

beberapa wilayah sehingga memberikan dampak keislaman yang cukup besar dalam sejarah Jawa an memberikan kekuatan serta perluasan wilayah Demak. Setelah silih berganti tokoh pemimpin, saat ini Kabupaten Demak merupakan kota yang masih memiliki corak keislaman cukup kuat, dimana mayoritas masyarakatnya beragama islam, serta banyak dijumpai pesantren-pesantren, terlebih masih berdirinya Masjid Agung Demak dan makam Raden Patah menjadi fenomena unik tersendiri bagi keberlangsungan tradisi islam di masa lalu (Purwadi & Maharsi, 2005).

- **Visi**

Demak bermartabat, maju dan sejahtera.

- **Misi**

- a) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya.
- b) Meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing.
- c) Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

2. Kondisi Geografis



Gambar 2. Peta Kabupaten Demak

Secara geografis Demak terletak pada koordinat 6 derajat 43"26" - 7 derajat 09"43" Lintang Selatan dan 110 derajat 27"58" - 110 derajat 48"47" Bujur Timur. Jarak terjauh dari barat ke timur 49 km dan dari utara ke selatan sepanjang 41 km, dengan luas wilayah 89.743 Ha. Batas wilayah kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

- a) Utara = Kabupaten Jepara dan Laut Jawa.
- b) Timur = Kabupaten Kudus dan kabupaten Grobogan.
- c) Selatan = Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan.
- d) Barat = Kotamadya Semarang.

Jarak tempuh dari ibukota kabupaten Demak ke ibukota kabupaten atau kota sekitarnya adalah sebagai berikut :

- a) Demak - Semarang = 26 km.
- b) Demak - Kudus = 25 km.
- c) Demak - Jepara = 45 km.
- d) Demak - Purwodadi = 38 km

3. Kondisi Administratif

Secara Administrasi luas wilayah Kabupaten Demak adalah 89.743 ha yang terbagi dalam 14 kecamatan, 243 desa dan 6 kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Wedung (11 %) dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kebonagung (4,68 %). Sebagian besar wilayah Kabupaten Demak adalah sawah yang mencapai luas 51.799 ha (57,72%) dan selebihnya adalah lahan kering. 13,77%. digunakan untuk sawah, 0,05% sementara tidak digunakan dan 11,16% digunakan untuk tambak (BPS, 2021).

Tabel 2. Luas Daerah Kabupaten Demak

NO	KECAMATAN	LUAS (HEKTAR) 2020
1.	Mranggen	7,222
2.	Karangawen	6,695
3.	Guntur	5,753
4.	Sayung	7,869
5.	Karangtengah	5,155

6.	Bonang	8,324
7.	Demak	6,113
8.	Wonosalam	5,788
9.	Dempet	6,161
10.	Kebonagung	4,199
11.	Gajah	4,783
12.	Karanganyar	6,776
13.	Mijen	5,029
14.	Wedung	9,876
Jumlah		89. 743

Sumber : BPS Kabupaten Demak, diolah oleh penulis.

4. Iklim dan Curah hujan

Berdasarkan data dari Stasiun Klimatologi Semarang, rata-rata hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember 2021 yaitu 22 hari dan rata-rata curah hujan tertinggi juga terjadi pada bulan Desember 2021 yaitu 505.19 mm. Suhu udara rata-rata di Kabupaten Demak tahun 2021 berkisar antara 27,4oC sampai dengan 29,2oC. Sedangkan untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi dari 76 persen sampai dengan 88 persen selama tahun 2021 ini (BPS, 2021).

Tabel 3. Tabel Pengamatan unsur iklim menurut bulan di stasiun Meteorologi Semarang tahun 2021

Bulan	Rata-rata Curah Hujan (mm)	Rata-rata Hari Hujan (day)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	582	24	34

Februari	708	21	39
Maret	102	8	68
April	69	3	74
Mei	0	0	81
Juni	80	7	75
Juli	0	0	89
Agustus	53	5	91
September	53	6	84
Oktober	262	12	85
November	385	21	47
desember	273	15	47

Sumber : BMKG Stasiun Klimatologi Semarang, diolah oleh penulis

5. Kondisi Demografi

Dari hasil proyeksi penduduk tahun 2015, tercatat total jumlah penduduk Kabupaten Demak sebanyak 1.117.901 orang. Terdiri dari 553.876 berjenis kelamin laki-laki (49,55%) dan 564.025 perempuan (50,45%). Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebanyak 5.681 orang atau sekitar 1,04%. Sebagian besar penduduk Kabupaten Demak berusia produktif, yakni umur 15 sampai 64 tahun sebanyak 758.944 orang. Selebihnya merupakan penduduk non produktif sebanyak 296.880 berumur di bawah 15 tahun dan 62.077 orang berumur di atas 65 tahun. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja ini dibedakan sebagai angkatan kerja yang terdiri dari bekerja dan mencari pekerjaan, serta bukan angkatan kerja yang terbagi atas yang masih sekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Selama tahun 2015 penduduk Kabupaten

Demak usia 15 tahun ke atas yang bekerja sebanyak 534.301 orang yang terdiri dari 316.456 laki-laki dan 217.845 perempuan (BPS, 2021).

Tabel 4. Jumlah Penduduk Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
	2020	2020	2020
Mranggen	89248	88474	177722
Karangawen	49428	48225	97653
Guntur	45579	43543	89122
Sayung	54719	52993	107712
Karantengah	36805	34976	71781
Bonang	55641	53071	108712
Demak	57068	56097	113165
Wonosalam	43832	42830	86662
Dempet	30747	30942	61689
Kebonagung	22858	21702	44560
Gajah	26787	26648	53435
Karanganyar	39979	39356	79335

Mijen	29783	29804	58587
Wedung	42346	41475	82821
Jumlah	590820	610136	1200956

Sumber : BPS Kabupaten Demak, diolah oleh penulis

Menurut Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak terdapat 6.455 orang pencari kerja. Terdiri dari 2.651 laki-laki dan 3.804 perempuan selama tahun 2015. Sebagian besar pencari kerja tersebut berpendidikan setara SLTA sebanyak 3.752 orang. Sedangkan sisanya 770 orang berpendidikan setara SLTP, 1596 orang berpendidikan berpendidikan diploma / perguruan tinggi dan 292 orang berpendidikan SD. Dilihat dari kepadatan penduduk, pada tahun 2015 Kabupaten Demak mencapai 1.246 orang/km persegi. Penduduk terpadat berada di Kecamatan Mranggen, dengan jumlah kepadatan 2.494 orang/km persegi. Sedangkan di Kecamatan Wedung memiliki tingkat kepadatan paling rendah, yaitu 517 orang/km persegi.

B. Profil DPC PDI Perjuangan Kabupaten Demak

1. Sejarah DPC PDI Perjuangan Kabupaten Demak

Berdirinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak lepas dari berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Ir Sukarno pada 4 Juli 1927. PNI bergabung dengan partai-partai lain yaitu Partai Murba, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) serta Partai Katolik yang kemudian gabungan dari partai-partai tersebut dinamakan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada masa awal pembentukan PDI Perjuangan terus mengalami kendala dan tekanan serta diperparah dengan adanya intervensi dari pemerintah. Untuk mengatasi konflik tersebut, anak kedua dari Ir Sukarno, Megawati Sukarnoputri didukung untuk menjadi ketua umum PDI, namun Presiden pada masa itu, Suharto tidak menyetujui usulan tersebut dan menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati Sukarnoputri dalam

Kongres Luar Biasa (KLB) pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.

Banyak yang menentang larangan tersebut, salah satunya adalah KLB, karena adanya banyak tuntutan untuk menjadikan Megawati sebagai Ketua Umum, melalui berbagai perundingan, pada tanggal 22-23 Desember 1993 dilaksanakan musyawarah nasional yang dihadiri oleh para tokoh politik dan pejabat pemerintah, dan mengakui secara de facto bahwa untuk melanjutkan kiprah kebangsaan dalam partai politik sebagai penerus Ir. Soekarno ialah Megawati Soekarno Putri. Namun karena banyak terjadi konflik internal terkait penobatan Megawati sebagai ketua umum, pada tahun 1996, Soeharto mengadakan kongres di asrama haji dengan mengangkat Suryadi sebagai Ketua Umum DPP PDI.

Pengangkatan Suryadi memicu bentrok antara kubu Megawati dan Suryadi, tepatnya pada tanggal 27 Juli terjadi kerusuhan yang cukup besar yang dikenal dengan peristiwa kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau Peristiwa Kudatuli. Dibawah pimpinan Suryadi PDI hanya memperoleh 11 kursi DPR. Karena pemerintahan Suharto lengser pada reformasi 1998, sementara itu Megawati berhasil membawa PDI menjadi partai yang cukup kuat di masa itu. Kemudian pasca lengsernya Suryadi bersamaan dengan berakhirnya pemerintahan Orde Baru diadakan kongres yang bertempat di Denpasar, Bali dan menghasilkan putusan penobatan Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum DPP PDI periode 1998-2003 menggantikan Suryadi.

Setelah menjabat sebagai ketua umum DPP, Megawati mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada 1 Februari 1999 agar dapat mengikuti pemilu yang dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta. PDI Perjuangan (PDIP) melakukan Kongres I pada 27 Maret-1 April 2000 di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah. Kongres tersebut menghasilkan keputusan bahwa Megawati Sukarnoputri sebagai Ketum DPP PDIP periode 2000-2005. Pada Kongres IV PDIP di Bali pada 8-12 April 2015, Megawati Sukarno Putri kembali dikukuhkan sebagai Ketum PDIP periode 2015-2020 (Eba, 2021).

2. Visi dan Misi partai

Visi PDI Perjuangan berdasarkan pasal 6 Anggaran Dasar adalah:

- a. Terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- a. Terwujudnya masyarakat Pancasila dalam NKRI yang demokratis, adil dan makmur.

Misi PDI Perjuangan adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik partai.
- b. Memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan negara.
- c. Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun masyarakat Pancasila.
- d. Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- e. Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang ekonomi, social dan budaya secara demokratis.
- f. Berjuang mendapatkan kekuatan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
- g. Membentuk dan membangun karakter bangsa.
- h. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggungjawab menggunakan hak dan kewajibannya dalam negara.
- i. Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara.
- j. Memperhatikan dan mewujudkan cita-cita Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam NKRI.
- k. Melaksanakan, mempertahankan dan menyebarluaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

- l. Mempersiapkan kader partai dalam pengisian jabatan politik dan jabatan public melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
- m. Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

3. Asas, Jatidiri dan Watak Partai

Partai berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jiwa dan semangat kelahirannya pada 1 Juni 1945. Jatidiri Partai adalah Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial. Watak Partai adalah gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan progresif revolusioner.

4. Lambang dan Arti PDI Perjuangan



Gambar 3. Logo PDI Perjuangan

Arti lambang partai adalah sebagai berikut :

- a. Lambang PDI Perjuangan berupa gambar banteng hitam bermoncong putih dengan latar merah di dalam lingkaran bergaris hitam dan putih.
- b. Warna dasar merah melambangkan berani mengambil resiko dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk rakyat.
- c. Mata merah dengan pandangan tajam melambangkan selalu waspada terhadap ancaman dalam berjuang.

- d. Moncong putih melambangkan dapat dipercaya dan berkomitmen dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran
- e. Lingkaran melambangkan tekad yang bulat dan perjuangan yang terus-menerus tanpa terputus

5. Profil DPC PDI-P Kabupaten Demak

Berdasarkan keputusan SK pusat mengenai pendirian partai, kemudian partai-partai di daerah mulai didirikan salah satunya di Demak, yang berdiri pada Tahun 1973 bersamaan dengan pendirian PDI-P Pusat secara de facto dan de jure. Kantor DPC PDI-P Kabupaten Demak berlokasi di Jalan Sultan Hadiwijaya No. 19, Ngorame, Mangunjiwan, Kecamatan Demak Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59515. Setelah pembentukan partai kemudian dibentuklah structural DPC guna melaksanakan tugas-tugas dalam partai politik yang selanjutnya dinamakan struktur organisasi partai. Struktur Organisasi PDI Perjuangan Kabupaten Demak masa bakti 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Struktur Organisasi

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	H. Sri Fahrudin Bisri Slamet, S.E
BIDANG INTERNAL		
2.	Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai	H. Sudarno, S.Sos
3.	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu	H. Sugiharno, S,P
4.	Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi	Suko Pratomo
5.	Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi	Dr. Suemy, M.Si
BIDANG PEMERINTAHAN		
6.	Wakil Ketua Bidang Politik	H. Sonhaji, S.H
7.	Wakil Ketua Bidang Hukum, HAM dan UU	Nanang Setyono, S.H, M.H

8.	Wakil Ketua Bidang Perekonomian	Mutiara Janatus Syafaah
9.	Wakil Ketua Bidang Kebudayaan	Tatiek Soelistijani, S.H
BIDANG KERAKYATAN		
10.	Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, Kesehatan, Perempuan dan Anak	Sriyatun
11.	Wakil Ketua Bidang Industri, Tenaga Kerja, Jamsos, Koperasi dan UMKM	Setyo Budi
12.	Wakil Ketua Bidang Ekonomi, Pariwisata dan Kepemudaan	Saiful Hadi, S.Sos, M.H
13.	Wakil Ketua Bidang Keagamaan	H. Busro, S.Pd
14.	Wakil Ketua Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Imam Wahyudi, S.E
15.	Sekretaris	H. Sudarno
16.	Wakil Sekretaris Bidang Internal	Mohammad Wahyudin
17.	Wakil Sekretaris Bidang Program	Annisa Indriana, S.E
18.	Bendahara	H. Faozan, S.H
19.	Wakil Bendahara	Dr. Estianah, S.E

Sumber: Sekretariat PDI Perjuangan Demak

C. Profil PKB Kabupaten Demak

1. Sejarah DPC PKB Kabupaten Demak

Berakhirnya masa orde baru merupakan sejarah awal berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tepat satu hari setelah Presiden soeharto lengser, pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendapat usulan dari warga NU di seluruh Indonesia. Usulan yang dimaksudkan ialah membentuk suatu organisasi khusus bagi masyarakat NU melalui partai politik. Beberapa diantaranya telah mengusulkan nama-nama partai, visi misi serta lambang yang akan digunakan. Namun berdasarkan Mukhtamar Nu ke 27 di Situbondo telah mengisyaratkan bahwa NU merupakan organisasi yang tidak terkait dengan partai politik ataupun

melakukan tindakan-tindakan politik praktis. Tokoh NU seperti KH. M Cholil Bisri yang merupakan pimpinan Lajnah Sebelas Rembang menyatakan bahwa PBNU harus menanggapi usulan tersebut secara hati-hati supaya tidak menyimpang dari tujuan serta ajaran-ajaran NU.

Mendengar bahwa PBNU belum sepenuhnya sepakat dengan usulan tersebut, banyak pihak dari kalangan NU yang mendesak untuk segera membentuk wadah organisasi sebagai bentuk kesatuan dalam mengkonsolidasikan kepentingan bersama di dalam masyarakat dengan tokoh NU sebagai actor yang ikut serta berperan dalam sistem kenegaraan, sehingga tercipta kemaslahatan umat bersama serta diharapkan terjalin hubungan yang erat antar NU di seluruh pelosok tanah air. Selanjutnya pada tanggal 3 Juni 1998 PBNU mengadakan rapat dengan putusan untuk membentuk tim guna memenuhi aspirasi warga NU dalam menimbang serta mencari data-data terkait keputusan yang akan diambil berdasarkan kenyataan serta pertimbangan secara matang.

Tim tersebut beranggotakan lima orang yakni: KH Ma`ruf Amin (sebagai Rais Suriyah atau Kordinator Harian PBNU), KH M Dawam Anwar (sebagai Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siroj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir, S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). PBNU secara resmi memberikan surat tugas kepada tim ini untuk melakukan pengkajian serius terhadap tuntutan pembentukan partai politik berlandaskan asas NU. Selain Tim Lima, PBNU juga membentuk Tim Asistensi untuk membantu Tim sebelumnya dalam menginventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi politik warga NU.

Tim Asistensi diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma`ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar. Selanjutnya tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasi tugas-tugasnya. Tanggal 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas

untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan, yaitu: Rancangan mengenai Reformasi Politik, Mabda` Siyasi, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi yang akan dijadikan ideology atau pedoman dalam menjalankan arah perpolitikan sesuai dengan usulan para tokoh NU.

KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan salah satu tokoh yang menentang pendirian parpol berlandaskan ajaran-ajaran NU, dikarenakan jika partai politik didirikan dengan mendasarkan arah perpolitikannya ke dalam doktrinasi NU, akan mengakibatkan keterkaitan antara agama dengan politik baik di dalam internal partai maupun negara sehingga hal ini rentan memicu sebuah konflik, tentunya berbeda dengan cita-cita sesama warga NU yang ingin mendirikan parpol sebagai wadah persatuan. Namun pada akhir Juni 1998, sikapnya mengendur dan bersedia menginisiasi kelahiran parpol berbasis ahlussunah wal jamaah. Usai pembentukan partai, deklarasi pun dilaksanakan di Jakarta pada 29 Rabiul Awal 1419 H atau 23 Juli 1998. Bunyi dalam isi deklarasi tersebut adalah:

Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani, bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri, bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan, serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama.

Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga

Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (PKB, 2015).

2. Visi dan Misi Partai

Visi PKB adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual.
- c. Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.

Misi PKB adalah sebagai berikut:

- a. **Bidang Ekonomi:** menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis.
- b. **Bidang Hukum:** berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan social.
- c. **Bidang Sosial Budaya:** berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- d. **Bidang Pendidikan:** berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan.
- e. **Bidang Pertahanan:** membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.

3. Lambang dan arti PKB



Gambar 4. Logo PKB

Arti gambar adalah sebagai berikut:

- a. Bumi dan peta Indonesia, bermakna tanah air Indonesia yang merupakan basis perjuangan Partai dalam usahanya untuk mencapai tujuan Partai sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 Anggaran Dasar.
- b. Sembilan bintang bermakna idealisme Partai yang memuat 9 (sembilan) nilai, yaitu kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, kerakyatan, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan, dan persaudaraan.
- c. Tulisan nama Partai dan singkatannya bermakna identitas diri Partai yang berfungsi sebagai sarana perjuangan aspirasi politik rakyat Indonesia yang memiliki kehendak menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang demokratis.
- d. Bingkai segi empat dengan garis ganda yang sejajar bermakna garis perjuangan Partai yang menempatkan orientasi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, lahir dan batin, secara sejajar.

Arti warna adalah sebagai berikut:

- a. Putih, bermakna kesucian, ketulusan dan kebenaran yang menjadi etos perjuangan Partai.

- b. Hijau, bermakna kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tujuan perjuangan.
- c. Kuning, bermakna kebangkitan Bangsa yang menjadi nuansa pembaharuan dan berpijak pada kemaslahatan umat manusia.

4. Asas, Jatidiri dan Watak

Partai PKB berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip perjuangan Partai adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlusunnah Waljama'ah. Jati diri Partai adalah Nasionalis, Agamis dan Humanis Watak Partai adalah Moderat, Toleran dan Adil.

5. Profil DPC PKB Kabupaten Demak

Setelah pembentukan Partai Kebangkitan Bangsa pusat, mulailah pendirian partai ditingkat local atau daerah-daerah. Di kabupaten Demak PKB berdiri pada Tahun 1998. Lokasi kantor Dewan Pengurus Cabang PKB Demak terletak di Jalan Pahlawan Bangsa No. 79, Nogorame, Mangunjiwan, Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Jawa Tengah 59515.

Tabel 6. Struktur Organisasi

NO	DEWAN MUSTASYAR	
1.	K.H. Munif Zuhri	Anggota
2.	K.H. Alawi Mas'udi	Anggota
3.	K.H. Nurullah Yasin, S.Pd.I	Anggota
4.	K.H. Abdul Hafidz Satori	Anggota
5.	K.H. Yasin Masyhadi	Anggota

6.	K.H. Asy'ari	Anggota
7.	K.H. Ulil Albab	Anggota
8.	K.H. Musta'in	Anggota
9.	Hj. Nur Saadah	Anggota
10.	K.H. Wahib Ismail	Anggota
11.	K.H. Nawawi Ali	Anggota
12.	Hj. Asiyah	Anggota
DEWAN SYURA		
13.	Drs. K.H. Ali Mahsun, M.Si	Ketua
14.	K.H. Masykuri Abdillah	Wakil Ketua
15.	K.H. Ahmad Said, S.Ag, M.Pd	Wakil Ketua
16.	K.H. Zaenal Muhtarom	Wakil Ketua
17.	K.H. Aminudin	Wakil Ketua
18.	H. Nurul Muttaqin, S.H.I, M.H	Sekretaris
19.	K.H. Maskuri	Wakil Sekretaris
20.	Hj. Siti Choiriyah	Wakil Sekretaris
21.	Drs. Hj. Muawanah	Wakil Sekretaris
22.	K.H. Badawi	Wakil Sekretaris
23.	K.H. Nur Hadi	Wakil Sekretaris
24.	K.H. Nur Wahid	Wakil Sekretaris

25.	K.H. Sri Hadi	Wakil Sekretaris
26.	K.H. Abdullah Zaeni	Wakil Sekretaris
27.	Hj. Maryamah	Wakil Sekretaris
28.	K.H. Ahmad Kholil	Wakil Sekretaris
29.	K.H. Jasmani	Wakil Sekretaris
30.	K.H. Muhammad Salim	Wakil Sekretaris
31.	K.H. Tamziz	Wakil Sekretaris
32.	Uswatun Hasanah	Wakil Sekretaris
DEWAN TANFIDZ		
33.	Zayinul Fata, S.E	Ketua
34.	Ir. H. Edi Sayudi	Wakil Ketua
35.	H. Ghozali, S.Ag	Wakil Ketua
36.	Ulin Nuha, S.Pd.I	Wakil Ketua
37.	M. Syaefudin, S.H	Wakil Ketua
38.	Agus Taufiqurrohman, S.Pd, M.Hum	Wakil Ketua
39.	Hj. Umi Hanik, A.H	Wakil Ketua
40.	Hj. Nur Tamah, S.Pd.I	Wakil Ketua
41.	Drs. H. Sumardi	Wakil Ketua
42.	H. Muhamir, S.E	Wakil Ketua
43.	Abdul Aziz Karim, A.H.I	Sekretaris

44.	H. Syafii Affandi, M.Pd.I	Wakil sekretaris
45.	H. Khoeron Zen	Wakil sekretaris
46.	Eko Musho Sholikhin	Wakil sekretaris
47.	Marzuki, S.E	Wakil sekretaris
48.	Suroso, S.Ag	Wakil sekretaris
49.	Ahmad Rifai, S.Sos.I	Wakil sekretaris
50.	Shofiyul Arif, S.H.I	Wakil sekretaris
51.	Hj. Fajar Malihan Setyorini	Wakil sekretaris
52.	Umroh Setyaningsih	Wakil sekretaris
53.	Masluroh	Wakil sekretaris
54.	Fathurrahman, S.Ag	Wakil sekretaris
55.	Usfiyati	Wakil sekretaris
56.	Khairuman, S.Ag	Wakil sekretaris
57.	Drs. H. Ahmad Rowi	Wakil sekretaris
58.	Hj. Alfanikatul Masruroh	Wakil sekretaris
59.	Agus Salim	Wakil sekretaris
60.	Ahmad Syafiq, S.Pd.I	Wakil sekretaris
61.	Nurun Nafidzah, S.Pd.I	Wakil sekretaris
62.	Kastamah	Wakil sekretaris
63.	Nur Mas'udah	Wakil sekretaris

64.	Muhtar	Wakil sekretaris
65.	Hj. Churun Chalina Silfiya, S.Pd	Bendahara
66.	Hj. Nur Hidayah Fathul Qorib	Wakil bendahara
67.	Maftuhah Mustain	Wakil bendahara
68.	Hj. Sasriah	Wakil bendahara
69.	Hj. Masnur	Wakil bendahara
70.	Abdul Kharis	Wakil bendahara
71.	Nur Fadlan, S.Ag	Wakil bendahara
72.	Hj. Isfi Nadiroh	Wakil bendahara
73.	Rohah	Wakil bendahara
74.	Khullatul Mukaromah	Wakil bendahara
75.	Ijaizah	Wakil bendahara
76.	Sri Tarti	Wakil bendahara
77.	Hj. Mardiyah	Wakil bendahara

Sumber: Sekretariat PKB Demak

BAB IV
ANALISIS REKRUTMEN POLITIK PEREMPUAN PDI PERJUANGAN DAN PKB
KABUPATENDEMAK

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik di Kabupaten Demak, yakni PDI Perjuangan dan PKB dalam merekrut kader perempuan baik sebagai anggota, pengurus partai maupun pejabat public dengan menggunakan teori rekrutmen politik sebagai kerangka teoritis untuk melakukan analisis mendalam dikaitkan dengan temuan-temuan serta pernyataan narasumber pada bab ini dan akan diuraikan mengenai kendala yang dihadapi parpol dalam merepresentasikan perempuan serta kendala dan hambatan yang dirasakan perempuan dalam memasuki dunia politik.

A. Rekrutmen Politik Perempuan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Demak

1. Syarat dan Ketentuan Rekrutmen Perempuan

Dalam melakukan perekrutan, partai politik memiliki kriteria atau persyaratan yang berbeda-beda bagi pelamar yang ingin bergabung dalam partai tergantung ketentuan masing-masing partai. Syarat tersebut seringkali berhubungan dengan ideology ataupun karakteristik partai, secara umum kesamaan ideology dan visi misi setidaknya menjadi syarat pertama seseorang masuk dalam parpol. Adapun Charles F Andrain (2007) menyampaikan bahwa terdapat beberapa kriteria sumber daya yang perlu dimiliki seseorang untuk tampil dalam politik guna mendapatkan kekuasaan, sumber daya tersebut adalah :

- a. Sumber daya fisik yang meliputi alat-alat kekuasaan pemaksa seperti senjata.
- b. Sumber daya ekonomi yang terdiri dari kekayaan, pendapatan, kontrol atas barang dan jasa.
- c. Sumber daya normatif, yang meliputi moralitas, kebenaran, kehormatan, tradisi, religius, legitimasi dan wewenang.
- d. Personal yang meliputi kharisma pribadi (ketokohan), daya tarik, persahabatan, kasih sayang dan popularitas.
- e. Sumber daya keahlian yakni sumber daya politik berupa penguasaan informasi, pengetahuan, keterampilan, intelegensi, serta keahlian teknis.

Berdasarkan AD/ART PDI Perjuangan pada pasal 1 bagian keanggotaan mencantumkan syarat yang dimiliki seseorang untuk direkrut dalam parpol sebagai berikut:

- 1) Syarat untuk menjadi anggota partai
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah menikah.
 - b. Bersedia mematuhi Piagam Perjuangan, Mukadimah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai dan aturan-aturan partai lainnya.
 - c. Bersedia mematuhi dan menegakkan Disiplin Partai.
 - d. Bersedia mengikuti kegiatan Partai sesuai instruksi Partai.
 - e. Bersedia menyatakan diri secara tertulis sebagai Anggota Biasa, dan menyampaikannya kepada Dewan Pimpinan Partai atau melalui Sistem Penerimaan Anggota yang disiapkan oleh DPP Partai.
 - f. Bersedia memenuhi persyaratan administrasi persyaratan lainnya yang telah ditentukan oleh Partai.

Gambar 5. AD/ART PDI Perjuangan



Sumber: Sekretariat PDI Perjuangan

Menurut Richard S Katz dan William Crotty (2014) setidaknya terdapat kriteria untuk menetapkan calon, diantaranya adalah faktor usia dan faktor pendidikan. Faktor usia merupakan hal yang penting dalam menentukan calon karena dengan kecukupan usia seseorang memiliki kematangan dalam berfikir, menganalisa serta memiliki kesiapan menghadapi persoalan, sementara itu pendidikan terkait dengan kualitas calon yang akan direkrut. Dengan memperhatikan pendidikan setidaknya minimal sarjana menjadi kriteria yang dianggap seseorang akan dapat mengetahui serta menyelesaikan masalah-masalah social yang terjadi di dalam masyarakat. Kriteria perekrutan perempuan pada PDI Perjuangan Kabupaten Demak tidak berbeda jauh dengan perekrutan terhadap laki-laki, secara umum calon anggota harus memiliki kesamaan visi misi yang sama untuk bergabung dalam partai.

Sementara itu berdasarkan pernyataan Fahrudin Bisri Slamet selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Demak dalam wawancara pada tanggal 20 Maret 2022, terdapat beberapa kriteria yang dikhususkan bagi seseorang baik perempuan maupun laki-laki yang akan direkrut menjadi pengurus dan calon pejabat publik, kriteria bagi calon pengurus diantaranya adalah telah bergabung dalam parpol minimal 1 Tahun, telah mengikuti proses kaderisasi, memiliki jenjang pendidikan minimal D3, serta memiliki pengetahuan terkait pekerjaan yang akan dikerjakan, adapun bagi calon pejabat selain memiliki kesesuaian dengan peraturan KPU, partai juga memilih kader telah bergabung setidaknya 2 Tahun, memiliki pengalaman politik, memiliki dukungan massa, aktif dalam organisasi baik internal maupun eksternal partai serta memiliki loyalitas terhadap partai. Pada proses perekrutan anggota, partai tidak memiliki syarat khusus bagi calon anggota baru yang ingin bergabung namun pada proses menjadi pengurus dan calon legislative, partai memiliki pertimbangan dalam menentukan apakah calon tersebut layak dan sesuai atau tidak, hal tersebut disampaikan oleh Fahrudin Bisri Slamet selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Demak sebagai berikut :

“kalo untuk kriteria perempuan yang dipilih bakal pengurus dan calon dewan atau kepala daerah itu berbeda dengan syarat bagi anggota biasa, untuk anggota biasanya nggak ada syarat khusus siapapun boleh bergabung asal mau mengikuti aturan partai, tapi nanti ada prosesnya seperti masuk lewat kj, diajak atau seperti apa nanti mereka harus ikut kaderisasi dulu. Kalau untuk pengurus kami selektif melihat karakter calon selama di partai, sehingga kami akan menempatkan pengurus yang benar-benar sesuai dengan kemampuannya sementara untuk

legislative kami mengutamakan kader yang sudah memiliki nama di Demak, memiliki suara banyak. Yang terpenting massanya banyak. Itu biasanya ditempatkan dinomer awal, yang lainnya sebagai pemenuhan keterwakilan perempuan urutan nomernya dibawah. Tapi tiap dapil tetap ada perempuan di urutan 1-3 itu pasti ada” (wawancara pada 20 Maret 2022)

Gambar 6. Foto Dokumentasi Wawancara



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Berdasarkan hasil dari data yang telah diperoleh, syarat ataupun kriteria untuk merekrut anggota, pengurus dan calon pejabat perempuan pada PDI Perjuangan telah diatur dalam AD/ART dan diperjelas dalam peraturan partai. Kriteria yang disampaikan oleh Charles sesuai dengan apa yang dilakukan PDI Perjuangan dalam menetapkan kriteria khususnya bagi calon pejabat public yang menyatakan bahwa “personal yang meliputi kharisma pribadi (ketokohan), daya tarik, persahabatan, kasih sayang dan popularitas” menjadi salah satu sumber daya seseorang tampil untuk memperebutkan kekuasaan politik, hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Fahrudin Bisri Selamat sebagai narasumber yang menyatakan bahwa kriteria calon yang akan diusung oleh PDI Perjuangan untuk menduduki jabatan pemerintahan adalah mereka yang mempunyai nama serta basis massa pendukung. Selain penentuan kriteria yang disampaikan oleh Richard dan Crotty mengenai penetapan usia calon anggota sebagai salah satu kriteria juga digunakan PDI Perjuangan dalam menjaring anggota baru.

Adapun kendala yang dihadapi partai dalam merekrut calon anggota, pengurus, pejabat publik perempuan berdasarkan kriteria tersebut ialah minimnya minat perempuan yang tertarik masuk ke dalam partai politik karena adanya keterbatasan perempuan dalam ranah publik serta ketentuan jenjang pendidikan sebagai salah satu syarat merekrut pengurus ataupun calon pejabat juga salah satu faktor yang menjadi kendala bagi partai merekrut kader perempuan yang sesuai dengan persyaratan menurut AD/ART.

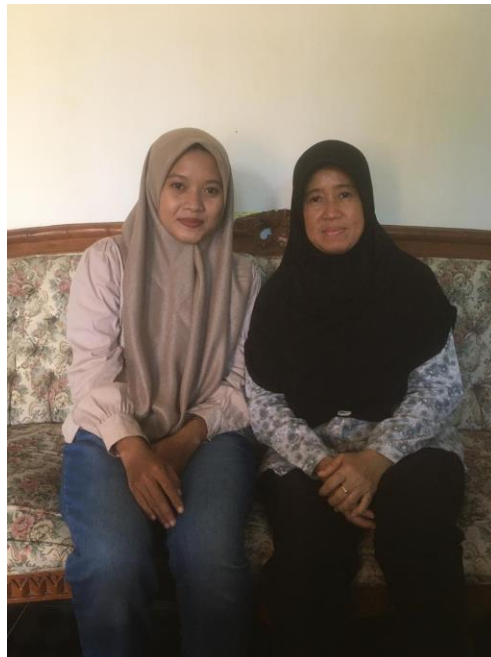
2. Pola Rekrutmen Perempuan PDI Perjuangan Demak

Pola rekrutmen yang dilakukan partai politik merupakan salah satu aspek penting dalam proses perekrutan kader dalam partai. Pippa Norris dan Lovenduski dalam jurnal yang ditulis oleh Anggoro, dkk (2020) mengklasifikasikan pola rekrutmen menjadi dua yaitu pola Vertikal (*merit system*) yakni rekrutmen dilakukan secara hierarki struktural dalam organisasi partai, partai berhak menentukan siapa kandidat yang tepat untuk mengisi jabatan politik yang biasanya didasarkan pada jenjang karir organisasi kandidat. Masa keterlibatan seseorang dalam partai politik akan menjadi pertimbangan dalam proses pemilihan. Pola ini juga didasarkan pada kemampuan, keahlian, serta prestasi yang dimiliki oleh calon pejabat. Kedua, Lateral yakni rekrutmen yang dilakukan terbuka secara umum baik internal maupun eksternal partai. Proses rekrutmen dilakukan secara desentralisasi mulai dari pemilihan kandidat potensial di kepengurusan partai tingkat lokal yang terendah, hingga tingkat yang tertinggi.

Pola rekrutmen bagi calon anggota politik perempuan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Demak bersifat Lateral, atau menurut Rush dan Althoff (2008) pola yang dilakukan PDI Perjuangan dalam merekrut kader perempuan bersifat terbuka yang mana PDI Perjuangan mempersilahkan secara terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung dalam partai. Seperti melalui media digital dan komunitas juang yang dalam prosesnya tidak mendiskriminasikan anggota berdasarkan jenis kelamin, sehingga kesempatan ikut serta dalam partai sangat terbuka lebar. Selain melalui sayap partai seperti Komunitas Juang, beberapa diantara kader juga telah bergabung melalui proses lobbying atau ajakan dari teman. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu kader perempuan yakni Sriyatun selaku kepala Divisi Pemberdayaan Perempuan PDI Perjuangan Kabupaten Demak sebagai berikut :

“proses masuk kedalam partai sangat terbuka bagi siapa saja, saya dulu bergabung karena diajak saudara saya yang sudah lebih dulu masuk kesana jadi awalnya cuma ikut-ikutan saja tapi lama-lama suka terus ikut kegiatan-kegiatan partai sampai sekarang. Ada juga kader perempuan lain yang gabung partai karena ditarik langsung oleh partai ada juga yang dari partai lain pindah ke PDI-P, dia langsung bilang sama pak ketua mau bergabung kemudian dibolehkan mungkin karena dia lebih cocok dengan PDI-P. jadi prosesnya ya terbuka bagi siapa saja boleh bergabung”. (wawancara 17 Maret 2022)

Gambar 7. Foto Dokumentasi Wawancara



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Selain model perekrutan bagi anggota, pola rekrutmen perempuan sebagai pengurus dan juga calon pejabat memiliki corak yang berbeda. Rekrutmen bagi pengurus dilakukan menggunakan konsep rekrutmen Norris dan Lovendunski (2020) yakni pola Vertikal yaitu rekrutmen dilakukan secara hierarki struktural dalam organisasi partai, partai berhak menentukan siapa kandidat yang tepat untuk mengisi jabatan politik yang biasanya didasarkan pada jenjang karir organisasi kandidat. Pada proses penentuan pengurus ini dilakukan melalui proses rapat internal partai dengan menghadirkan tokoh-tokoh penting dalam partai, didalamnya terjadi voting siapa saja yang memiliki peluang untuk menjabat

sebagai pengurus sesuai dengan kemampuannya, kemudian voting terbanyak akan dipertimbangkan dengan kemampuan calon yang dipilih. Setelah itu para kandidat yang telah terpilih akan menjalankan proses verifikasi dan tes untuk menyeleksi kader yang cocok dengan jabatan tersebut. Berbeda dengan proses rekrutmen pengurus perempuan tingkat DPC yang biasanya hanya melibatkan segelintir orang, untuk pengurus PAC dan Ranting biasanya penunjukkan dilakukan melalui instruksi DPC yang kemudian dikembalikan kepada para anggota di sector kecamatan dan Desa untuk mempertimbangkan usulan tersebut.

Sedangkan rekrutmen untuk calon pejabat perempuan di PDI Perjuangan memiliki pola campuran yakni lateral dan merit yang mana proses rekrutmen dilakukan terbuka secara umum baik internal maupun eksternal partai, seseorang yang memiliki ketertarikan dipersilahkan untuk mendaftarkan diri pada proses pencalonan. Selanjutnya sistem merit yang mengandalkan sumber daya sebagai salah satu tolak ukur kemungkinan seseorang diusung juga menjadi landasan PDI Perjuangan dalam proses pemilihan kandidat calon pejabat. Proses rekrutmen dilakukan secara desentralisasi mulai dari pemilihan kandidat potensial di kepengurusan partai tingkat lokal yang terendah, hingga tingkat yang tertinggi. Partai melibatkan seluruh anggota partai untuk ikut serta dalam proses penentuan calon kandidat seperti pada tatanan PAC dan Ranting. Selain pada persoalan voting, dalam merekrut perempuan untuk menduduki jabatan pemerintah, PDI Perjuangan mengajukan perempuan pada tiap dapil untuk ikut serta dalam pertarungan electoral, tiap-tiap dapil memiliki jumlah keterwakilan yang berbeda-beda tergantung jumlah kader yang berada di daerah pemilihan tersebut. hal tersebut disampaikan oleh Anwar selaku staf PDI Perjuangan sebagai berikut :

“partai merekrut kader untuk menjadi pengurus caranya rapat internal di partai mencari yang cocok misalnya mereka yang aktif, pintar serta patuh pada aturan partai. Nanti akan diseleksi siapa-siapa yang telah ditunjuk ada tesnya kayak pemahaman kenegaraan terus tes tentang jobdesk dia nantinya dan lainnya. terus kalo yang calon DPRD itu atau Bupati biasanya harus sesuai dengan AD/ART dan UU yang berlaku. Biasanya partai adakan rapat besar untuk menominasikan nama-nama yang akan dicalonkan, calon-calon itu sebelumnya sudah diberi pendidikan politik secara matang diberi briefing cara-cara kampanye, terus lain-lain nanti sayap partai, structural partai dari atas sampai bawah juga bisa memberi usulan”. (wawancara pada 20 Maret 2022)

Gambar 8. Foto Dokumentasi Wawancara



Sumber: Dokumen Pribadi

Berdasarkan data yang telah diperoleh, corak pola rekrutmen yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Kabupaten Demak dalam merekrut calon anggota, pengurus dan calon pejabat public sesuai dengan konsep rekrutmen yang dikembangkan Norris, yakni adanya sistem merit yang dilakukan partai untuk menjaring pengurus dan calon pejabat public, sementara pola terbuka digunakan untuk merekrut anggota dan bakal calon legislative ataupun calon kepala daerah. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan beberapa narasumber bahwa dalam proses rekrutmen terdapat actor-aktor yang mempunyai peranan penting dalam memilih atau menunjuk kader untuk menduduki suatu jabatan tertentu, selain itu terdapat pola-pola terbuka bagi calon-calon yang ingin bergabung misalnya melalui media digital, ajakan teman, saudara, kerabat ataupun melalui sarana lain yang mana partai mempersilahkan secara lebar bagi siapapun yang ingin bergabung dalam partai.

Model rekrutmen yang dilakukan oleh PDI Perjuangan adalah model yang dikembangkan oleh Michael Rush dan Althoff (2008) yang mana model perekrutan politik terbagi menjadi lima proses yaitu penyediaan dan permintaan, agensi, kriteria, control dan tuntutan. Proses ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan yang mana pada model perekrutan partai menjaring anggota melalui berbagai skema yang kemudian dimasukkan kedalam struktur keanggotaan, bisa menjadi anggota partai baik di daerah maupun desa dan bisa juga sebagai sayap partai. Sehingga tersedianya kader di tiap-tiap dapil mempermudah partai memenuhi kuota afirmatif bagi perempuan pada saat pemilu.

Sementara itu partai sebagai badan agensi akan menetapkan kriteria dalam merekrut kader yang meliputi ciri-ciri dan ketrampilan yang dianggap layak dan harus dikuasai oleh calon pejabat. Kualifikasi-kualifikasi formal yang dituntut dari calon pemegang jabatan tadi diantaranya adalah ketentuan dari agensi ataupun diatur secara sah dalam aturan negara, sehingga kualifikasi tersebut akan memunculkan actor politik dari berbagai latar belakang. Sejauh mana proses rekrutmen tersebut dapat dikontrol juga penting dalam mempengaruhi penyediaan dan permintaan. Pada proses merekrut massa, PDI Perjuangan melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki diantaranya adalah memanfaatkan anggotanya untuk mengajak kerabat ataupun teman-temannya untuk ikut melibatkan diri baik dalam struktur partai di daerah ataupun desa, bergabung dalam sayap partai bahkan menjadi sabet (pendukung calon).

Skema jejaring social juga digunakan partai untuk menyebarkan gema perjuangan partai secara masif baik melalui platform media social maupun web resmi partai. Selain kedua cara tersebut adanya keikutsertaan partai dalam kegiatan kemasyarakatan juga memberi pengenalan kepada masyarakat terkait PDI Perjuangan, dalam kegiatan ini tidak menutup kemungkinan adanya masyarakat yang tertarik untuk bergabung dalam parpol. Hal ini turut disampaikan oleh Fahrudin Bisri Slamet selaku ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Demak yang menyatakan bahwa :

“untuk mencari kader atau merekrutnya, partai melakukan strategi-strategi salah satunya melalui pendekatan ke masyarakat, seperti bagi-bagi sembako, memberi bantuan bagi warga yang mengalami kesulitan, kemarin partai juga membuat acara vaksinasi di beberapa kecamatan di Demak sehingga kegiatan ini diharapkan masyarakat tau oh ini lho partai PDI Perjuangan. Selain kegiatan-kegiatan itu partai juga sering

mendokumentasikan agenda politik dalam media digital, kan ada tim cyber yang nantinya bertugas mengupload kegiatan kita. Ditambah lagi Komunitas Juang yang sekarang sedang aktif merekrut anggota itu juga pengurusnya membuat brosur oprec supaya masyarakat juga tau.” (wawancara pada tanggal 20 Maret 2022)

Setelah partai menentukan kriteria yang sesuai baik yang akan direkrut sebagai anggota, pengurus maupun calon pejabat public. Akan ada mekanisme kontroling yang dilakukan oleh partai untuk melihat loyalitas kader yang dimilikinya. Sehingga model perekrutan seperti ini merupakan salah satu model rekrutmen yang sangat ketat, sehingga kompetensi dan kekuatan kandidat sangat mempengaruhi keterlibatannya dalam politik.

3. Proses dan Mekanisme Rekrutmen Perempuan oleh PDI Perjuangan

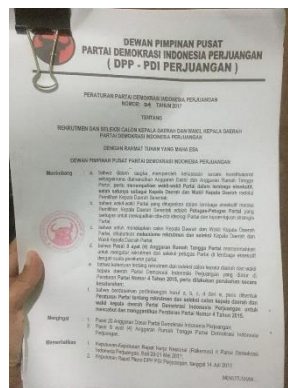
Proses perekrutan dalam partai politik secara umum mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan partai atau tertuang dalam AD/ART yang secara procedural dijelaskan dalam peraturan partai masing-masing DPC (Dewan Pimpinan Cabang). Secara umum menurut Syamsudin haris, dkk (2016) dalam melakukan proses rekrutmen politik secara ideal, partai politik harus memiliki prinsip setidaknya terdapat 10 prinsip yang dapat dijadikan acuan dalam proses perekrutan politik yaitu loyalitas, bersih, transparan, akuntabilitas, meritokrasi, demokratis, desentralisasi, kecukupan pembiayaan, humanis dan non partisan.

Pada proses perekrutan perempuan, secara umum terdapat tiga proses yang dapat dilakukan yaitu proses penjangkaran, penyaringan dan penetapan. PDI Perjuangan dalam melakukan proses perekrutan bagi perempuan tidak secara signifikan tidak memiliki perbedaan terhadap laki-laki, pertama-tama partai melakukan penjangkaran dalam merekrut anggota, yang kemudian dibentuk badan khusus sebagai panitia perekrutan yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan, dilanjutkan dengan dilaksanakannya pelatihan-pelatihan sampai pelantikan atau penetapan anggota baru. Adapun proses perekrutan perempuan sebagai pengurus, dimulai dari penjangkaran yang pada prinsipnya beberapa anggota partai mengusulkan nama-nama yang akan dinominasikan kemudian dilakukan penyaringan dengan mempertimbangkan kemampuan kandidat melalui metode voting di dalam rapat inti pengurus dan anggota partai dan terakhir adalah penetapan. Sementara itu terkait proses perekrutan calon pejabat, pertama-tama dilakukan penjangkaran di tiap-tiap dapil

dengan mencari kader yang dianggap layak dan sesuai dengan kriteria yang dicari partai, selanjutnya dibentuk badan penyeleksi dan kampanye yang dinamakan BP Pemilu atau Badan Pemenangan Pemilihan Umum tingkat DPC. Pada proses ini BP Pemilu akan melakukan pengecekan data-data calon sebagai kelengkapan administrative dalam mengikuti pemilu, selanjutnya penetapan calon yang telah memenuhi syarat didaftarkan ke KPU yang kemudian menjadi Daftar Calon Tetap.

Kemudian mekanisme dalam rekrutmen politik dapat diartikan sebagai cara-cara yang dilakukan partai dalam menjaring kader baik cara formal maupun non-formal. Mekanisme yang dilakukan PDI Perjuangan dalam merekrut perempuan sebagai calon anggota partai dan calon pejabat publik bersifat terbuka, dimana platform digital menjadi faktor kunci dalam merekrut calon anggota, media digital seperti Instagram, facebook dan website resmi digunakan partai untuk menjaring massa, selain media digital, faktor hubungan personal juga merupakan salah satu cara yang digunakan partai untuk merekrut anggota, partai melibatkan seluruh anggota yang telah bergabung untuk mengajak teman, kerabat atau keluarga dalam partai. Adapun mekanisme yang dijalankan PDI Perjuangan dalam merekrut perempuan sebagai pengurus partai bersifat semi tertutup, artinya dalam proses ini terdapat tokoh-tokoh yang mempunyai peran kunci dalam memilih kandidat. Tidak semua anggota terlibat dalam proses pemilihan pengurus, cara-cara seperti penunjukkan dan patronase menjadi cara yang biasanya terjadi dalam partai. Sehingga kader ataupun anggota yang memiliki kedekatan ataupun hubungan kekerabatan dengan pimpinan partai memiliki potensi menjadi pengurus partai baik ditingkatkan DPC, PAC maupun Ranting.

Gambar 9. Peraturan Partai mengenai Mekanisme Rekrutmen



Sumber: Sekretariat PDI Perjuangan Demak

Sistem merit juga digunakan partai dalam merekrut perempuan, partai akan melihat kemampuan kader yang berkualitas untuk dipilih menjadi pengurus yang secara lengkap mekanismenya tertera dalam AD/ART partai, sementara kedekatan seseorang dengan penguasa partai atau relasi yang dimiliki seseorang terhadap actor yang memiliki pengaruh di dalam suatu partai sangat menentukan terjadinya keterpilihan calon pengurus tersebut yang selanjutnya dilakukan mekanisme voting guna menentukan calon-calon yang telah terpilih menjadi pengurus partai. Mekanisme yang digunakan PDI Perjuangan sesuai dengan teori yang dipaparkan Rush dan Althoff (2008) bahwa terdapat dua cara yang lazim digunakan dalam perekrutan politik pertama cara tertutup, yang mana rekrutmen dilakukan oleh elit partai dengan memilih siapa saja calon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya untuk memimpin. Kedua, cara terbuka yaitu partai memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih siapa saja yang bakal menjadi calon pemimpin serta membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi masyarakat yang ingin bergabung dalam partai.

Selain menggunakan cara terbuka dan tertutup, mekanisme lain yang di gunakan PDI Perjuangan dalam merekrut perempuan sebagai calon anggota, pengurus serta calon pejabat ialah dengan cara seleksi, sortir, hubungan personal dan juga koopsi. Penyeleksian PDI Perjuangan dalam merekrut perempuan dilakukan dengan melihat kemampuan serta potensi yang dimiliki calon, penyortiran sebagai upaya memilih calon yang sesuai dengan kebutuhan partai, umumnya proses seleksi dan sortir dilakukan PDIP Perjuangan untuk memilih pengurus, melalui hubungan personal seseorang dengan pimpinan partai juga merupakan cara yang dilakukan individu ikut serta dalam politik khususnya memasuki partai politik, dan koopsi juga menjadi salah satu cara yang umum dilakukan PDI Perjuangan dalam merekrut kader perempuan. Secara umum menurut Rush dan Althoff (2008) setidaknya terdapat dua cara yang dilakukan partai politik dalam melakukan rekrutmen yakni seleksi pemilihan melalui ujian dan latihan, selain kedua cara tersebut terdapat juga beberapa cara seperti penyortiran, sistem pilih kasih, perebutan kekuasaan, patronase, memunculkan pemimpin alamiah dan seleksi melalui koopsi. Beberapa mekanisme yang dilakukan PDI Perjuangan dalam merekrut calon kader sama seperti

cara-cara yang dikembangkan Rush dan Althoff, seperti cara seleksi yang dilakukan untuk merekrut calon pengurus dan calon pejabat public melalui beberapa ujian dan tes, penyortiran sebagai upaya menjaring calon anggota, pengurus dan pejabat, hubungan personal dan koopsi dilakukan sebagai cara memperoleh kekuasaan sebagai pengurus partai.

4. Tahapan Rekrutmen

Pada tahapan merekrut perempuan dalam parpol baik sebagai anggota, pengurus maupun calon pejabat public, PDI Perjuangan Kabupaten Demak menggunakan metode campuran yakni dilakukannya proses penjaringan, verifikasi, seleksi dan penetapan sebagai berikut :

a. Tahap penjaringan

Dalam melakukan proses penjaringan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, PDI Perjuangan memanfaatkan berbagai sumber yang ada untuk merekrut kader perempuan baik sebagai anggota, pengurus ataupun calon legislative. Pada tahap ini partai akan mencari calon yang terbagi berdasarkan daerah pilihan sehingga nantinya jika masa pemilu datang partai akan mencalonkan kader yang berasal dari daerah masing-masing yang mana kesamarataan jumlah tidak akan menjadi kendala lagi di kemudian hari ketika pada tahap ini partai melakukan rekrutmen secara merata.

Kemudian tahap penjaringan calon pengurus, partai mengusulkan beberapa nama untuk ditempatkan dalam posisi tertentu dalam parpol kemudian diambil suara mayoritas. Sedangkan untuk menjaring calon pejabat public, partai melihat kelayakan kandidat yang akan diusung berdasarkan kualitas, massa, finansial, keaktifan dan ketenaran.

b. Tahap verifikasi

Setelah tahap penjaringan dilakukan, tahapan selanjutnya dalam proses rekrutmen PDI Perjuangan adalah tahap verifikasi. Calon anggota yang telah terdaftar akan diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan misalnya dinyatakan sehat, tidak memiliki perkara pidana, alamat tempat tinggal jelas dan lain sebagainya. Pada tahap ini calon anggota baru juga akan ditanyai seputar

pengalamannya, alasan ingin bergabung, latar belakang pendidikan dan pertanyaan lain yang berkaitan dengan proses politik.

Rekrutmen bagi calon pengurus dan calon pejabat pada tahap verifikasi adalah proses dilakukannya pemeriksaan berkas-berkas yang dibutuhkan seperti kesanggupan untuk mengikuti aturan partai, surat keterangan catatan kepolisian, surat pernyataan lulus kaderisasi yang dilakukan partai dan lain sebagainya serta telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam AD/ART maupun UU sebagai calon pengurus atau calon pejabat public.

c. Tahap seleksi

Setelah menetapkan calon-calon yang terpilih akan mengikuti proses seleksi, pada tahap ini seleksi yang dilakukan pada setiap kategori mempunyai metode yang berbeda. Misalnya untuk calon anggota partai, seleksi yang dilakukan adalah melalui wawancara yang sebelumnya dilakukan pada tahap verifikasi, setelah itu calon anggota akan diberikan kesempatan untuk mengikuti proses kegiatan dalam parpol seperti mengikuti kegiatan-kegiatan yang diinstruksikan oleh partai, ikut serta membantu kader yang membutuhkan bantuan, maka akan terlihat mana calon anggota yang aktif dan pasif. Sehingga hal inilah yang nantinya akan menjadi keputusan selektif bagi actor politik dalam menentukan kelayakan seseorang menjadi anggota parpol.

Untuk kepentingan internal, partai politik butuh kader-kader yang berkualitas, karena dengan kualitas kader yang dimiliki akan mampu membawa partai ke arah yang lebih baik serta memiliki peluang untuk mencalonkan kadernya ke dalam persaingan nasional. Menurut Ranney (dalam Katz & Crotty, 2014) seleksi merupakan proses memutuskan nama orang-orang yang secara hukum layak memegang jabatan electoral sebagai calon atau daftar yang direkomendasikan dan didukung oleh partai yang mengusung.

Sementara itu sebagai calon pengurus partai, tahap seleksi yang dilakukan ialah tes lisan dan tes tulis, tes lisan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh kualitas kandidat yang akan memegang jabatan sebagai pengurus partai, serta tes tertulis sebagai bentuk skema matematis untuk melihat kemampuan pengetahuan kandidat baik persoalan partai maupun jobdesk yang akan

ditempati. Tidak berbeda dengan seleksi calon pengurus partai, bagi calon pejabat seleksi yang dilakukan partai adalah dengan cara uji kompetensi. Pelatihan dan pendidikan politik yang telah diberikan kepada kader akan diujikan melalui tes.

d. Tahap penetapan

Setelah melalui tahap-tahap diatas, yang terakhir dalam proses perekrutan adalah tahap penetapan. Pada tahap ini calon anggota yang telah lulus seleksi akan ditetapkan menjadi anggota baru dan akan dilantik dihadapan seluruh kader partai. Proses ini juga termasuk pengenalan kader baru, penempatan anggota baru dalam divisi dan secara formal masuk dalam structural keanggotaan partai. Selanjutnya bagi pengurus setelah lolos dalam proses seleksi, akan diumumkan siapa yang akan menjadi pengurus dan bagi calon pejabat public, nama-nama yang telah terpilih akan diajukan ke KPU untuk di daftarkan menjadi Daftar Calon Tetap yang kemudian akan dipertarungkan pada saat pemilu.

Dalam proses kontestasi pemilu, setelah partai menetapkan calon-calon yang dianggap tepat untuk diusung, daftar calon tersebut akan di serahkan ke KPU untuk didaftarkan menjadi peserta pemilu dan tercatat dalam DCT, selanjutnya pada proses penomoran terhadap perempuan, PDI Perjuangan menggunakan sistem *zipper* sebagai salah satu upaya meningkatkan suara perempuan di pemilihan umum, sistem yang digunakan adalah penomoran secara selang-seling. Nomor urut 1 sampai 3 harus ada keterwakilan perempuan di tiap-tiap dapil, kandidat perempuan yang sudah memiliki nama ataupun banyak massa memiliki kemungkinan untuk ditempatkan pada nomor 1, selanjutnya nama-nama calon perempuan yang memiliki sedikit massa akan ditempatkan secara acak setelah nomor urut 3 dengan skema selang-seling. Misalnya terdapat 8 kandidat di Dapil A yang terdiri dari 5 Laki-Laki dan 3 Perempuan, jika terdapat perempuan yang memiliki banyak massa akan ditempatkan di nomor urut 1 atau 2. Jika tidak ada perempuan yang mempunyai banyak dukungan massa di daerah tersebut, maka akan ditempatkan pada nomor urut 2 atau 3 kemudian dilanjutkan penomoran secara selang seling antara perempuan dan laki-laki dengan perbandingan 1:2.

Berdasarkan teori rekrutmen perempuan yang dikembangkan oleh Pippa Norris bahwa dalam melakukan proses rekrutmen politik terdapat tiga tahapan yakni tahap sertifikasi, tahap nominasi dan tahap pemilihan umum, PDI Perjuangan mengadopsi teori rekrutmen yang dikembangkan oleh Pippa Norris yang kemudian disesuaikan dengan model tahapan lain secara lengkap dimulai dari tahap penjangkaran, verifikasi, seleksi, dan penetapan calon. Karena teori Norris lebih menjelaskan mengenai perekrutan bagi calon pejabat public, tidak menjelaskan secara rinci mengenai tahapan-tahapan dalam merekrut anggota dan pengurus, sehingga tahap sertifikasi, nominasi dan pemilihan umum digunakan PDI Perjuangan dalam merekrut calon pejabat public.

5. Seleksi dan Kaderisasi Perempuan di DPC PDI Perjuangan Demak

Menurut Ranney (dalam Katz & Crotty, 2014) seleksi merupakan proses memutuskan nama orang-orang yang secara hukum layak memegang jabatan electoral sebagai calon atau daftar yang direkomendasikan dan didukung oleh partai yang mengusung. Seleksi dalam proses rekrutmen merupakan aspek penting dalam menentukan calon-calon yang akan menjadi kader partai. Baik tidaknya kualitas kader, tergantung pada proses seleksi yang dilakukan partai dalam merekrut calon kadernya baik sebagai anggota, pengurus maupun calon pejabat public. Secara teori menurut Rahat dan Hazan (2016) seleksi kandidat berjalan linear dari yang bersifat inclusive (melibatkan semua pihak) ke exclusive (berpusat pada pimpinan partai) dan yang paling ideal dalam rekrutmen politik adalah yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan sebagai penentu dari seleksi kandidat.

Teori tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan PDI Perjuangan dalam melakukan proses seleksi dalam merekrut perempuan, yang mana dalam internal partai, dibentuk beberapa tim sebagai petugas seleksi yang terdiri dari Ketua Harian, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan, Wakil Ketua Bidang Hukum, Wakil Ketua Bidang Kelembagaan, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan kesekretariatan ataupun anggota biasa juga kerap diikutsertakan sebagai tim seleksi diantaranya adalah dalam proses perekrutan anggota dan calon pejabat public, yang selanjutnya tim seleksi akan melakukan skema untuk menyaring calon, kemudian mengumumkan nama-nama calon yang telah lolos dan menyerahkan laporan tersebut kepada pimpinan untuk diterbitkan surat keputusan.

Sementara itu perekrutan bagi calon pengurus, tim seleksi terdiri dari elit partai yang memiliki kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan.

Tidak ada proses seleksi yang secara khusus diatur oleh PDI Perjuangan dalam merekrut anggota perempuan baru, namun untuk merekrut calon perempuan sebagai pengurus dan calon pejabat public disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan mayoritas partai, diantaranya adalah melakukan seleksi terhadap perempuan yang memiliki potensi menjabat sebagai pengurus untuk diajukan, dan mengusulkan figure-figure perempuan yang memiliki kualitas serta kemampuan sebagai calon yang akan diusung menjadi wakil rakyat di setiap daerah pilihan.

Setelah seseorang berhasil melawati proses seleksi kedalam partai, seseorang akan melakukan beberapa proses yang disebut kaderisasi untuk memberikan pemahaman serta pengetahuan dalam partai yang ditentukan oleh internal partai. Kaderisasi dapat dikatakan baik apabila menggunakan tiga prinsip yaitu terbuka, non diskriminatif dan berjenjang. Pertama kaderisasi dilakukan secara terbuka, artinya dapat diikuti oleh semua anggota partai, anggota memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan ataupun pelatihan dalam kaderisasi. Proses ini haruslah bersifat demokratis, baik anggota internal, pengurus, maupun anggota sayap partai sudah semestinya mendapatkan pemahaman kaderisasi yang sama mengenai kepartaian. Kegiatan ini juga menjadi salah satu cara melatih skill kader dan menggali potensi yang dimiliki, proses kaderisasi juga harus memunculkan pengajaran persaingan yang sehat dan transparan, sehingga hal ini dapat membiasakan kader mampu bersaing secara baik di dalam arena politik, dengan diterapkannya nilai-nilai persaingan yang bebas dari kolusi ataupun nepotisme akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang baik di masa depan.

Kedua non-Diskriminatif, artinya sama dengan prinsip terbuka, prinsip ini mencerminkan bahwa dalam proses kaderisasi partai tidak membeda-bedakan golongan diantara anggota seperti perbedaan warna kulit, golongan, agama, gender, serta suku. Ketiga, berjenjang. Artinya kaderisasi harus dilakukan secara sistematis, bertahap, atau piramidal melalui skema terus-menerus yang didasarkan pada model pelapisan bertahap seperti pelatihan tingkat dasar, menengah atau lanjutan (Haris dkk, 2016). Di dalam PDI Perjuangan terdapat jenjang pengkaderan yang dapat diikuti oleh kader laki-laki maupun perempuan yang tertuang dalam AD/ART partai sebagai berikut:

a. Pratama

Yaitu proses kaderisasi yang dilakukan oleh partai di tingkat paling bawah, yaitu DPC. Proses ini termasuk tingkat kaderisasi yang bersifat dasar, pelaksanaannya mengikuti instruksi dari DPP atau DPD. PDI Perjuangan melakukan kaderisasi tingkat Pratama bagi kadernya di tingkat DPC, yang memberikan proses kaderisasi adalah DPD, sehingga seluruh proses dijalankan DPC hanya mengikuti proses yang telah ditentukan. Kaderisasi Pratama dapat dilaksanakan secara mandiri ataupun gabungan. Artinya kaderisasi secara mandiri yaitu DPC yang melaksanakan kegiatan seperti pendidikan politik, dan sarasehan sementara itu gabungan dapat diartikan sebagai proses kaderisasi yang dilakukan dengan gabungan Kabupaten atau Kota lain, biasanya dikelompokkan berdasarkan karesiden.

Kaderisasi Pratama menekankan pada aspek internalisasi ideologi, visi dan misi Partai, proses ini bertujuan untuk membangun budaya dan konsolidasi kepada calon kader. Selain internalisasi nilai-nilai partai politik, pada pendidikan tingkat pratama, seorang calon kader di bekali pengetahuan mengenai ketrampilan manajerial dan tata kelola partai yang bersifat sederhana. Kaderisasi pada tingkat pratama dilakukan juga pelatihan tentang masalah kepemimpinan, strategi pemenangan pemilu, komunikasi dengan media dan juga public speaking yang bersifat sederhana dalam mempengaruhi citra PDIP di lingkungan masyarakat.

b. Madya

Kaderisasi yang dilakukan oleh partai di tingkat menengah. Kaderisasi ini dilakukan oleh partai di tingkat provinsi. Kaderisasi pada tingkat madya dirancang untuk menghasilkan pengurus partai di tingkat provinsi. Pada kaderisasi jenjang madya para kader lebih banyak dibekali ketrampilan terkait dengan pemenangan pemilu seperti ketrampilan komunikasi politik, kepemimpinan, komunikasi interpersonal, mobilisasi massa, keterwakilan politik dan penanganan sebuah masalah dalam proses pembuatan kebijakan. Pada kaderisasi jenjang madya, durasi dan kurikulum modul biasanya lebih detail dengan prosentasi peningkatan kapasitas dan ketrampilan manajerial kader PDIP

terkait pemenangan pemilu, baik di lembaga perwakilan rakyat maupun pemerintahan daerah.

c. Utama

Proses kaderisasi yang dilakukan di tingkat paling atas yaitu DPP. Kaderisasi ini diselenggarakan oleh partai pusat yang ditujukan bagi kader yang akan menduduki posisi tertentu (eksekutif dan legislatif) dalam rangka mewujudkan dan mencapai tujuan partai. Kaderisasi tingkat utama atau yang disebut sekolah partai dilakukan untuk mempersiapkan calon-calon kader berkualitas melalui pemahaman karakter dengan basis ideologis partai guna menempatkan kader di jabatan-jabatan strategis pemerintahan.

Kaderisasi tingkat utama menekankan internalisasi nilai-nilai partai, selain itu juga diberikan pengetahuan mengenai masalah kepemiluan baik yang menyangkut masalah regulasi maupun strategi pemenangan pemilu. Pada pendidikan kader utama juga diberikan pengetahuan manajerial yang menyangkut pemahaman tentang masalah-masalah dan isu-isu pada skala nasional dan global dan mengambil langkah solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pemahaman hal-hal tersebut juga dibarengi dengan peningkatan ketrampilan kader dalam hal komunikasi politik, lobbying, dan kepemimpinan dengan skala yang lebih luas cakupannya ketimbang pendidikan pada tingkat pratama dan madya.

Kaderisasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan sesuai dengan yang prinsip kaderisasi ideal menurut Harris (2016) bahwa dalam melakukan kaderisasi, partai menggunakan jenjang pengkaderan untuk memberikan pemahaman politik bagi kader. Hal tersebut juga disampaikan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Demak Fahrudin Bisri Slamet sebagai berikut:

“kalo proses kaderisasi baik laki-laki maupun perempuan prosesnya sama, tergantung kebutuhan individu, kalo memang ditugaskan mengikuti kaderisasi ya berangkat, kadang di DPD, di pusat juga pernah Jakarta biasanya untuk para pimpinan terus ada beberapa tingkatan, ada pratama, madya, utama. Prosesnya ya dijalankan sesuai instruksi bisa di DPC, DPD bahkan pusat. DPC mengikuti instruksi dari pusat saja, tidak menentu waktunya kapan atau terjadwal setiap saat itu enggak biasanya pra pemilu”. (wawancara pada tanggal 20 Maret 2022)

Gambar 10. Buku Kaderisasi Perempuan PDIP



Sumber: Sekretariat PDI Perjuangan Demak

Sementara itu PDI Perjuangan Demak melakukan proses kaderisasi bagi anggota baru yang dinamai dengan pendidikan politik. Jadwal untuk kegiatan ini tidak dilaksanakan secara terus menerus, artinya partai akan mengadakan pendidikan politik sesuai dengan kebutuhan dan kapabilitas anggotanya. Pelatihan kaderisasi terbagi menjadi beberapa tingkatan yang dimulai dari dasar, menengah, dan lanjutan sebagai bentuk pelatihan dalam membentuk kader-kader yang berpotensi dalam struktur politik baik sebagai anggota maupun nantinya yang akan dicalonkan menjadi pejabat public. Sehingga proses ini merupakan bekal bagi kader untuk mendapatkan pemahaman politik. Sedangkan pengurus dan calon pejabat umumnya juga diberikan kaderisasi yang lebih intens dari anggota biasa, karena partai memberikan dukungan politik bagi mereka-mereka yang akan bertugas. Proses kaderisasi dilakukan secara terbuka, seluruh anggota dapat mengikuti proses ini, umumnya anggota yang baru bergabung ataupun anggota-anggota di dalam sayap partai akan di berikan kegiatan pengkaderan tingkat dasar, sementara untuk anggota lama atau pengurus akan mengikuti kaderisasi pada tingkatan menengah ke atas.

6. Kendala-kendala Dalam Proses Rekrutmen Perempuan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam merekrut kader perempuan, tidak terpenuhinya kuota perempuan dalam partai politik ataupun minimnya keterlibatan perempuan dalam agenda politik disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. Hal tersebut turut terjadi pada PDI Perjuangan Demak yang mengalami beberapa kendala dalam merekrut ataupun melibatkan perempuan dalam agenda politik diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Faktor social budaya

Mayoritas PKB Pandangan bahwa perempuan hanya sebuah obyek yang bekerja dan tinggal di ranah private menjadi salah satu kendala terbatasnya ruang gerak perempuan dalam agenda politik.

b. Faktor agama

Kuatnya ajaran keagamaan islam di Kabupaten Demak memberi implikasi terhadap kurangnya minat perempuan ikut serta dalam proses politik dalam PDI Perjuangan. Salah satu narasumber menjelaskan bahwa karena alasan ideology yang bertolak belakang dengan apa yang mereka anut serta kondisi social ataupun lingkungan yang mayoritasnya adalah islam akan menyulitkan dirinya untuk beradaptasi, tidak jauh berbeda dengan proses keikutsertaan sebagai anggota biasa yang memungkinkan terjadi pergolakan dari tetangga sekitar.

c. Faktor individu

Faktor lain yang menyebabkan partai PDI Perjuangan kesulitan menghadirkan sosok perempuan dalam pergulatan politik secara maksimal disebabkan karena masalah pribadi, diantaranya adalah lingkungan keluarga, terutama persoalan ini menyangkut pencalonan perempuan dalam tatanan pemerintahan baik legislasi maupun eksekutif, dimana suami ataupun keluarga tidak memberikan ijin bagi perempuan untuk terlibat dalam proses pencalonan. Selain itu masalah finansial memicu perempuan untuk tidak andil dalam politik. Keharusan partai menetapkan iuran wajib terhadap setiap kader membuat perempuan enggan untuk ikut serta, tidak hanya iuran pada tahap perempuan dicalonkan, maka setidaknya mereka harus mempunyai finansial yang cukup guna proses kampanye serta mencari dukungan massa.

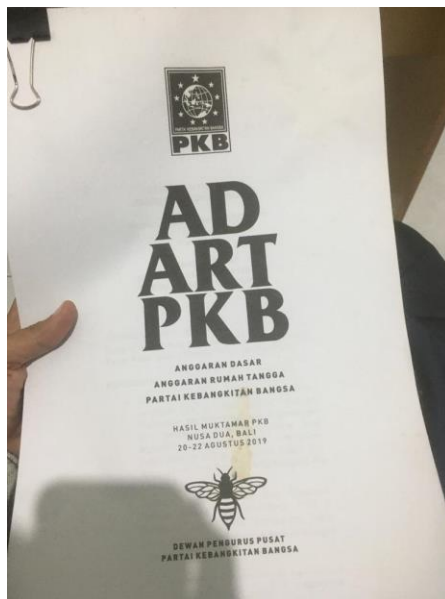
B. Rekrutmen Politik Perempuan DPC PKB Kabupaten Demak

1. Syarat dan Kriteria Rekrutmen Perempuan DPC PKB Demak

Berdasarkan AD/ART PKB menetapkan persyaratan calon anggota diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun.
- b. Bersedia mematuhi Mabda' Siyasi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Partai dan Kebijakan serta Keputusan Partai lainnya.
- c. Bersedia mengikuti kegiatan Partai sesuai Instruksi Partai.
- d. Bersedia mematuhi dan menegakkan Disiplin Partai.
- e. Bersedia menyatakan diri secara tertulis menjadi anggota dan menyampaikannya kepada Dewan Pengurus Partai atau melalui Sistem Penerimaan Anggota yang disiapkan oleh DPP.
- f. Bersedia memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan lainnya yang telah ditentukan oleh Partai.

Gambar 11. AD/ART PKB



Sumber: Sekretariat PKB Demak

Berbeda dengan PDI perjuangan yang tidak memberikan syarat khusus bagi perempuan yang ingin ikut bergabung dalam partai, PKB mensyaratkan anggota yang ingin bergabung haruslah beragama islam dengan kecenderungan Nahdhotul Ulama.

Meskipun dalam AD/ART tidak disebutkan secara jelas mengenai faktor keagamaan yang menjadi salah satu syarat, dalam implementasinya PKB merekrut kader perempuan berdasarkan kesamaan ideology yang dianut. Secara umum perempuan yang direkrut berasal dari organisasi berbasis NU seperti Muslimat, Fatayat dan IPPNU, sementara untuk perekrutan perempuan sebagai pengurus, PKB melihat kader yang memiliki pengalaman, keaktifan, masa keikutsertaan dalam partai serta telah mengikuti berbagai proses kaderisasi atau pendidikan politik, adapun untuk memilih kader perempuan yang akan diusung sebagai calon pejabat, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan usia minimal untuk dapat dicalonkan adalah 21 Tahun, selain itu dalam merekrut calon yang akan diusung, PKB mempertimbangkan kader yang memiliki massa, elektabilitas, pengalaman politik, serta masa keikutsertaan dalam partai.

Berdasarkan data tersebut, kecukupan usia perempuan yang telah cukup umur menjadi salah satu syarat yang ditetapkan partai dalam merekrut anggota. Namun kebanyakan PKB merekrut kader perempuan yang berumur diatas 20 tahun, hal tersebut karena partai mempertimbangkan pengalaman organisasi sebagai salah faktor dalam merekrut calon anggota perempuan, selain itu karena figure yang direkrut merupakan kalangan yang berasal dari mayoritas Fatayat dan Muslimat, sehingga sulit ditemukan usia yang masih muda. Fenomena tersebut memiliki kesesuaian dengan pernyataan William dan Crotty bahwa faktor usia merupakan hal yang penting yang dapat dijadikan salah satu kriteria dalam menentukan calon karena dengan kecukupan usia seseorang memiliki kematangan dalam berfikir, menganalisa serta memiliki kesiapan menghadapi persoalan, sementara itu pendidikan terkait dengan kualitas calon yang akan direkrut. Berkenaan dengan syarat perekrutan calon anggota, PKB mengutamakan perempuan yang berasal dari organisasi afiliasi sebagai kader seperti Fatayat. Sementara kriteria perempuan yang akan dicalonkan oleh PKB dalam ajang pemilu dapat dilihat dari 4 aspek yaitu popularitas, banyaknya massa yang dimiliki, keaktifan dalam partai dan masa bakti atau lamanya masa keikutsertaan dalam partai. Hal tersebut disampaikan oleh Rifqi selaku pengurus PKB Kabupaten Demak sebagai berikut :

“tidak ada syarat khusus bagi perempuan untuk bergabung yang penting punya visi misi sama, artinya karna ini partai islam ya berarti harus beragama islam. Nah kalo milih pengurus ya ada prosesnya seperti usulan, kemampuan orangnya kalo yang dicalonkan biasanya to dilihat massanya, biasanya diambil dari pimpinan-pimpinan jamiyah gitu, terus ya orangnya mau, kalo ragu-ragu paling ya Cuma ikut-ikut aja si biasane”. (wawancara pada tanggal 15 Maret 2022)

2. Pola Rekrutmen Perempuan DPC PKB Demak

Pola rekrutmen perempuan yang dilakukan partai PKB terbilang unik yakni bersifat semi tertutup, Rush dan Althoff (2008) membagi pola rekrutmen politik dalam dua bagian yaitu tertutup dan terbuka. Pola rekrutmen secara tertutup dilakukan oleh elit partai penguasa dalam memilih siapa saja calon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya untuk memimpin, sistem patronase biasanya menjadi pola rekrutmen yang tertutup karena sifatnya yang hanya diketahui segelintir elit penguasa. Sementara pola rekrutmen terbuka memberikan kesempatan masyarakat untuk memilih siapa saja yang bakal menjadi calon pemimpin serta pengumuman hasil pemenang dari kompetisi tersebut dilaksanakan secara terbuka, pola ini biasanya dilakukan melalui ujian-ujian baik tertulis maupun wawancara.

Banyak kader perempuan di PKB berasal dari Fatayat ataupun muslimat. Kader perempuan PKB tergabung dalam salah satu organisasi sayap partai yang dimobilisasi oleh perempuan yaitu Perempuan Bangsa PKB, kemudian untuk merekrut anggota perempuan, PKB memanfaatkan Perempuan Bangsa sebagai organisasi sayap partai dalam menjaring massa perempuan. Umumnya perempuan yang direkrut adalah mereka yang berasal dari organisasi NU, karena kader Perempuan Bangsa mayoritas berasal dari organisasi berbasis NU maka dari itu banyak anggota yang ditarik berasal dari afiliasi yang sama. Hal tersebut di sampaikan oleh Usfiyati selaku pengurus Perempuan Bangsa Kabupaten Demak sebagai berikut :

“dulu waktu saya bergabung sama PKB itu langsung ditunjuk, jadi dari PKB nya langsung yang menghubungi, kan waktu itu saya ketua PAC Fatayat terus kalo ada acara-acara PKB, kayak Fatayat, Muslimat, organisasi-organisasi NU lain gitu dilibatkan jadi diundang ke acara mereka, terus kalo kita bikin acara

juga mereka bantu jadi ada hubungan diantara kita, kemudian saya diminta untuk bergabung partai. Karena saya pikir ideology mereka sama seperti yang saya ikuti ya saya mau dan sampai sekarang saya enjoy di PKB soalnya mereka itu juga ngrumat kita (Fatayat) jadi kita juga nyaman. Saya langsung bergabung sama perempuan bangsa terus partai juga ngasih arahan kalo misalnya orang-orang Fatayat yang sekiranya kok memiliki potensi ya diajak bergabung partai gitu jadi sifatnya ya ditunjuk diajak gitu”. (wawancara pada tanggal 3 Maret 2022)

Selain melibatkan organisasi lain dalam menjaring anggota, sistem kekerabatan juga menjadi salah satu cara masuk ke dalam parpol. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan Masluroh selaku kader PKB yang mana dalam penyampaianya, beliau menuturkan bahwa prosesnya bergabung merupakan turun temurun. Berikut penyampaianya :

“awal tau PKB itu memang dari dulu keluarga ikutnya PKB, dari mbah, bapak sampai saudara-saudara itu ikutnya PKB, waktu bapak meninggal itu banyak dari PKB datang kerumah terus mereka tau aku anaknya bapak jadi sama temen bapak aku diajak ke kegiatan nya PKB terus ditarik disuruh ikut katanya biar ada penerus dari bapak terus di desa sini kan mayoritas PPP jadi setelah bapak gak ada itu kan gak ada yang PKB, jadi aku gabung toh sama juga ajarannya sesuai diriku keluarga juga dukung waktu itu. Jadi gabung malah sebelum ikut muslimat, taunya mendirikan muslimat di desa ini kan karena aku lebih dulu masuk ke PKB jadi disana banyak yang dari muslimat gitu terus kepikiran ngembangin di desa sendiri”. (wawancara pada tanggal 5 Maret 2022)

Gambar 12. Foto Dokumentasi Wawancara



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Berdasarkan data yang telah diperoleh, pola rekrutmen yang dilakukan oleh PKB, memiliki pola semi tertutup, hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa dalam proses perekrutan kader perempuan, PKB tidak secara resmi membuka pendaftaran terhadap semua golongan masyarakat, yang mana dalam prosesnya basis organisasi ke NU-an lebih diutamakan untuk direkrut. Beberapa kader direkrut karena memiliki kedekatan dengan pemimpin partai, beberapa diantaranya ditunjuk karena memiliki popularitas sehingga dianggap mampu mendongkrak elektabilitas partai sesuai dengan Usfiyati yang mengaku direkrut pada saat dia sedang menjabat sebagai ketua PAC Fatayat, sehubungan dengan waktu direkrutnya adalah menjelang masa pemilihan umum.

Selanjutnya cara-cara seperti penunjukkan, pemilihan, penarikan, dan lobbying menjadi cara yang umum dilakukan PKB Kabupaten Demak dalam merekrut kader baik sebagai anggota, pengurus maupun calon pejabat. Sehingga pada proses rekrutmen yang dilakukan cenderung memiliki pola yang tertutup karena terdapat beberapa actor politik yang berperan menentukan keputusan terhadap calon-calon yang akan direkrut. Model perekrutan perempuan yang dilakukan oleh PKB mengikuti model Barber yang mana dalam proses ini menggunakan 3 metode yaitu motivasi, sumber daya dan kesempatan. Calon kandidat yang memiliki potensi diberi motivasi untuk bergabung dengan partai khususnya ikut serta mengikuti pemilu. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Uswatun Khasanah selaku anggota PKB yang juga ikut mencalonkan diri dalam pemilu 2019 lalu sebagai berikut :

“ waktu kemaren nyalon itu sebenarnya takut mbak, kayak tetangga-tetangga sini toh bilang perempuan nyalon dpr bla bla bla gitu kan jadinya agak pesimis, terus pas diundang ditawari pokoknya dari sananya bilang saya mau diusung gimana, saya kaget waktu itu wong gapernah aktif belum paham politik itu bagaimana pokoknya enggak yakin. Terus dari merekanya bilang gak papa dicoba aja nanti ada yang dampingi, diajari sekaligus belajar tambah pengalaman gitu yaudah saya setelah dirayu ini dan itu akhirnya bismillah saya bersedia jadi ini pengalaman pertama saya ikut nyaleg” (wawancara pada tanggal 7 Maret 2022)

3. Proses dan Mekanisme Rekrutmen Perempuan PKB Kabupaten Demak

Dalam proses perekrutan calon anggota perempuan, PKB melakukan penjangkaran melalui organisasi sayap partai serta anggota internal. Organisasi sayap partai yang dimaksud ialah organisasi afiliasi partai khususnya adalah organisasi yang memiliki basis ideology Nadhliyin atau Nahdlotul Ulama. Diantara organisasi perempuan yang menjadi sasaran partai dalam menjangkaring kader adalah Muslimat dan Fatayat, seringkali pada kegiatan yang dilaksanakan PKB melibatkan perempuan dari organisasi-organisasi tersebut, sehingga hubungan antar personal maupun keorganisasian menjadi erat, selain itu kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perempuan NU juga didukung penuh oleh partai, tidak jarang PKB memberikan sumbangan dana untuk kegiatan operasional organisasi tersebut. Hal tersebut memunculkan hubungan yang erat sehingga dalam proses perekrutan, PKB mengutamakan perempuan-perempuan yang tergabung dalam Fatayat atau Muslimat dengan melihat kemampuan calon, potensi, popularitas serta pengaruh massa yang dimiliki untuk kemudian direkrut dalam partai. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan Rifqi selaku pengurus PKB Kabupaten Demak sebagai berikut :

“partai itu ngerekrut kader perempuan lewat organisasi-organisasi NU mbak, kayak Fatayat, Muslimat. Kebanyakan kader perempuan disini juga bagian dari Fatayat Muslimat, biasanya ya proses perekrutan dari situ, ada yang diajak temennya, ditunjuk langsung”. (wawancara pada tanggal 15 Maret 2022)

Gambar 13. Foto Dokumentasi Wawancara



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Berdasarkan data tersebut, proses perekrutan perempuan oleh PKB memiliki sifat Top Down, yang Menurut Said Gatara dan Dzulkiah Said (2007) sifat rekrutmen Top Down merupakan sistem perekrutan yang dilakukan berasal dari atas atau dari orang-orang yang menjabat. Sifat ini misalnya adalah penunjukan pribadi dan seleksi pengangkatan. Selanjutnya pada proses perekrutan pengurus dan calon pejabat public, proses penyaringan dilakukan oleh pimpinan partai untuk menominasikan calon-calon yang direkrut benar-benar memiliki kompetensi sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan yang setelah partai melakukan proses penyaringan, proses terakhir ialah penetapan calon-calon yang telah dinominasikan. Berdasarkan karakteristik yang dikemukakan oleh Czudnowski dalam buku Fadillah Putra (2002) menyatakan bahwa dalam proses rekrutmen politik terdapat proses rekrutmen yang sifatnya tertutup yaitu adanya kesempatan yang terbatas atau tidak sama bagi tiap-tiap individu untuk masuk dalam parpol, artinya hanya individu tertentu yang dapat menduduki jabatan politik atau ikut serta dalam proses politik. Teori tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan oleh PKB dalam melakukan proses rekrutmen yang cenderung memiliki sifat tertutup yakni terdapat organisasi mayoritas sebagai agen penyalur actor ke dalam unsur partai politik, sehingga bagi orang luar sangat sulit masuk ke dalam partai jika tidak memiliki hubungan personal dengan internal partai.

Adapun mekanisme dalam perekrutan kader perempuan yang dilakukan oleh PKB adalah dengan menggandeng Perempuan Bangsa sebagai organisasi sayap partai dengan memberikan instruksi untuk menjaring kaum perempuan yang ada di lingkungan sekitar, baik kerabat maupun teman dapat diajak bergabung. Dalam melakukan rekrutmen setidaknya terdapat 4 aspek yang menurut Barbara Geddens (dalam buku Haris, dkk 2016) dapat dijadikan pedoman dalam memilih serta menentukan calon yaitu:

- a. Partisanship, yaitu mendasarkan diri pada loyalitas pada partai.

- b. Meritokrasi, partai merekrut calon berdasarkan pada kompetensi yang dimiliki.
- c. Kompartemenisasi, perekrutan didasarkan pada keahlian yang dikuasai calon.
- d. Survival, berdasarkan balas jasa dan berdasarkan sumber daya.

Secara ringkas, beberapa mekanisme yang dilakukan PKB dalam merekrut kader perempuan diantaranya adalah melalui penunjukkan, penarikan, lobbying dan patronase. PKB menunjuk calon perempuan yang memiliki kekuatan di dalam organisasinya, misalnya ketua Fatayat PAC dianggap mempunyai kepercayaan atau legitimasi dari anggota kelompoknya sehingga memiliki cukup dukungan massa disektor kecamatan, terlebih lagi hubungan antara PKB dengan organisasi ke Nu-an sehingga proses penunjukkan kerap menjadi salah satu cara PKB merekrut perempuan baik sebagai anggota maupun calon pejabat berbeda dengan calon pengurus yang mana PKB mempertimbangkan masa keikutsertaan dan keaktifan perempuan dalam partai sebagai salah satu indikator pemilihan, penarikan tidak berbeda jauh dengan penunjukkan proses ini juga dilakukan dengan skema sama, lobbying umumnya didasarkan atas kedekatan ataupun relasi yang dimiliki seseorang dengan actor di dalam partai politik sehingga terjadi proses perekrutan perempuan melalui actor tertentu yang memiliki pengaruh dalam partai, kemudian cara patronase juga masih kental dijumpai di dalam partai PKB, model mutual antara calon anggota dan tokoh pemimpin yang memiliki kekuatan di dalam internal partai juga salah satu cara yang dilakukan dalam proses perekrutan perempuan.

Selain itu aspek yang dijelaskan oleh Barbara Geddens juga memiliki kesamaan dengan mekanisme perekrutan oleh PKB, kompartemenisasi menjadi salah satu cara yang digunakan PKB memilih calon, dilihat dari kompetensi yang dimiliki, umumnya aspek ini digunakan partai dalam merekrut pengurus serta calon pejabat public. Sementara aspek survival telah menjadi “taman rahasia” dalam internal partai, beberapa narasumber menyatakan bahwa karena kebutuhan elektabilitas yang tinggi, partai merekrut anggota yang memiliki sumber daya potensial dalam mendukung suara partai khususnya perihal pencalonan legislative, selain itu terjalinnya hubungan partai dengan donatur luar ataupun pemimpin di masa lalu memungkinkan partai

merekrut anggota yang berasal dari keluarga tersebut karena adanya prinsip balas jasa.

4. Tahapan Rekrutmen

Berbeda dengan PDI perjuangan yang memiliki prosedur ketat dalam proses penjarangan kader, PKB melakukan proses rekrutmen baik sebagai anggota, pengurus maupun calon pejabat public berdasarkan perundingan internal partai yang mana perempuan yang memiliki kemampuan mempengaruhi seseorang atau kelompok akan ditunjuk untuk bergabung dalam parpol, umumnya adalah mereka yang berasal dari organisasi seperti Fatayat dan Muslimat dan memiliki kedudukan yang penting misalnya seorang ketua. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Uswatun Khasanah selaku anggota PKB Kabupaten Demak sebagai berikut :

“nek proses masuknya itu kebanyakan ditunjuk dek, kaya ibu waktu itu kan diajak sekali tok sama temen dari Fatayat ikut kegiatan mereka, terus udah lama ga ikut-ikut, tiba-tiba dikontak sama pimpinan dari PKB nya disuruh ikut kegiatan, terus datang kesana dikasih tau ini itu intinya mereka mau ibu ikut gabung gitu lah pokoe, akhirnya saya dicalonkan. Siapin berkas-berkas ngelengkapin data, terus bimbingan kesana-sana, ada pendampingan juga dari PKB menjelang pemilu itu sampai pencalonan hari H.” (wawancara pada tanggal 7 Maret 2020)

Gambar 14. Foto Dokumentasi Wawancara



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Tidak ada tahapan rekrutmen yang secara khusus ditetapkan PKB dalam menjaring anggota baru karena proses yang dilakukan kebanyakan adalah penunjukkan ataupun ajakan. Tidak ada pendaftaran secara resmi sedangkan tahapan untuk menjadi pengurus partai, akan dilihat dari bagaimana kualitas kader tersebut dan secara formal dilakukan pengecekan berkas, sedangkan tahapan rekrutmen yang dilakukan PKB dalam mengusung kadernya menduduki jabatan legislative adalah dengan menggunakan tahapan rekrutmen yang dikembangkan Norris (2016) yakni terdapat 3 tahapan yaitu sertifikasi, nominasi dan pemilihan umum sebagai berikut :

a. Tahap sertifikasi

Tahap ini merupakan awal dari sebuah rekrutmen, pada tahap ini partai akan melakukan penyeleksian terhadap kandidat mencakup kriteria yang sesuai dengan partai, aturan internal partai, aturan pemilihan, dan norma-norma sosial. Pada tahap ini partai akan mengusulkan beberapa nama kader-kadernya yang memiliki potensi untuk melenggang ke arena pemilu berdasarkan kualitasnya. Kemudian mensyaratkan kadernya untuk melengkapi data-data administratif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan juga diselenggarakan *Fit dan Proper Test* atau tes yang dibuat oleh partai sebagai cara mencari kader yang benar-benar memiliki pengetahuan mencakup pengetahuan umum, keahlian, kepemimpinan, strategi pemenangan dan ke PKB-an.

b. Tahap nominasi

Pada tahap ini partai akan memilih dan menentukan terhadap kandidat yang telah diusung oleh beberapa actor untuk dijadikan pejabat public sesuai dengan kemampuan yang dimiliki kandidat, seperti elektabilitasnya di dalam masyarakat, tingkat kepercayaan public, kemampuan dalam birokrasi dan lain sebagainya. Setelah kandidat lolos sertifikasi maka akan ada tahap nominasi sebagai upaya mencari dukungan massa.

c. Tahap pemilihan umum

Tahap selanjutnya berkaitan dengan proses pemilihan, yang umumnya berkaitan dengan bagaimana cara memilih, siapa yang dilibatkan

untuk memilih, dan bagaimana cara menentukan siapa yang akan menang. Setelah kader yang telah dinominasikan mayoritas anggota akan dicalonkan, didaftarkan ke KPU dan kemudian akan mengikuti kontestasi pemilu

Selain tahap-tahap tersebut, syarat yang mewajibkan parpol untuk memenuhi kebijakan affirmative yakni harus menyertakan keterwakilan perempuan sebanyak 30 % dalam mengikuti pemilihan umum juga menjadikan upaya pencalonan secara paksa harus dilakukan guna memenuhi persyaratan tersebut. hal tersebut disampaikan oleh Usfiyati selaku pengurus PKB sebagai berikut :

“pemilu kemaren (2009) itu saya dicalonkan, padahal saya dari awal memang tidak mau tapi karena keharusan partai mengajukan perempuan jadi yasudah saya dicalonkan. Karena dari awal memang tidak ada unsur benar-benar mau nyalon jadi kampanye nya ya ngga masif, biasa saja paling sodara-sodara, sowan ke pimpinan-pimpinan, kyai, tetangga terus tokoh masyarakat yang berpengaruh gitu aja.” (wawancara pada tanggal 3 Maret 2022)

Selanjutnya setelah kandidat perempuan ditunjuk dan diusung sebagai calon pejabat public, nama-nama yang telah terpilih disetorkan ke KPU untuk didaftarkan menjadi Daftar Calon Tetap dari PKB, selanjutnya memasuki pemilu, PKB menggunakan sistem kuota dan *zipper* dengan perbandingan 1:3 yakni, PKB menempatkan 1 kader perempuannya pada nomor urut 1 sampai tiga, biasanya calon yang memiliki potensi baik secara kemampuan maupun massa akan ditempatkan pada nomor 2 dan 3, kemudian untuk perempuan lain akan ditempatkan di urutan nomor bawah.

5. Seleksi dan Kaderisasi Perempuan di DPC PKB Demak

Dikarenakan sifatnya yang semi tertutup, berkenaan dengan seleksi, PKB tidak menjelaskan secara rinci mengenai seleksi bagi perempuan baik sebagai calon anggota ataupun pengurus. Namun pada proses mengusung caleg, PKB memiliki pandangan untuk menyeleksi calon berdasarkan dukungan massa yang dimiliki, serta memiliki keinginan untuk mengikuti kontestasi pemilu. Selain hal tersebut, proses seleksi yang dilakukan berkaitan dengan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-

Undang dan peraturan KPU mengenai persyaratan administrative bagi seseorang yang hendak mencalonkan diri. Sehingga dalam proses seleksi yang dilakukan PKB terhadap calon pejabat perempuan ialah terkait dengan seleksi minat kemampuan dan seleksi administrative.

Secara umum dalam AD/ART partai PKB disebutkan bahwa pendidikan kaderisasi partai dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang bersifat formal dan informal. Partai menyelenggarakan kaderisasi dan sekolah Partai berbasis komunitas dan kelompok masyarakat. Kaderisasi menjadi syarat mutlak bagi setiap anggota partai yang hendak mendapatkan promosi kepengurusan, jabatan strategis di internal partai, jabatan politik dan atau jabatan publik. Selanjutnya dalam melakukan kaderisasi sistem, bentuk, kurikulum serta modul pendidikan politik dan yang akan digunakan mengacu pada Peraturan Partai. Kaderisasi PKB berdasarkan jenjangnya terdiri dari :

a. Kaderisasi Tingkat Loyalis.

DPC melaksanakan Pendidikan Kader Loyalis dan melaporkannya kepada DPP. Kaderisasi tingkat Loyalis adalah tingkatan dasar yang dilakukan oleh DPC terhadap kadernya. Pada tingkatan ini, kader akan diberikan pemahaman keorganisasian, ke NU-an serta pemahaman politik berbangsa. PKB melakukan kaderisasi terhadap seluruh anggota laki-laki maupun perempuan, kegiatan ini dilakukan bersama-sama. Yang kemudian proses dan mekanismenya ditentukan oleh DPP, dan instruktur merupakan kader dari DPD.

b. Kaderisasi Tingkat Penggerak.

DPW melaksanakan Pendidikan Kader Penggerak dan melaporkannya kepada DPP. Kaderisasi tingkat penggerak atau menengah ini dilakukan oleh tingkat Provinsi atau Wilayah. Pada tingkatan ini kader akan diberikan pendidikan politik yang secara jelas memberikan pemahaman mengenai kepartaian, strategi-strategi kemenangan pemilu, serta proses-proses pembuatan suatu keputusan. DPW akan menyeleksi kader-kader yang akan diikutsertakan dalam kaderisasi penggerak berdasarkan kompetensi yang

dimiliki serta kesiapannya dalam menghadapi pertarungan electoral. Umumnya yang mengikuti kaderisasi ini adalah tokoh-tokoh yang telah lama bergabung atau memiliki banyak pengalaman politik.

c. Kaderisasi Tingkat Pelopor.

DPP melaksanakan Pendidikan Kader Pelopor, DPP melakukan seleksi terhadap Kader Pelopor untuk dipilih dan ditugaskan menjadi Kader Pendidik sebagai Instruktur pendidikan kader di tingkat provinsi dan Kabupaten atau Kota. Proses kaderisasi tingkat atas ini sebagai upaya pembekalan bagi kader-kader yang akan ditempatkan di struktur daerah maupun wilayah untuk menjadi pelatih dalam kegiatan kaderisasi. Sehingga actor-actor yang mengikuti kaderisasi pelopor merupakan individu yang sudah lama bergelut dalam politik khususnya pada partai PKB, sehingga memiliki kecakapan sebagai pelopor partai.

Selain proses kaderisasi secara umum, PKB memiliki beberapa kegiatan sebagai proses kaderisasi khusus bagi kader perempuan. Pertama-tama anggota perempuan akan secara otomatis masuk ke dalam organisasi partai yang disebut Perempuan Bangsa PKB, organisasi tersebut merupakan organisasi sayap partai yang di mobilisasi oleh perempuan, di dalam organisasi tersebut perempuan yang telah bergabung dalam partai akan diberikan pendidikan, bimbingan serta pelatihan politik. Pendidikan tersebut bersifat terbuka, yang mana seluruh kader perempuan yang terdiri dari anggota, pengurus maupun kader yang memiliki jabatan tinggi memiliki hak yang sama dalam mengikuti proses kaderisasi di dalam Perempuan bangsa. Proses kaderisasi atau bimbingan dalam Perempuan Bangsa tidak membedakan kader berdasarkan strata atau jabatan tertentu, seluruh kader perempuan dilibatkan dalam proses bimbingan tersebut.

Kegiatan lainnya adalah latihan kader yang dilakukan bersama-sama dengan kader laki-laki. Biasanya LK dilaksanakan menjelang pemilu guna mempersiapkan kader-kader yang berkualitas. Namun di dalam Perempuan Bangsa diadakan pelatihan kaderisasi namun berbeda, jika proses LK dilakukan bersamaan dengan laki-laki maka di dalam Perempuan Bangsa dinamakan bimbingan yang hanya diikuti oleh perempuan-perempuan yang tergabung di dalamnya. Kegiatan tersebut

diantaranya adalah kegiatan pertemuan biasa, sosialisasi, latihan kepemimpinan, public speaking dan lain sebagainya. Setelah para kader perempuan mendapatkan pengetahuan tersebut, partai juga menginstruksikan untuk menyampaikan apa yang diperoleh dalam agenda tersebut di dalam anggota organisasinya masing-masing sehingga hal ini juga menjadi upaya PKB dalam menyiapkan kader-kader perempuannya di masa mendatang melalui organisasi yang memiliki afiliasi dengan PKB, sehingga perlu diberikan bekal sebelum mereka direkrut dalam PKB. Hal tersebut turut disampaikan oleh Uswatun Khasanah selaku pengurus PKB Kabupaten Demak yang juga sebagai Pembina Fatayat PAC Wedung sebagai berikut :

“ kegiatan kaderisasi yang bersangkutan dengan partai kalo buat perempuan itu ada di PB, kegiatan kepartaian pelatihan, sosialisasi, kumpul-kumpul, banyak kok. Kadang bareng kader-kader lain juga sama pengurus semuanya juga. NU juga diberi bimbingan biasanya karna kan memang partai dukung itu jadi ya biar sama-sama maju.” (wawancara pada tanggal 7 Maret 2022)

Proses kaderisasi perempuan yang dilakukan oleh PKB sesuai dengan prinsip kaderisasi dalam buku panduan rekrutmen dan kaderisasi parpol ideal yang dirangkum oleh Syamsudin Harris, dkk (2016), disebutkan bahwa dalam mewujudkan kaderisasi yang baik diperlukan tiga prinsip yaitu terbuka, non diskriminatif dan berjenjang. Prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam proses kaderisasi perempuan oleh PKB melalui organisasi Perempuan Bangsa yang secara mandiri serta aktif melakukan kegiatan-kegiatan bimbingan guna memperluas wawasan baik secara ke NU-an maupun kebangsaan.

6. Kendala-kendala Dalam Proses Rekrutmen Perempuan

Kendala yang dihadapi PKB dalam merekrut perempuan dikarenakan faktor pribadi perempuan yang masih enggan bergabung dalam politik, perempuan cenderung lebih suka menempatkan diri dalam organisasi muslimah atau jam'iyah untuk mengisi waktu luang. Faktor tersebut juga dipengaruhi oleh kuatnya budaya patriarki yang masih kentara di dalam internal PKB, sehingga perempuan merasakan kesulitan dalam memperoleh kursi kekuasaan baik di dalam partai maupun di dalam pemerintahan karena adanya dominasi terhadap perempuan oleh laki-laki. Kurangnya legitimasi laki-laki terhadap pemberian kesempatan secara penuh bagi perempuan

untuk menempati posisi-posisi strategis dalam politik tersebut mengakibatkan kurangnya kapasitas sumber daya perempuan di dalam PKB.

BAB V
PERBANDINGAN REKRUTMEN POLITIK PDI PERJUANGAN DAN PKB
KABUPATEN DEMAK

Pada bab ini akan diuraikan mengenai perbandingan rekrutmen politik antara PDI Perjuangan dan PKB Kabupaten Demak. Aspek-aspek yang diperbandingkan dalam penelitian ini mencakup pola rekrutmen yang dilakukan, mekanisme dan proses dalam merekrut kader baik sebagai anggota, pengurus maupun calon pejabat public, model rekrutmen, proses kaderisasi serta perbandingan jumlah kader perempuan dalam PDI Perjuangan dan PKB yang terbagi menjadi jumlah keanggotaan secara umum anggota perempuan di dalam masing-masing partai, umlah pengurus kemudian diuraikan mengenai jumlah perempuan yang terlibat dalam kontestasi pemilu oleh PDI Perjuangan dan PKB dengan perolehan kursi dalam jabatan public.

A. Perbedaan Ideologis PDI Perjuangan dan PKB dalam Perekrutan Perempuan

PDI Perjuangan merupakan salah satu partai di Indonesia yang memiliki ideology nasionalis sebagai pedoman dalam menjalankan perpolitikannya, berangkat dari dasar marhaenisme yang dikembangkan sejak masa kepemimpinan Ir. Soekarno masih dipegang erat sebagai jati diri partai hingga sekarang. Ideologinya yang nasionalis tidak mempersoalkan isu agama menjadi latar belakang keikutsertaan seseorang dalam partai. Kepemimpinan di masa lalu yang menobatkan putri kedua Ir. Soekarno Megawati sebagai ketua umum PDI memberikan implikasi yang serius terhadap arah perjuangan perempuan dalam politik. Pendirian anak partai di sector cabang-cabang menjadi awal pergerakan perempuan ditunjukkan dengan keberhasilan Megawati sebagai ketua umum, sehingga diterbitkanlah surat keputusan dari pusat untuk menghadirkan figure-figure perempuan baru di daerah-daerah sebagai penerus Megawati.

Hal tersebut menjadi dasar kuatnya ideology nasionalis yang dicerminkan Megawati melalui kesamarataan hak perempuan dalam berpolitik, tidak terkecuali di DPC Kabupaten Demak, dalam merekrut perempuan partai tidak mempersoalkan

masalah agama, ras, maupun jenis kelamin calon anggota, proses rekrutmen terbuka untuk semua kelas, selain itu upaya untuk merepresentasikan perempuan dalam parlemen juga turut dikembangkan partai melalui berbagai sumber daya yang dimiliki. Meskipun demikian, kendala yang paling krusial dihadapi oleh PDI Perjuangan Demak adalah faktor social keagamaan, walaupun saat ini sudah banyak kader perempuan yang terlibat, isu perbedaan ideology masih menjadi kendala utama dalam merekrut perempuan di daerah Demak.

Berbeda dengan PDI Perjuangan yang lekat dengan ideology nasionalisnya, PKB merupakan salah satu partai yang memiliki basis ideology religious moderat, yang artinya PKB menempatkan agama islam sebagai basis perjuangan atau pedoman partai dalam melakukan proses politik, sementara untuk menempatkan posisi dalam negara yang menganut Pancasila, PKB memiliki posisi yang moderat yakni memposisikan diri ditengah agama dan negara. Meskipun mengedepankan prinsip agama, PKB tidak mengesampingkan persoalan nasionalism dalam bernegara, sehingga antara agama dan negara keduanya harus berjalan. Di Kabupaten Demak PKB menjadi partai dominan, yang mana terdapat kesesuaian antara ideology yang dianut partai dengan kondisi social, keagamaan maupun keyakinan masyarakat Kabupaten Demak.

Kuatnya religious memiliki kecenderungan terhadap masifnya agenda kegiatan-kegiatan yang mengatasmakan islam, sehingga banyak didirikan organisasi-organisasi islam, dengan demikian tidak sulit menemukan organisasi yang sesuai dengan ideology PKB, diantaranya adalah Banser, Muslimat, IPNU dan lain sebagainya yang terdiri dari Laki-laki maupun perempuan serta berbagi tingkat usia muda maupun tua. Banyak kalangan ulama di daerah ini yang melibatkan dalam agenda politik dengan bergabung di PKB. Selain itu PKB Demak juga memiliki sayap kepartaian yakni Gema Saba (Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa), Gerbang Tani, Garda PKB (gerakan pemuda), Perempuan Bangsa, lakum HAM PKB, dan Barak Bangsa (Barisan Penggerak Bangsa).

B. Perbedaan Rekrutmen Perempuan dalam PDI Perjuangan dan PKB

Pola rekrutmen yang dilakukan PDI Perjuangan dalam merekrut kader perempuan sebagai anggota dan rekrutmen untuk calon pejabat memiliki pola Lateral yakni rekrutmen yang dilakukan terbuka secara umum baik internal maupun eksternal partai. Pada perekrutan anggota, PDI Perjuangan mempersilahkan seluruh masyarakat yang berasal dari berbagai golongan seperti petani, nelayan, buruh maupun pegawai swasta lainnya untuk bergabung dalam partai. Sementara itu proses rekrutmen calon pejabat dilakukan secara desentralisasi mulai dari pemilihan kandidat yang memiliki potensial di kepengurusan partai tingkat lokal yang terendah, hingga tingkat yang tertinggi. Partai melibatkan seluruh anggota partai untuk ikut serta dalam proses penentuan calon kandidat seperti pada tatanan PAC dan Ranting.

Sedangkan rekrutmen perempuan untuk pengurus memiliki pola Vertikal yaitu rekrutmen dilakukan secara hierarki struktural dalam organisasi partai, pimpinan partai berhak menentukan siapa kandidat yang tepat untuk mengisi jabatan politik yang biasanya didasarkan pada jenjang karir organisasi kandidat, kemampuan, dan pendidikan. Pada proses penentuan pengurus ini dilakukan melalui proses rapat internal partai dengan menghadirkan tokoh-tokoh penting dalam partai, didalamnya terjadi voting siapa saja yang memiliki peluang untuk menjabat sebagai pengurus sesuai dengan kemampuannya, kemudian voting terbanyak akan dipertimbangkan dengan kemampuan calon yang dipilih. Setelah itu para kandidat yang telah terpilih akan menjalankan proses verifikasi dan tes untuk menyeleksi kader yang cocok dengan jabatan tersebut. Berbeda dengan pencalonan pengurus DPC yang biasanya hanya melibatkan segelintir orang, untuk pemilihan pengurus PAC dan Ranting biasanya penunjukan dilakukan melalui instruksi DPC yang kemudian dikembalikan kepada para anggota di sector kecamatan dan Desa untuk mempertimbangkan usulan tersebut.

Sementara itu pola rekrutmen yang dilakukan PKB dalam merekrut perempuan adalah pola Vertikal atau cenderung tertutup yakni rekrutmen dilakukan secara

hierarki struktural dalam organisasi partai, partai berhak menentukan siapa kandidat yang tepat untuk mengisi jabatan politik yang biasanya didasarkan pada jenjang karir organisasi kandidat. Pada proses perekrutan perempuan umumnya diambil dari mereka yang memiliki latar belakang ke NU-an atau berasal dari organisasi-organisasi NU. Masa keterlibatan seseorang dalam partai politik akan menjadi pertimbangan dalam proses pemilihan. Seluruh proses perekrutan politik dalam PKB memiliki pola Vertikal baik dalam merekrut anggota, pengurus partai maupun calon pejabat public.

Tabel 7. Perbedaan Pola Rekrutmen

Pola rekrutmen		
PDI Perjuangan		PKB
Vertikal	Lateral	Vertikal
Proses rekrutmen pengurus partai, PDI Perjuangan memiliki pola Vertikal yakni terdapat segelintir actor partai yang memiliki kuasa penuh dalam memilih calon yang akan direkrut.	Proses dalam merekrut anggota dan pejabat public, PDI Perjuangan memiliki Lateral yang mana pada proses ini, partai memepersilahkan seluruh masyarakat yang ingin bergabung dalam partai, dan dalam proses penentuan calon pejabat public, partai melibatkan seluruh anggota untuk ikut serta memilih siapa calon yang akan diusung dengan memperhatikan kekuatan elektabilitas, dan kemampuan calon.	Pola yang dilakukan PKB memiliki pola Vertikal yang mana dalam merekrut kader perempuan sebagai anggota, pengurus maupun pejabat public dilakukan melalui internal partai dengan proses penunjukkan, sehingga pimpinan kunci dalam partai memiliki peranan dalam memilih calon kader perempuan dalam partainya.

Pada model rekrutmen politik, PDI Perjuangan dan PKB memiliki corak yang berbeda, PDI Perjuangan menggunakan yang dikembangkan oleh Michael Rush dan Althoff (2008) yang mana model perekrutan politik terbagi menjadi lima proses yaitu penyediaan dan permintaan, agensi, kriteria, control dan tuntutan. PDI Perjuangan yang mana pada model perekrutan partai menjaring anggota melalui berbagai skema yang kemudian dimasukkan kedalam struktur keanggotaan, bisa menjadi anggota partai baik di daerah maupun desa dan bisa juga sebagai sayap partai. Sehingga tersedianya kader di tiap-tiap dapil mempermudah partai memenuhi kuota afirmatif bagi perempuan pada saat pemilu. Agensi akan menetapkan kriteria dalam merekrut kader yang meliputi ciri-ciri dan ketrampilan yang dianggap layak dan harus dikuasai oleh calon pejabat. Kualifikasi-kualifikasi formal yang dituntut dari calon pemegang jabatan tadi diantaranya adalah ketentuan dari agensi ataupun diatur secara sah dalam aturan negara, sehingga kualifikasi tersebut akan memunculkan aktor politik dari berbagai latar belakang. Se jauh mana proses rekrutmen tersebut dapat dikontrol juga penting dalam mempengaruhi penyediaan dan permintaan.

Sementara itu, PKB menggunakan model rekrutmen Barber yang mana dalam proses ini menggunakan 3 metode yaitu motivasi, sumber daya dan kesempatan. Calon kandidat yang memiliki potensi diberi motivasi untuk bergabung dengan partai khususnya ikut serta mengikuti pemilu (Vigana, 2019).

C. Perbedaan Mekanisme dan Proses Rekrutmen Perempuan PDI Perjuangan Dengan PKB

Mekanisme dalam merekrut kader perempuan oleh PDI perjuangan dilakukan secara terbuka dengan memanfaatkan beberapa cara, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Media digital

Cara-cara yang digunakan PDI Perjuangan dalam menjaring kader perempuan pertama menggunakan media digital, di era disrupsi, internet menjadi sarana yang banyak digunakan oleh masyarakat, dalam isu politik media digital bermanfaat sebagai akses informasi, interaksi, partisipasi dan desentralisasi (Andriadi, 2017). Hadirnya teknologi digital tidak hanya

merevolusi strategi komunikasi politik, namun juga acara partisipasi politik warga negara sehingga dalam hal ini partai politik dapat melakukan fungsinya melalui media social, salah satunya adalah penyampaian mengenai rekrutmen anggota dalam partai. PDI Perjuangan menggunakan media Youtube, Instagram, Facebook, dan Website untuk menginformasikan terkait proses rekrutmen kader.

2. Hubungan personal

Selain melalui media digital, hubungan personal anggota partai dengan keluarga, kerabat, teman juga dimanfaatkan partai dalam merekrut kader perempuan. PDI Perjuangan menginstruksikan anggotanya yang sudah bergabung dalam partai untuk mengajak orang lain ikut serta menjadi kader PDI Perjuangan.

3. Organisasi-organisasi

Mendirikan organisasi sayap partai atau memberi dukungan ataupun memiliki afiliasi dengan organisasi eksternal lain juga merupakan salah satu cara yang dilakukan PDI Perjuangan merekrut perempuan, salah satunya adalah melalui organisasi sayap partai Komunitas Juang dan organisasi luar partai Puspita Bahari Nelayan.

4. Kegiatan di masyarakat

Kegiatan mandiri yang diselenggarakan PDI Perjuangan juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan partai merekrut kader perempuan. Diantaranya adalah dengan mengadakan kegiatan social, misalnya berbagi, membantu masyarakat yang terkena musibah, seminar, lomba, penyuluhan, pendidikan politik dan lain sebagainya.

Berbeda dengan PDI Perjuangan yang melakukan cara-cara modern sebagai mekanisme dalam merekrut kader khususnya perempuan, PKB pada prosesnya tidak menunjukkan cara-cara untuk bergabung secara terbuka sehingga perempuan yang tidak memiliki afiliasi dengan partai akan kesulitan mendapatkan akses bergabung dalam PKB. Mekanisme yang dilakukan PKB dalam merekrut kader perempuan adalah melalui jaringan organisasi, dengan cara patronase, penunjukan dan hubungan personal yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Melalui organisasi

Cara ini merupakan yang paling banyak memunculkan kader-kader baru dalam PKB, yang mana organisasi baik internal maupun eksternal partai memiliki peranan yang sangat penting dalam proses merekrut anggota baru.

2. Patronase

Cara ini merupakan cara lama yang masih berkembang sampai sekarang, model perekrutan patronase dilakukan secara mutualisme, yang mana dalam proses politik terdapat actor yang memberi dukungan umumnya bersifat finansial, sehingga actor tersebut memperoleh hak istimewa yang secara mudah dapat ikut serta melibatkan diri dalam partai. Diketahui bahwa PKB melibatkan actor pendukung dalam partai sehingga mengindikasikan cara patronase merupakan salah satu cara PKB merekrut kader perempuan.

3. Penunjukkan

Mekanisme selanjutnya yang paling umum dilakukan adalah penunjukkan, internal partai memiliki kekuasaan dalam menunjuk kader perempuan yang akan direkrut melalui organisasi-organisasi yang telah menjadi basis afiliasi diantaranya adalah Perempuan Bangsa, Muslimat dan Fatayat. Pada proses ini biasanya partai telah melihat calon kader yang akan direkrut melalui organisasi-organisasi yang ada, yang kemudian memberi instruksi kepada kader perempuan yang telah bergabung untuk mengajak serta orang tersebut mengikuti kegiatan partai, ataupun secara langsung partai bertanya kepada kadernya, apakah ada disekitar mereka seseorang yang berpotensi. Sehingga nantinya akan direkrut dalam partai. Individu-individu yang akan direkrut juga memiliki hak untuk menolak tawaran partai, namun kebanyakan calon kader perempuan yang menolak adalah mereka yang ditawarkan untuk mencalonkan diri. Sementara untuk model perekrutan anggota biasa tidak banyak yang menolak.

4. Hubungan personal

Cara lain yang digunakan PKB dalam merekrut kader perempuan adalah melalui cara-cara personal, sama dengan PDI Perjuangan, PKB juga memanfaatkan anggota kadernya untuk mengajak teman, kerabat serta

keluarganya bergabung dalam partai bahkan pimpinan-pimpinan juga turut serta menjaring anggota melalui relasi-relasi yang dimiliki.

Sedangkan pada proses rekrutmen politik perempuan, PDI Perjuangan, partai melibatkan seluruh anggotanya untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan calon anggota dan calon pejabat public. Sementara pada proses penentuan pengurus partai partai hanya melibatkan sedikit actor dalam partai. Proses perekrutan yang dilakukan PDI Perjuangan dapat dikatakan mengikuti prosedur yang telah ditentukan dan cukup ketat dalam proses penentuan calon pengurus dan pejabat publik. Meskipun tidak ada syarat khusus untuk dapat bergabung dalam partai, namun untuk menjadi anggota partai yang secara administrative tertulis dalam struktur keanggotaan, calon kader harus mengikuti beberapa proses diantaranya adalah bimbingan, pendidikan, pelatihan hingga sampai tahap pelantikan.

Setelah calon anggota perempuan menjalani berbagai skema tersebut barulah para kader perempuan diberikan KTA, namun dalam proses pembuatan KTA, PDI Perjuangan juga melibatkan anggota non-struktural partai, anggota tersebut adalah pendukung partai, pada kegiatan-kegiatan tertentu simpatisan tersebut ikut serta melibatkan diri dalam proses politik, tetapi tidak secara langsung masuk ke dalam partai. Sementara pada proses perekrutan calon pengurus dan pejabat publik, PDI Perjuangan menggunakan empat tahapan yaitu proses penjaringan, verifikasi, seleksi dan penetapan. Proses yang dilakukan PDI Perjuangan berpedoman pada AD/ART serta Undang-Undang yang berlaku khusus pada proses pemilihan calon pejabat public.

Sedangkan pada proses perekrutan anggota perempuan oleh PKB, ketika calon anggota sudah direkrut untuk masuk kemudian dilakukan proses pendataan anggota, sehingga seluruh calon anggota secara langsung masuk ke dalam structural partai, dan setelah itu baru mengikuti proses-proses politik seperti bimbingan dan pendidikan politik maupun kegiatan partai lainnya. Berbeda dengan PDI Perjuangan yang memberikan Kartu Tanda Anggota bagi kader perempuannya, di PKB kader perempuan yang telah terdaftar sebagai anggota partai umumnya memiliki kartu NU, jadi sebagai alat pengenalan atau keanggotaan yang digunakan kader PKB ialah kartu NU. Lain halnya dengan perekrutan anggota yang tidak memiliki tahapan khusus

dalam merekrut anggota, perekrutan bagi calon pengurus dan calon pejabat public memiliki tahapan secara administrative yakni tahap sertifikasi, nominasi dan pemilihan umum.

Tabel 8. Perbedaan Mekanisme dan Proses Rekrutmen

Mekanisme Rekrutmen	PDI Perjuangan	PKB
Anggota	Melalui media digital, hubungan personal, kegiatan kemasyarakatan, afiliasi organisasi lain.	Melalui Patronase, penunjukkan dan hubungan personal.
Pengurus	Nama-nama yang memiliki potensi dipilih kemudian diberlakukan cara voting dalam internal partai dan disesuaikan dengan ketentuan AD/ART.	Segelintir actor partai menunjuk seorang kader yang dipercaya dapat menjalankan tugas kepengurusan tersebut.
Pejabat	Mekanisme yang dilakukan berpedoman dari AD/ART dan UU. Secara khusus PDI Perjuangan melakukan cara-cara desentralisasi untuk menjaring calon pejabat.	Mekanisme yang dilakukan PKB dalam merekrut kader perempuan adalah cara penunjukkan.
Proses Rekrutmen	PDI Perjuangan	PKB
Anggota	Mendaftar, mengikuti kegiatan yang ditentukan partai seperti bimbingan dan pendidikan kemudian	Setelah diajak atau ditunjuk dan dipilih internal partai, nama calon anggota akan

	pelantikan sebagai anggota baru, mendapat KTA.	dicantumkan dalam structural keanggotaan partai yang kemudian ditunjukkan dengan tanda pengenal yaitu kartu NU.
Pengurus	Proses perekrutan pengurus dilakukan dengan mencatat nama-nama yang berpotensi sesuai dengan persyaratan AD/ART kemudian dilakukan voting, selanjutnya calon pengurus akan mengerjakan tes yang kemudian diumumkan kelolosan.	PKB dalam melakukan proses perekrutan bagi pengurus mengutamakan kader yang memiliki kemampuan serta pengalaman dalam parpol.
Pejabat	Proses perekrutan pejabat PDI Perjuangan dilakukan melalui 4 tahap yaitu penjarangan, verifikasi, seleksi dan penetapan.	Proses perekrutan pejabat PKB melalui 3 tahap yaitu sertifikasi, nominasi dan pemilihan umum.

Pada proses pemberian nomor urut peserta pemilu perempuan, PDI Perjuangan dan PKB menggunakan sistem *zipper* sebagai upaya meningkatkan keterpilihan perempuan dalam pemilu, dengan menempatkan perempuan di nomor urut 1,2 maupun 3 di setiap dapil, perbedaannya adalah dalam segi perbandingan yang mana PDI Perjuangan menggunakan sistem selang-seling dengan model sama rata antara Laki-laki dan perempuan, sementara PKB menempatkan 1 kader perempuan di nomor urut 1-3 kemudian dilanjutkan dengan penempatan perempuan di posisi bawah.

D. Perbandingan Pola Kaderisasi Terhadap Perempuan

Berdasarkan AD/ART masing-masing partai telah mengenai proses dan mekanisme kaderisasi terhadap perempuan yang secara teknis diatur dalam peraturan

partai, disebutkan juga bahwa dalam proses pengkaderan masing-masing partai memiliki jenjang. Di dalam PDI Perjuangan jenjang pengkaderan tersebut ialah sebagai berikut :

a. Pratama

Yaitu proses kaderisasi yang dilakukan oleh partai di tingkat paling bawah, yaitu DPC. Kaderisasi Pratama menekankan pada aspek internalisasi ideologi, visi dan misi Partai, proses ini bertujuan untuk membangun budaya dan konsolidasi kepada calon kader. Selain internalisasi nilai-nilai partai politik, pada pendidikan tingkat pratama, seorang calon kader di bekali pengetahuan mengenai ketrampilan manajerial dan tata kelola partai yang bersifat sederhana. Kaderisasi pada tingkat pratama dilakukan juga pelatihan tentang masalah kepemimpinan, strategi pemenangan pemilu, komunikasi dengan media dan juga public speaking yang bersifat sederhana dalam mempengaruhi citra PDIP di lingkungan masyarakat.

b. Madya

Kaderisasi yang dilakukan oleh partai di tingkat menengah. Kaderisasi ini dilakukan oleh partai di tingkat provinsi. Kaderisasi pada tingkat madya dirancang untuk menghasilkan pengurus partai di tingkat provinsi. Pada kaderisasi jenjang madya para kader lebih banyak dibekali ketrampilan terkait dengan pemenangan pemilu seperti ketrampilan komunikasi politik, kepemimpinan, komunikasi interpersonal, mobilisasi massa, keterwakilan politik dan penanganan sebuah masalah dalam proses pembuatan kebijakan. Pada kaderisasi jenjang madya, durasi dan kurikulum modul biasanya lebih detail dengan prosentasi peningkatan kapasitas dan ketrampilan manajerial kader PIDP terkait pemenangan pemilu, baik di lembaga perwakilan rakyat maupun pemerintahan daerah.

c. Utama

Proses kaderisasi yang dilakukan di tingkat paling atas yaitu DPP. Kaderisasi ini diselenggarakan oleh partai yang ditujukan bagi kader yang akan menduduki posisi tertentu (eksekutif dan legislatif) dalam rangka mewujudkan dan mencapai tujuan partai. Kaderisasi tingkat utama

menekankan internalisasi nilai-nilai partai, selain itu juga diberikan pengetahuan mengenai masalah pemilihan baik yang menyangkut masalah regulasi maupun strategi pemenangan pemilu. Pada pendidikan kader utama juga diberikan pengetahuan manajerial yang menyangkut pemahaman tentang masalah-masalah dan isu-isu pada skala nasional dan global dan mengambil langkah solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pemahaman hal-hal tersebut juga dibarengi dengan peningkatan ketrampilan kader dalam hal komunikasi politik, lobbying, dan kepemimpinan dengan skala yang lebih luas cakupannya ketimbang pendidikan pada tingkat pratama dan madya.

PDI Perjuangan Demak melakukan proses kaderisasi bagi anggota baru yang dinamai dengan pendidikan politik. Jadwal untuk kegiatan ini tidak dilaksanakan secara terus menerus, artinya partai akan mengadakan pendidikan politik sesuai dengan kebutuhan dan kapabilitas anggotanya. Pelatihan kaderisasi terbagi menjadi beberapa tingkatan yang dimulai dari dasar, menengah, dan lanjutan. Sedangkan pengurus dan calon pejabat umumnya juga diberikan kaderisasi yang lebih intens dari anggota biasa, karena partai memberikan dukungan politik bagi mereka-mereka yang akan bertugas. Proses kaderisasi dilakukan secara terbuka, seluruh anggota dapat mengikuti proses ini, umumnya anggota yang baru bergabung ataupun anggota-anggota di dalam sayap partai akan di berikan kegiatan pengkaderan tingkat dasar, sementara untuk anggota lama atau pengurus akan mengikuti kaderisasi pada tingkatan menengah ke atas. Sementara itu dalam AD/ART PKB menyebutkan bahwa proses pengkaderan terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu :

a. Kaderisasi Tingkat Loyalis.

DPC melaksanakan Pendidikan Kader Loyalis dan melaporkannya kepada DPP. Kaderisasi tingkat Loyalis adalah tingkatan dasar yang dilakukan oleh DPC terhadap kadernya. Pada tingkatan ini, kader akan diberikan pemahaman keorganisasian, ke NU-an serta pemahaman politik berbangsa. PKB melakukan kaderisasi terhadap seluruh anggota laki-laki maupun perempuan, kegiatan ini dilakukan bersama-sama. Yang

kemudian proses dan mekanismenya ditentukan oleh DPP, dan instruktur merupakan kader dari DPD.

b. Kaderisasi Tingkat Penggerak.

DPW melaksanakan Pendidikan Kader Penggerak dan melaporkannya kepada DPP. Kaderisasi tingkat penggerak atau menengah ini dilakukan oleh tingkat Provinsi atau Wilayah. Pada tingkatan ini kader akan diberikan pendidikan politik yang secara jelas memberikan pemahaman mengenai kepartaian, strategi-strategi pemenangan pemilu, serta proses-proses pembuatan suatu keputusan. DPW akan menyeleksi kader-kader yang akan diikutsertakan dalam kaderisasi penggerak berdasarkan kompetensi yang dimiliki serta kesiapannya dalam menghadapi pertarungan electoral. Umumnya yang mengikuti kaderisasi ini adalah tokoh-tokoh yang telah lama bergabung atau memiliki banyak pengalaman politik.

c. Kaderisasi Tingkat Pelopor.

DPP melaksanakan Pendidikan Kader Pelopor, DPP melakukan seleksi terhadap Kader Pelopor untuk dipilih dan ditugaskan menjadi Kader Pendidik sebagai Instruktur pendidikan kader di tingkat provinsi dan Kabupaten atau Kota. Proses kaderisasi tingkat atas ini sebagai upaya pembekalan bagi kader-kader yang akan ditempatkan di struktur daerah maupun wilayah untuk menjadi pelatih dalam kegiatan kaderisasi. Sehingga actor-actor yang mengikuti kaderisasi pelopor merupakan individu yang sudah lama bergelut dalam politik khususnya pada partai PKB, sehingga memiliki kecakapan sebagai pelopor partai.

Berbeda dengan PDI Perjuangan yang tidak memiliki sistem kaderisasi bagi bagi perempuan, secara khusus PKB sering mengadakan kegiatan mandiri khususnya dalam organisasi Perempuan Bangsa sebagai agen penggerak perempuan dalam melakukan kegiatan-kegiatan kaderisasi atau biasa disebut bimbingan. Di dalam organisasi tersebut perempuan yang telah bergabung dalam partai akan diberikan pendidikan, bimbingan serta pelatihan politik. Pendidikan tersebut bersifat terbuka, yang mana seluruh kader perempuan yang terdiri dari anggota, pengurus maupun kader yang memiliki jabatan tinggi memiliki hak yang sama dalam mengikuti proses

kaderisasi di dalam Perempuan bangsa. Kegiatan tersebut diantaranya adalah kegiatan pertemuan biasa, sosialisasi, latihan kepemimpinan, public speaking dan lain sebagainya. Setelah para kader perempuan mendapatkan pengetahuan tersebut, partai juga menginstruksikan untuk menyampaikan apa yang diperoleh dalam agenda tersebut di dalam anggota organisasinya masing-masing sehingga hal ini juga menjadi upaya PKB dalam menyiapkan kader-kader perempuannya di masa mendatang melalui organisasi yang memiliki afiliasi dengan PKB.

E. Perbandingan Jumlah Kader Perempuan PDI Perjuangan dan PKB

Berdasarkan data base masing-masing partai, jumlah keterwakilan perempuan perempuan dalam PDI Perjuangan dan PKB memiliki beberapa perbedaan jumlah, kader PDI Perjuangan terbagi menjadi dua jenis kader yaitu kader structural dan kader non-struktural. Structural meliputi pengurus dan seluruh anggota partai dari bawah sampai atas yakni anak ranting, Ranting, PAC kemudian tingkat DPC sementara kader non-struktural meliputi organisasi luar yang menjadi simpatisan PDI Perjuangan. Terkait dengan Kartu Tanda Keanggotaan atau KTA, baik kader structural maupun non-struktural memiliki KTA tersebut. Mengenai keanggotaan, PDI Perjuangan melakukan pembaharuan data base anggota setiap periode yakni selama 5 tahun sekali, sehingga setiap 5 tahun terjadi pergantian kader dan jabatan dalam partai. Berikut adalah jumlah kader perempuan pada periode 2019-2024 menurut data yang telah dirangkum :

Tabel 9. Jumlah kader perempuan PDI Perjuangan

No	Jabatan	Jumlah
1.	DPRD	2
2.	Pengurus	6
3.	Anggota	>200
Jumlah		>208

Sumber: Wawancara dengan Bapak Anwar, pada tanggal 20 Maret 2022

Berdasarkan jumlah tersebut, secara keseluruhan kader telah memiliki KTA, kader perempuan dari PDI Perjuangan yang sedang menjabat sebagai anggota legislative sebanyak 2 orang, yang menjadi pengurus partai 5 orang dan lebih dari 200 orang perempuan merupakan anggota. Anggota yang dimaksud ialah kader structural maupun non-struktural seperti anggota DPC, anggota PAC, Ranting, Anak Ranting, Simpatisan, ataupun individu-individu yang pernah ikut serta dalam kegiatan partai. Namun jumlah keanggotaan tersebut tidak sejalan dengan kemunculan anggota didalam agenda kepartaian sesuai dengan catatan dalam sistem data base, pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan partai biasanya hanya dihadiri oleh beberapa kader perempuan yang serius menggeluti dunia politik. Tidak adanya sistem yang secara terus menerus di update, pada prosesnya justru menggunakan pemutakhiran sistem data anggota yang dilakukan selama periode 5 tahun mengakibatkan ketidaktahuan partai mengenai penyebab absennya kader yang telah tercatat sebagai anggota.

Hal-hal yang memungkinkan terjadi seperti anggota meninggal, pindah domisili, pindah afiliasi, ataupun masalah-masalah lain merupakan faktor absennya perempuan dalam PDI Perjuangan. Umumnya anggota-anggota perempuan akan tampil kembali pada saat menjelang pemilihan umum yang mana pada proses ini partai akan mengumpulkan massa secara besar-besaran, sehingga kader-kader perempuan digerakkan kembali sebagai pendukung ataupun simpatisan di dalam struktur-struktur partai dimulai dari tingkatan terkecil (Anak Ranting) sampai tertinggi (DPC).

Sementara itu, jumlah kader perempuan dalam PKB cenderung lebih banyak dibandingkan PDI Perjuangan yakni ada lebih dari 230 kader perempuan yang terdiri dari pengurus dan anggota. Pengurus terbagi menjadi dua yaitu pengurus DPC dan pengurus PB (Perempuan Bangsa) sementara anggota terdiri dari beberapa tingkatan yakni anggota DPC, PAC dan Ranting. Jumlah anggota perempuan PKB periode 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Jumlah kader perempuan PKB

No	Jabatan	Jumlah
1.	Pengurus DPC	26
2.	Pengurus PB	17
3.	Anggota	>200
Jumlah		>243

Sumber: Sekretariat PKB Demak, diolah oleh penulis.

Jumlah perempuan dalam PKB yang telah menjadi kader secara keseluruhan telah memiliki KTA yang secara khusus diterbitkan oleh NU yakni kartu NU, PKB tidak menjelaskan secara jelas mengenai pemberian kartu terhadap kader perempuannya sebagai tanda keanggotaan, namun secara jelas nama-nama kader telah diinput dalam data base partai yang terhubung dengan pusat atau DPP.

F. Perbandingan Jumlah Caleg Perempuan PDI Perjuangan dan PKB

Berdasarkan data yang diperbandingkan dan dianalisis pada Tahun 2014, PDI Perjuangan mengusung 17 kader perempuannya sementara PKB mengusung sebanyak 18 kandidat perempuan sebagai berikut :

Tabel 11. DCT Perempuan Pileg 2014 Kabupaten Demak

Dapil	PDI Perjuangan	PKB
Dapil I	6	4
Dapil II	3	4
Dapil III	3	4

Dapil IV	2	3
Dapil V	3	3
Jumlah	17	18

Sumber: Data KPU Demak, diolah oleh penulis.

Sementara itu data base yang di dapatkan dari lapangan pada tahun 2019, jumlah rekrutmen calon legislative perempuan dari PDI Perjuangan berjumlah 15 orang yang terbagi menjadi lima dapil, pada dapil pertama PDI Perjuangan menempatkan 3 orang, dapil 2 sebanyak 2 orang, dapil 3 sebanyak 3 orang, dapil 4 sebanyak 4 orang dan dapil 5 sebanyak 3 kader perempuan. Sedangkan PKB merekrut sebanyak 14 kader perempuan dengan rincian dapil 1 berjumlah 3 orang dapil 2 sebanyak 3 orang, dapil 3 sebanyak 2 orang dan dapil 4 sebanyak 3 orang dan dapil 5 berjumlah 3 orang yang akan di sajikan dalam data sebagai berikut :

Tabel 12. DCT Perempuan Pileg 2019

Dapil	PDI Perjuangan	PKB
Dapil I	3	3
Dapil II	2	3
Dapil III	3	2
Dapil IV	4	3
Dapil V	3	3
Jumlah	15	14

Sumber: Data KPU Demak, diolah oleh penulis.

Berdasarkan jumlah tersebut, kader yang dicalonkan PDI Perjuangan secara keseluruhan telah mendapatkan pendidikan politik yang diberikan partai khususnya sekolah parlemen sebagai bekal bagi kader yang dicalonkan dalam mengikuti

pemilihan umum. Diantara kader telah mendapatkan sekolah parlemen paling sedikit adalah 3 kali sebelum masa pencalonan, sementara kader lain yang telah lama bergabung dalam partai serta beberapa kali mengikuti ajang pemilu telah mendapatkan sekolah parlemen lebih dari 5 kali. Umumnya pelaksanaan sekolah parlemen dilakukan di beberapa daerah diantaranya adalah Semarang dan Jakarta dan terkadang juga digabung dengan DPC Kabupaten atau Kota lain.

Berkaitan dengan sekolah parlemen, kader perempuan yang diusung PKB pada pencalonan anggota legislative periode 2019 terdiri dari macam-macam golongan. Pertama adalah kader yang sudah memiliki sepak terjang lama dalam dunia politik, dapat dikatakan bahwa mereka telah mendapatkan sekolah parlemen atau pendidikan politik berkali-kali, kedua, kader yang belum lama menjadi anggota partai, setidaknya golongan kader ini telah dipersiapkan partai untuk diusung dalam mengikuti kontestasi pemilu sehingga mendapatkan pendidikan politik paling sedikit adalah dua kali, ketiga adalah seseorang yang berasal dari kalangan tertentu atau organisasi sayap partai, yang mana pada saat pemilu guna memenuhi keterwakilan perempuan sebanyak 30 % sebagai persyaratan partai dapat mengikuti pemilihan umum, actor ini diminta atau ditunjuk untuk mencalonkan diri dalam pertarungan electoral. Kader kategori ini belum pernah melibatkan diri dalam sekolah parlemen, namun partai memberikan pendampingan dan bimbingan secara personal seperti cara-cara kampanye, strategi politik, pengetahuan kepartaian dan parlemen serta mengajak calon tersebut mengikuti kegiatan-kegiatan partai.

Selanjutnya pada tahun 2019, PDI Perjuangan mendapatkan 11 kursi legislative dan menempatkan 2 kader perempuannya untuk menduduki jabatan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan 1 kader perempuan berhasil menjabat sebagai Bupati, sedangkan PKB pada Tahun 2019 belum berhasil menempatkan satupun kader perempuannya. Hasil ini berbeda dengan periode sebelumnya yakni 2009 dan 2014 yang mana PKB memiliki kesempatan untuk menempatkan kader perempuannya dalam kursi legislasi, sementara PDI Perjuangan pada saat itu masih memiliki tingkat keterwakilan perempuan dan elektabilitas dibawah PKB. Dapat dikatakan bahwa pada Tahun 2019 PDI Perjuangan telah berhasil merebut dominasi

kuasa parlemen yang sebelumnya dikuasai oleh PKB. Berikut adalah sajian tabel jumlah keterwakilan perempuan dari Tahun 2009 sampai 2019 PDI Perjuangan dan PKB Kabupaten Demak :

Tabel 13. Perbandingan perolehan kursi Tahun 2009-2019

Tahun	Keterwakilan anggota legislative oleh PDI Perjuangan		Jumlah	Keterwakilan anggota legislative oleh PKB		Jumlah
	Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan	
2009	7	1	8	8	2	10
2014	7	1	8	7	2	9
2019	9	2	11	9	0	9

Sumber: Data KPU Demak, diolah oleh penulis.

G. Persamaan dan Perbedaan Rekrutmen Politik Perempuan Dalam PDI Perjuangan dan PKB

Persamaan rekrutmen yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dan PKB berkaitan dengan pola rekrutmen yang dilakukan, PDI Perjuangan dan PKB sama-sama memiliki corak pola Vertikal pada proses perekrutan terhadap calon pengurus partai, selain itu terkait dengan proses dan mekanisme rekrutmen yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dan PKB memiliki kesamaan dan perbedaan, kesamaan nya adalah melibatkan anggota partai dalam melakukan proses rekrutmen dan menjaring calon anggota, diantaranya adalah melalui hubungan personal, kader partai diminta untuk mengajak kerabat, teman-teman dan keluarganya ikut serta bergabung dalam partai, kemudian organisasi sayap partai juga menjadi salah satu mekanisme yang digunakan oleh kedua partai dalam merekrut calon anggota yaitu Komunitas Juang dan Perempuan Bangsa.

Selanjutnya pada proses perekrutan politik, PDI Perjuangan dan PKB sama-sama merekrut kader yang sesuai dengan persyaratan dalam Undang-Undang mengenai pemilihan umum yang memberikan kategori syarat administrative bagi

calon kepala daerah ataupun calon legislative untuk mengikuti kontestasi pemilu dan juga mengikuti ketentuan-ketentuan dalam AD/ART masing-masing partai sebagai proses perekrutan politik. Selain itu partai juga sama-sama menjadikan kemampuan calon sebagai indicator dalam mengusung calon pejabat public. Kesamaan lain ialah pengkaderan, kedua partai sama-sama memiliki jenjang pengkaderan yang terbagi menjadi 3 tingkatan, PDI Perjuangan tingkatan tersebut ialah Pratama, Madya dan Utama. Adapun tingkat pengkader PKB terbagi menjadi tiga tingkat yaitu Loyalis, Penggerak dan Pelopor.

Adapun perbedaan rekrutmen yang dilakukan antara PDI Perjuangan dan PKB dapat dilihat dari pola rekrutmen bagi calon anggota partai dan calon pejabat public, apabila pola rekrutmen PKB memiliki corak Vertikal atau semi tertutup secara keseluruhan dalam proses perekrutan politik terhadap perempuan, PDI Perjuangan cenderung menggunakan pola Lateral (terbuka) untuk merekrut calon anggota dan calon pejabat public. Artinya terdapat unsur keterbukaan dalam proses perekrutan calon anggota dan calon pejabat public dalam PDI Perjuangan sementara itu proses rekrutmen PKB memiliki sifat tertutup.

Beberapa mekanisme yang digunakan dalam merekrut kader perempuan memiliki perbedaan, PDI Perjuangan menggunakan platform media digital sebagai sarana sosialisasi dan informasi terkait rekrutmen, diantaranya adalah media social, youtube dan website. Selain itu kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan masyarakat secara langsung juga seringkali dilakukan PDI Perjuangan untuk merekrut calon anggota baru, terlibatnya kader di dalam suatu masyarakat akan memberikan pemaknaan bahwa partai politik ada untuk menjembatani kepentingan dan kebutuhan rakyat sehingga mekanisme ini dapat menjadi salah satu cara merebut kepercayaan masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk bergabung di dalamnya.

Jika PDI Perjuangan secara terbuka menggunakan mekanisme media online sebagai salah satu cara merekrut calon anggota, PKB tidak menggunakan cara tersebut. PKB masih lekat dengan cara-cara lama yang digunakan untuk merekrut kader perempuan, yaitu patronase cara ini digunakan sebagai bentuk balas jasa

terhadap seseorang yang telah membantu partai baik dukungan secara finansial ataupun massa, sehingga orang tersebut dapat merekomendasikan individu-individu untuk direkrut menjadi anggota. Selanjutnya PDI Perjuangan menerbitkan KTA bagi kader perempuannya sebagai identitas, sementara PKB tidak memberikan kartu identitas yang mengatasnamakan PKB melainkan kartu NU. Selain perbedaan KTA, jumlah keanggotaan perempuan baik sebagai anggota, pengurus maupun perempuan yang menduduki kursi legislatif juga memiliki perbedaan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa syarat yang ditentukan oleh PDI Perjuangan dan PKB dalam merekrut perempuan telah sesuai dengan AD/ART dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, proses dan mekanisme yang dilakukan PDI Perjuangan menggunakan cara-cara seperti memanfaatkan media digital, hubungan personal, organisasi, serta melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Sementara PKB menggunakan cara-cara yang cenderung personal seperti patronase, hubungan kekerabatan, penunjukan, dan organisasi afiliasi. Adapun pola rekrutmen perempuan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan memiliki pola lateral (terbuka) bagi calon anggota dan calon pejabat public dan vertical (tertutup) bagi calon pengurus partai, sedangkan PKB memiliki pola semi tertutup atau vertical bagi calon anggota, pengurus, maupun pejabat public. Dalam melakukan proses rekrutmen, tahapan yang dilakukan PDI Perjuangan adalah melalui skema penjaringan seleksi, pencalonan dan penetapan, adapun PKB melakukan tahap sertifikasi, nominasi, pemilihan umum. Proses kaderisasi yang dilakukan secara berjenjang, tingkat pengkaderan PDI Perjuangan terbagi menjadi tiga yaitu pratama, madia, dan utama, PKB terbagi menjadi tiga yaitu loyalis, penggerak, dan pelopor. Kemudian kendala yang dihadapi PDI Perjuangan Kabupaten Demak dalam merepresentasikan perempuan berkaitan dengan budaya islamisasi yang kuat di Demak, serta kurangnya minat perempuan bergabung dalam partai nasionalis, sementara kendala PKB dalam menghadirkan actor perempuan adalah minimnya keinginan kader perempuan dalam persaingan politik, hal tersebut dikarenakan masih kuatnya budaya patriarki di dalam internal partai.

Adapun perbandingan diantara kedua partai terkait ideology terletak pada perbedaan nasionalis dan religious, pada syarat dan kriteria, PKB mensyaratkan calon kader perempuannya berasal dari organisasi NU, sementara PDI Perjuangan tidak ada persyaratan khusus. Berkaitan dengan mekanisme yang digunakan oleh kedua partai PDI Perjuangan cenderung menggunakan cara-cara digitalisasi sebagai proses menjaring massa, sedangkan PKB menggunakan cara-cara personal dalam proses merekrut

anggota. Pola rekrutmen PDI Perjuangan memiliki corak terbuka, sementara PKB cenderung tertutup. Berkenaan dengan jumlah keanggotaan, PKB memiliki anggota perempuan lebih banyak daripada PDI Perjuangan serta memiliki organisasi sayap partai dengan basis perempuan, anggota yang tergabung dalam PKB ditunjukkan dengan kartu NU, sementara PDI Perjuangan memberikan KTA bagi anggotanya.

B. Saran

Dalam melakukan proses rekrutmen politik khususnya terhadap perempuan, partai politik harus menggunakan sistem keterbukaan untuk menjaring anggota perempuan, selain itu prinsip-prinsip non-diskriminatif juga harus diterapkan untuk memberikan kesamarataan bagi masyarakat yang ingin bergabung. Serta mekanisme perekrutan harus dilakukan secara jelas, seperti pendaftaran langsung di kantor DPC masing-masing partai ataupun mekanisme melalui media daring seperti platform partai. Selanjutnya kegiatan-kegiatan partai haruslah dilakukan dengan melibatkan masyarakat, artinya pendekatan partai terhadap masyarakat merupakan salah satu cara meningkatkan popularitas partai serta mendapatkan legitimasi public.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Anggito, S. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Anggoro, & Dkk. (2020). Rekrutmen Politik Calon Kepala Daerah (Studi Tentang Seleksi Kandidat Pada Partai Amanat Nasional Pada Pemilukada di Kota Tasikmalaya Tahun 2017). *Journal TAPIS*, 16.
- Anggraini, C. E., Sutarso, J., & Santosa, B. (2014). Analisis Komparatif Rekrutmen Perempuan Dalam Partai Politik Studi Kasus Pdip Dan Pks Kota Surakarta. *KomuniTi*, VI(2), 132–141.
- Anggraini, D. (2019). Rekrutmen Kandidat Perempuan Oleh Partai Politik (Studi Kasus: Pilkada Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017). *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 1(1), 66–87. <https://doi.org/10.25077/jdpl.1.1.66-87.2019>
- Anshori, I., & Fadliyah, D. (2019). Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Kasus: Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kota Bekasi Dalam Menetapkan Calon Anggota Legislatif Dpr RI Tahun 2014-2019). *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta*, 4.
- BPS. (2021). *Kabupaten Demak dalam angka 2021*. BPS Kab Demak. <https://doi.org/1102001.3321>
- Budiman, A. (1985). *Pembagian Kerja Secara Seksual*. PT Gramedia.
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi politik*. Prenada Media Group.
- Eba. (2021). *Sejarah PDI Perjuangan*. <https://pdiperjuanganponorogo.com/sejarah/>
- Fadliyah, N. (2016). *Affirmative Action Partai Dalam Pencalonan Politisi Perempuan Anggota DPRD Kota Makassar (Studi Komparasi Partai PPP Dan PDIP Kota Makassar)*.
- Gatara, S., & Said, D. (2007). *SOSIOLOGI POLITIK, Konsep dan Dinamika Perkembangan kajian*. Pustaka Setia.
- Halim, A. (2018). *Politik Lokal*. Intrans Publishing.
- Haris dkk, S. (2016). Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia. *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia*, 1–113.
- Harison, L. (2009). *Metode Penelitian Politik*. Kencana.
- Hidayat, C. (2014). Partai Politik. In *Wikipedia*. Nusa Media. http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik

- Katz, R., & Crotty, W. (2014). *Handbook Partai Politik*. Nusa Media.
- Kurniawan, N. (2014). Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/Puu-Vi/2008. *Jurnal Konstitusi*, 11(4), 714–736. <https://doi.org/10.31078/jk>
- Marsh, S. (2011). *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Nusa Media.
- Mertha, M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Anak Hebat Indonesia.
- Miriam Budiarto. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong. Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muharni. (2018). KADERISASI PEREMPUAN PARTAI POLITIK (Studi Pada Partai Golkar dan PKB Provinsi Riau Tahun 2009-2014). *JOM FISIP*, 5.
- PKB. (2015). *Sejarah Pendirian*. <https://pkb.id/page/sejarah-pendirian/>
- Prasetya, T. (2019). *Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Partai Politik Pada Pemilu 2019 (Studi Kasus partai Golkar Surabaya) ”*.
- Purwadi, & Maharsi. (2005). *Babad Demak*. Tunas Harapan.
- Putra, F. (2002). *Partai Politik dan Kebijakan Politik*. Cv Pustaka Setia.
- Ramlan, S. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. PT Grafindo.
- Rush, M., & Althoff. (2008). *Pengantar Sosiologi Politik*. Rajawali Pers.
- Sahid, K. (2011). *Memahami Sosiologi Politik*. Ghalia Indonesia.
- Sastriani, S. H. (2009). *Gender and Politics*. Tiara Wacana.
- Setiadi M Elly. (2013). *Sosiologi Politik*. KENCANA PRENADA MEDIA.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al Misbah*. Lentera Hati.
- Silalahi, M., Marpaung, P., Panjaitan, D. T. M. R., & Da’o, B. (2019). Pola Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Partai Politik Perindo pada Pemilihan Umum 2019 di Sumatera Utara. *Jurnal Governance Opinion*, 4(1), 130–149.
- Soetomo. (2004). *Perspektif Teoritis Model Rekrutmen Perempuan di Bidang Politik*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.
- Surbakti, ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. PT Raja Grafindo Persada.
- Syamsir, & Suryanef. (2005). *Keterwakilan Perempuan Dalam Rekrutmen Calon Legislatif Oleh Partai Politik Di Kota Padang - Implementasi Kuota 30%*.

Vigana, C. V. (2019). *PARTAI POLITIK DAN REKRUTMEN POLITIK ((Studi Atas Rekrutmen Koalisi Partai Golkar dan PPP dalam Mengusung Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Demak Tahun 2015)*.

Wahyu, P. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Graha Ilmu.

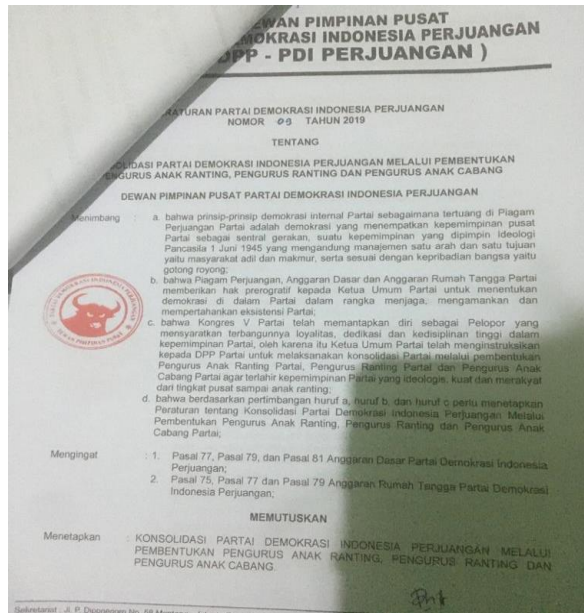
Wahyuningsih, S. (2013). *Metode Penelitian Studi Kasus*. UTM Press.

Wulandari, I. D. (2019). *Perempuan dan Partai Politik Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan dalam Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Tangerang Selatan Tahun 2014*. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.

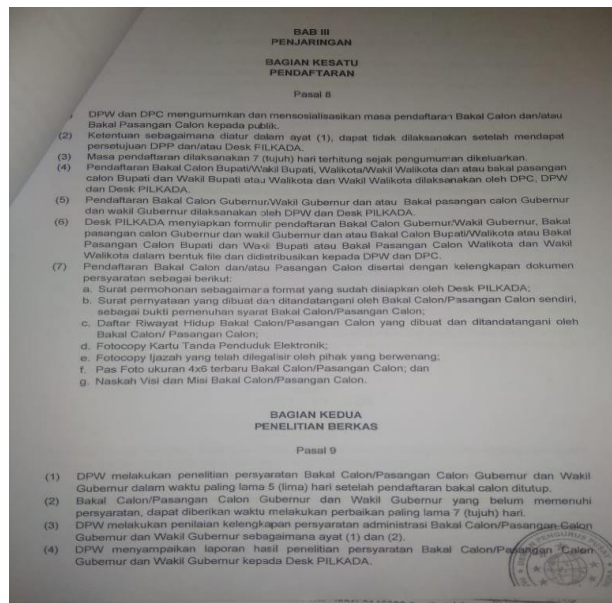
Zebua, H. (2017). *Rekrutmen dan Kaderisasi Perempuan Dalam Partai Politik (Studi Kasus DPC/DPD Partai Politik Kota Bandung)*.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peraturan Partai PDI Perjuangan



Lampiran 2. Panduan Rekrutmen Perempuan PKB



Lampiran 3. Rapat Internal Perekrutan Caleg



Lampiran 4. Rapat PKB



Lampiran 5. Pendidikan Politik oleh PKB



Lampiran 6. Pendidikan Politik oleh PDI Perjuangan




Lampiran 7. Proses Kaderisasi PDI Perjuangan



Lampiran 8. Proses Konsolidasi PB untuk Menjaring Kader Perempuan



Lampiran 9. Surat Ijin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Prof. Dr. Hamka Km 2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Semarang, 29 Februari 2022

Nomor : 2607/Un.10.6/K/KM.05.01/02/2022
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten
Demak
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul **"Rekrutmen Perempuan Dalam Partai (Studi DPC Kabupaten Demak)"** di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Misfaatin Nisak
NIM : 1806016064
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Demak, 19 Mei 1998
CP/e-mail : 0895378221633 / misfatin98@gmail.com

Nama Ayah/ Ibu : Misbah / Musyafaah
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Keb. bag. Akademik, Kemahasiswaan
H.A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2607/Un.10.6/K/KM.05.01/02/2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Semarang, 29 Februari 2022

Yth.
Ketua DPC PKB Kabupaten Demak
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul **"Rekrutmen Perempuan Dalam Parpol (Studi DPC di Kabupaten Demak)"** di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Misfaatin Nisak
NIM : 1806016064
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Demak, 19 Mei 1998
CP/e-mail : 0895378221633 / misfatin98@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Misbah / Musyafaah
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



H.A. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Lampiran 10. Pedoman Wawancara

DEWAN PIMPINAN PUSAT


PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM
(IN-DEPTH INTERVIEW GUIDE)

Pengurus atau Staff
Identitas Responden
Nama : Andi
Jabatan : SU-PETAKARYA

Daftar Pertanyaan

1. Apakah partai memiliki syarat tertentu bagi calon anggota partai ?
2. Apa saja syarat-syarat tersebut ?
3. Bagaimana mekanisme yang dilakukan partai dalam proses perekrutan perempuan ?
4. Apakah AD/ART menjadi panduan utama dalam proses rekrutmen ?
5. Jika ada pedoman lain, sebutkan ?
6. Apakah ada proses kaderisasi yang dilakukan partai ?
7. Bagaimana mekanismenya ?
8. Apakah ada kegiatan-kegiatan sekolah parlemen (legislatif dan eksekutif) ?
9. Bagaimana prosesnya ?
10. Ada berapa jumlah kader perempuan PDI Perjuangan yang ada di data base saat ini ?
11. Ada berapa yang memiliki KTA ?
12. Apakah ada organisasi partai yang memiliki basis massa perempuan ?
13. Apa saja divisi atau badan yang ada di PDI Perjuangan ?

Demak 7 April 2022



PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM
(IN-DEPTH INTERVIEW GUIDE)

Kader
Identitas Responden
Nama : Elu Sri
Jabatan : DIV. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Daftar Pertanyaan

Kualitas Kandidat

1. Bagaimana anda bisa dipilih oleh PDI Perjuangan dalam pencalonan DPRD ? SM
2. Apakah anda mengikuti seleksi dari partai ? tidak
3. Apakah anda mendaftar ke PDI Perjuangan ?
4. Apakah anda yang meminta PDI Perjuangan atau partai yang meminta anda ?
5. Bagaimana proses pencalonan anda melalui partai PDI Perjuangan ?

Pendidikan

6. Apakah pendidikan terakhir anda ?
7. Apakah anda pernah mengikuti pendidikan politik ?
8. Apakah anda melihat bahwa faktor pendidikan dijadikan acuan oleh partai dalam merekrut calon kepala daerah ataupun DPRD ?
9. Bagaimana partai melihat kualitas kandidat ?

Pelatihan

10. Apakah anda pernah mengikuti pelatihan di partai politik ?
11. Di mana dan kapan ?
12. Apakah anda telah mengikuti kaderisasi ?
13. Bagaimana prosesnya ?
14. Apakah anda telah mengikuti sekolah parlemen ?
15. Apakah faktor pelatihan dijadikan sebagai faktor dalam merekrut kepala daerah ataupun calon dewan ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Misfaatin Nisak lahir di Demak, pada tanggal 19 Mei 1998 dari pasangan Bapak Misbah dan Ibu Musyafaah. Pendidikan yang telah penulis tempuh dimulai dari SDN 2 Jungsemi dilanjutkan ke jenjang MTS Bandar Alim Jungpasir Wedung Demak, kemudian melanjutkan ke MA Nahdlotussibyan Karanganyar Demak.

Setelah itu penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan mengambil Program Studi Ilmu Politik pada Tahun 2018, selama kuliah penulis mengikuti berbagai kegiatan baik didalam kampus maupun diluar kampus seperti KSMW dan BPBD. Penulis berdomisili di Jungsemi Wedung Demak, dan memiliki hobi traveling serta bercita-cita menjadi pengusaha.